



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI BEKASI PADA MASA ORDE
BARU 1967-1998
(STUDI KASUS PESANTREN AT-TAQWA, PESANTREN ANNIDA AL-ISLAMY,
DAN PERGURUAN ISLAM el-NUR el-KASYSYAF)**

SKRIPSI

Hasim. A. Rachmat

0606086975

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI BEKASI
PADA MASA ORDE BARU 1967-1998
(STUDI KASUS PESANTREN ATTAQWA, PESANTREN
ANNIDA AL-ISLAMY, DAN PERGURUAN ISLAM el-NUR el-
KASYSYAF)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**Hasim. A. Rachmat
0606086975**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang di rujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **Hasim A Rachmat**
Npm : **0606086975**
Tanda tangan : 
Tanggal : **10 Juli 2012**







LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hasim A. Rachmat
NPM : 0606086975
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren di Bekasi pada Masa Orde Baru 1967—1998 (Studi Kasus Pesantren at-Taqwa, Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasyaf)

Telah siap untuk diuji di hadapan Dewan Penguji sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji	: Abdurrahman, M.Hum	()
Pembimbing/penguji	: Dr. Mohammad Iskandar	()
Penguji	: Didik Prajoko, M.Hum	()
Panitera	: Tini Ismiyani, M.Hum	()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2012

Oleh :
Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, kemudahan, kesehatan dan hidayah-NYA kepada saya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul "Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren di Bekasi pada Masa Orde Baru 1967-1998 (Studi Kasus Pesantren At-Taqwa, Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf)" dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam persiapan, pembuatan, hingga tahap penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya. Oleh karenanya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mohammad Iskandar selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dengan penuh perhatian dan kesabaran serta kebesaran hati mas selama penyusunan maupun penulisan skripsi ini serta saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama bimbingan. Begitu juga dengan Didik Pradjoko, M.Hum yang telah berkenan sebagai penguji ahli, Abdurrahman, M.Hum yang telah menjadi ketua panitera dan banyak memberikan keringanan sebagai kepala program studi ilmu sejarah pada skripsi saya. Ditengah kesibukan beliau semua, saya beruntung karena telah diberi kesempatan untuk diuji dan kemudian diberi masukan oleh beliau.

Terima kasih juga saya tunjukkan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Sejarah. Betapa beliau semua sangat berjasa terutama dalam pemahaman atas pelbagai konsep dalam Ilmu Sejarah. Terus-terang, saya berhutang budi kepada mereka. Pemikiran dan cara pandang saya dalam melihat

serta memaknai pelbagai persoalan Sejarah, sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Enam tahun berinteraksi dengan mereka, sangat membuka cakrawala saya. Lebih dari itu, betapa uraian kuliah yang saya cermati di ruang kuliah serta percikan pemikiran mereka semua, sangat mendorong saya untuk belajar lebih giat lagi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga. Bapak saya, Almarhum Almaghfurlah H. Basori, mama saya, Hj. Asni Windarti, Adik-adikku, Nurul Ismaya Sari, Indah Nurmala Sari, Deby Astia Sari, Nur Azizah Putri Diah Sari dan Nadia Nur Amalia Fitria Sari yang tanpa henti mengalirkan do'a untuk keselamatan dan keberhasilan saya serta memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang agar saya bisa cepat menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana Humaniora. Begitu juga dengan Saudara-saudaraku yang kehadirannya memberikan kesejukan dan senyumannya yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada H. Abdul Rohman, Yudo Agustinus, dan Irwansyah yang telah mendampingi dan membantu saya dalam mencari sumber-sumber, memberikan masukan yang berarti dan juga sangat membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala jerih payah, dorongan, kesabaran dan perhatiannya selama ini serta yang terpenting adalah kebersamaan yang terbaik dalam situasi yang paling buruk yang pernah kita hadapi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada KH Muhadjirin Aiz, Abang Khaerul Umam Noer, Mas kiteng, De Nash, KH Sahid, Bapak Rosyid, Ella, Fauzi, dan santri-santri Annida Al-Islamy, Attaqwa, dan YAPINK yang telah bersedia menjadi narasumber yang berkaitan dengan tema skripsi saya.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat yang telah memberikan banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan dan juga penulisan skripsi serta membangun karakter (*Character Building*) pribadi saya, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai manusia. Teman-teman seperjuangan Sejarah 2006: Irwansyah (Aconk), Sakinah Tunufus (Kenny), Yudo Agustinus (Engkong), Ghamal, Ikra Muhlis (Boik), Yoga, Rima, Rully (Gembel), Syenny, Tommy, Ryfky, Egi, Fira, Robi, Ary, Itsna, Gonzs, Lucky

(Buluk), Andi, Adi, Pras, Ano, Dina, Ashagi, Achmad Dedy, Amalia, Winda, Mothi, Firman, Ratna, Reza, Ghandi, Erik, Ari. Tak lupa juga kepada rekan-rekan keluarga besar Studi Klub Sejarah UI, Sejarah angkatan 2003, Sejarah 2004, (Arief, Fikri, Sammy, Sulai, Adit, Wisnu, Franto, Ivan, Dien, Yunia, Rara, dll), Sejarah 2005, Mizar, Radit, Mprrie, Dipo, Tomo, Yossi, Oki, Popon, Adi, Bazis, Ria, Ronald, Hendra, Hary, Hari Darmawan, Agung, Mike, Dwi Ren, Insan, Hendri, Herlambang, Didi, Mantri, Bayu, Bim-bim, Daru, Yahya, Yahdi, Yogi, Herlambang, Aji, Dita, Ressa, Devi, Nadia, Ayu, Isye, Hikmah, Fathia, Lady, Safa, Dinda, Nia, Ria, Sari, Cici, Susi, Sejarah 2007 (Wahyu, Asca, Gilang, Inu, Rayi, Tiko, Birong, Dodi, Upat, Gem-gem, Egar, Ines, Adin dan yang lainnya), dan juga kepada Sejarah 2008 (Paskalis, Cindy, Alan, Oly, Owi, Dll) dan Sejarah 2009 Nabihah, Puri, Isna, Wiwin, Tituk, Jiung Dll). Keluarga Besar DPM FIB 2008 dan 2009, terutama Hanum, Ririn, Happy, Aryo, Kak Baihaki, Sarmin, Miko, dan Nihq. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII UI), terutama Munir, Senja, Woro, Ana, Gunawan, Mukhtar, Lukman, Kartini, Faiqoh, Syekh Fauzi, Bang Alfanny, Erwien, Didik, dan Sahabat-sahabat lainnya. Serta teman-teman antar jurusan (Hotman, Amar, Dede, Mardi, Yogi, Andrey, Ali, Komeng, Khaidir, Jaka, Aryo, Dan kawan-kawan lainnya yang tak bisa disebut satu persatu). Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang luar biasa hangat, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga, dan dukungan moral yang besar selama ini.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saya menginginkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga penulisan ini dapat menambah penulisan mengenai pesantren di Indonesia dan juga dapat memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.
Depok, 10 Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

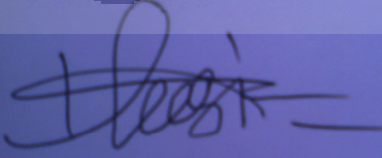
Nama : Hasim A Rachmat
NPM : 0606086975
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul :

Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren di Bekasi Pada Masa Orde Baru 1967-1998 (Studi Kasus Pesantren At-Taqwa, Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-kasysaf)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2012
Yang menyatakan

(Hasim A Rachmat)

ABSTRAK

Nama : Hasim A Rachmat
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren di Bekasi Pada Masa Orde Baru 1967-1998 (Studi Kasus Pesantren At-Taqwa, Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf)

Skripsi ini memaparkan secara umum dinamika sistem pendidikan pesantren di Bekasi pada masa Orde Baru 1967-1998. Pemaparan dikhususkan kepada penjelasan mengapa sistem pendidikan pesantren tradisional bisa dapat bertahan dalam tekanan sistem pendidikan umum yang lebih modern yang lebih sejalan dengan format pembangunan yang digalakkan rezim Orde Baru selama kurun waktu tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar sistem pendidikan pesantren di Bekasi tetap mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional, namun juga merespon sistem pendidikan umum dengan mengembangkannya sistem klassikal, silabus dan kurikulum yang lebih terarah, dan menambahkan ilmu-ilmu non-agama kedalam pesantren. Hasilnya adalah sistem pendidikan pesantren tradisional yang berdampingan dengan sistem pendidikan umum atau disebut dengan sistem pendidikan pesantren semi-modern.

Kata kunci : Pesantren, Modern, Orde Baru, Bekasi.

ABSTRACT

Name : Hasim A Rachmat
Study Program : Department of History
Judul Skripsi : dynamics of pesantren education system in Bekasi on the New Order era, 1967-1998. (study case Pesantren Attaqwa, Pesantren Annida Al-Islamy, Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf)

This thesis describes about the dynamics of pesantren education system in Bekasi on the New Order era, 1967-1998. This thesis focuses on the explanation why does the traditional pesantren education system still stand against the pressure of modern education system fobbed by the New Order era. This thesis shows that the pesantren in Bekasi, beside their traditional education system, they also responded the modern education system by applying the classical system, syllabus, more directed curriculum, and add non-religion majors. The result is a new system called semi-modern pesantren education system, a joint of pesantren and modern education system.

Key words : Pesantren, Modern, Orde Baru, Bekasi.

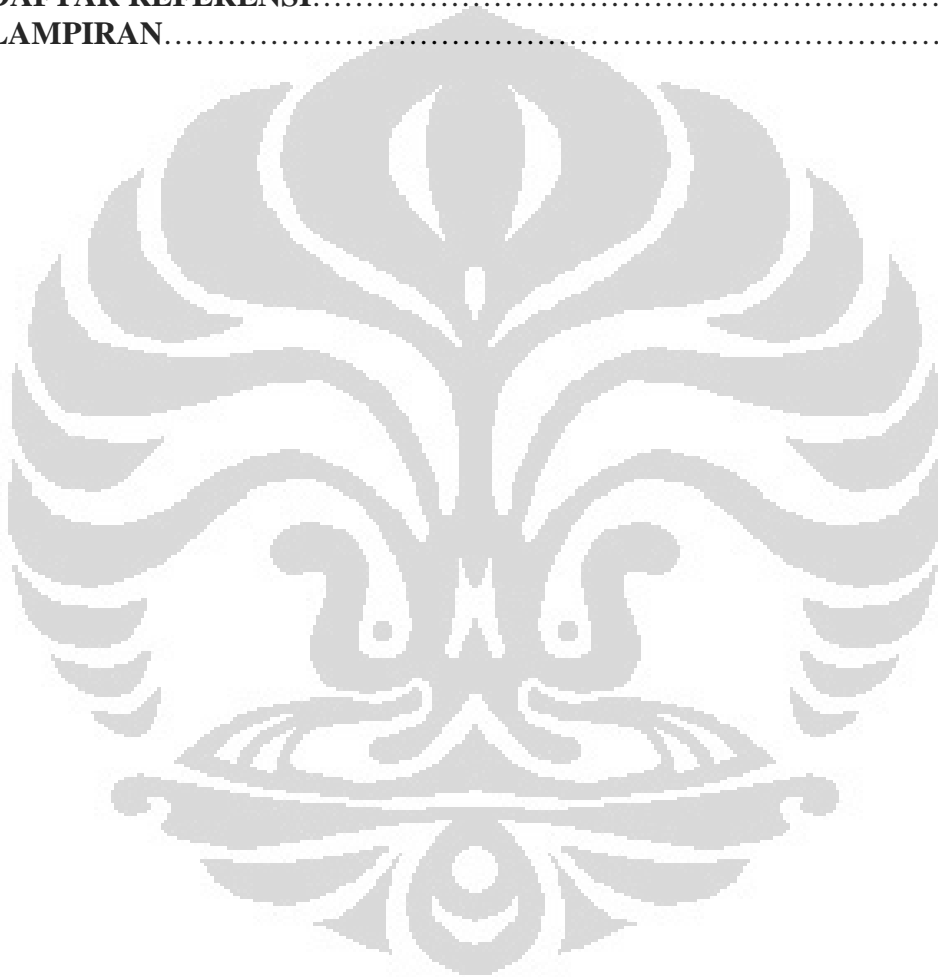
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Sumber Penelitian.....	11
1.6 Tujuan Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI JAWA PADA MASA KEMERDEKAAN HINGGA AWAL ORDE BARU	
2.1 Selayang Pandang Sistem Pendidikan Pesantren dan Perkembangannya Sebelum Masa Kemerdekaan.....	15
2.2 Selayang Pandang Sistem Pendidikan Pesantren dan Perkembangannya pada Masa Kemerdekaan hingga Sebelum Masa Orde Baru.....	25
BAB 3 GAMBARAN UMUM DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN PESANTREN AT-TAQWA, ANNIDA AL ISLAMY, DAN PERGURUAN ISLAM el-NUR el-KASYSYAF PADA MASA ORDE BARU	
3.1. Profil Pondok Pesantren	
3.1.1. Potret Pondok Pesantren Attaqwa.....	31
3.1.2. Potret Pondok Pesantren Annida Al-Islamy.....	36
3.1.3. Potret Perguruan Islam el-Nur el-Kasyshaf.....	41
BAB 4 DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBERTAHANAN PESANTREN PADA MASA ORDE BARU	
4.1. Kebijakan Orde Baru Terhadap Pesantren.....	47
4.2. Tanggapan Pesantren Terhadap Kebijakan Modernisasi Pendidikan Orde Baru.....	51
4.2.1. Respon Pesantren Attaqwa.....	52

4.2.2. Respon Pesantren Annida Al-Islamy	57
4.2.3. Respon Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf	61
4.3. Hal-hal yang Masih Bertahan di Pesantren Pada Orde Baru.....	64
4.3.1. Pendekatan Edukasi.....	65
4.3.2. Model Pembelajaran.....	70
4.3.3. Interaksi Edukatif di Lingkungan Pesantren.....	73
4.3.4. Lingkungan dan Iklim Pendidikan.....	74

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan	77
DAFTAR REFERENSI	80
LAMPIRAN	84



DAFTAR LAMPIRAN

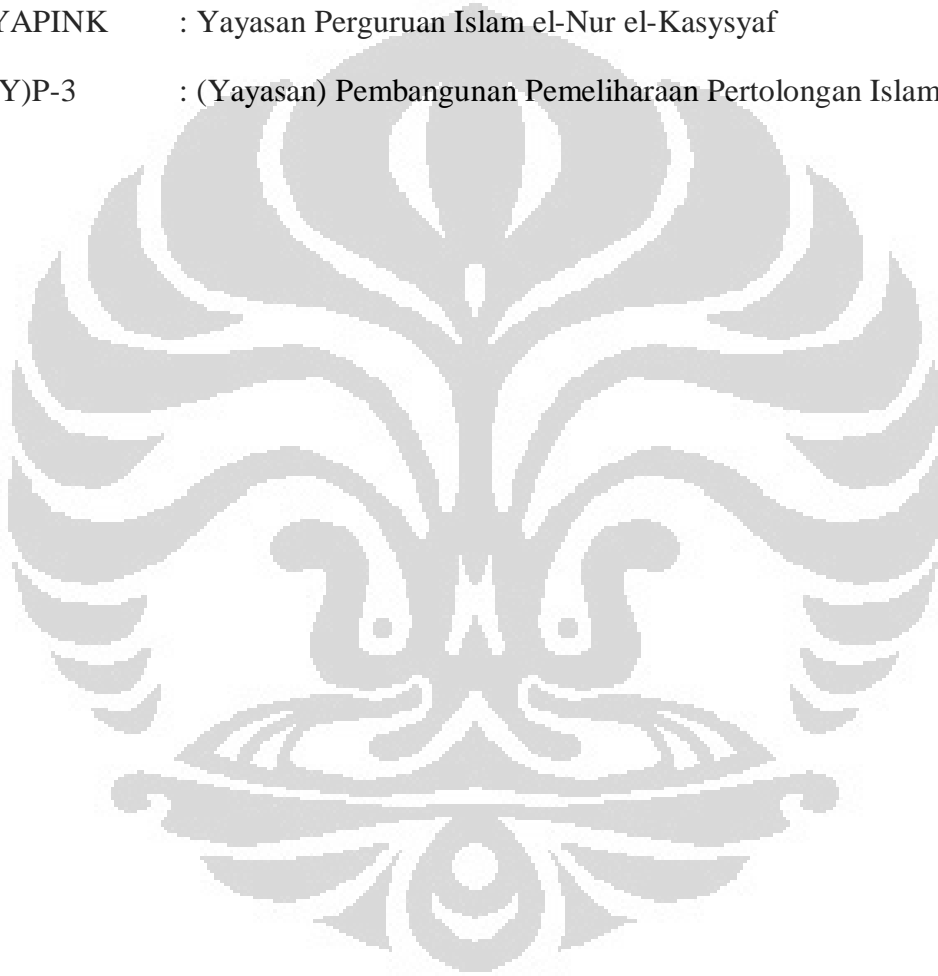
Lampiran 1	Peta Kota Bekasi.....	84
Lampiran 2	Peraturan Pemerintah No. 73 Thn. 1991.....	83
Lampiran 3	Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989.....	91
Lampiran 4	Brosur Pesantren Attaqwa.....	105
Lampiran 5	Brosur Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf.....	106
Lampiran 6	Gradasi Kitab didalam sistem halaqah di Ponpes Annida.....	107
Lampiran 6.1	Gradasi Kitab didalam sistem campuran di Ponpes Annida.....	108
Lampiran 7	Wawancara dengan KH Aiz Muhadjirin.....	110
Lampiran 8	Wawancara dengan bapak Kiteng.....	115
Lampiran 9	Wawancara dengan H. Abdul Rahman	116
Lampiran 10	Wawancara dengan Haris	118
Lampiran 11	Wawancara dengan Ella	119
Lampiran 12	Wawancara dengan KH Sahid	120
Lampiran 13	Wawancara dengan Sahrul Fauzi	121
Lampiran 14	Wawancara dengan Drs. H. A. Rosyid Thaha, M.Mpd.....	122
Lampiran 15	Wawancara dengan Khaerul Umam Noer.....	124
Lampiran 16	Wawancara dengan Mahfuzh Syafii.....	126
Lampiran 17	Dokumentasi Yayasan Perguruan Attaqwa	129
Lampiran 18	Buku Sejarah Singkat Annida Al-Islamy	138
Lampiran 19	Foto-foto dokumentasi.....	140

DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Depag	: Departemen Agama
EBTANAS	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
GP	: Gerakan Pemuda
INISA	: Institut Agama Islam Sholahuddin Al-Ayubi
IPPNU	: Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama
KH	: Kiai Haji
MA(N)	: Madrasah Aliyah (Negeri)
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MTs(N)	: Madrasah Tsanawiyah (Negeri)
MTQ	: Musabaqoh Tilawatil Qur'an
MMA	: Madrasah Menengah Attaqwa
MWB	: Madrasah Wajib Belajar
NU	: Nahdlatul Ulama
PINK	: Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf
PKN	: Pendidikan Kewarga-Negaraan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMP	: Pedoman Moral Pancasila
Ponpes	: Pondok Pesantren
PP	: Peraturan Pemerintah
P4	: Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
P dan K	: Pendidikan dan Kebudayaan

- PGA(N) : Pendidikan Guru Agama (Negeri)
- SKB : Surat Keputusan Bersama
- SMA : Sekolah Menengah Atas
- SMP : Sekolah Menengah Pertama
- TK : Taman Kanak-Kanak
- UUSPN : Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
- YAPINK : Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf
- (Y)P-3 : (Yayasan) Pembangunan Pemeliharaan Pertolongan Islam



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga dan sistem pendidikan yang masih bertahan dari abad pra-Islam¹ di Nusantara sampai kini adalah lembaga dan sistem pendidikan pesantren.² Sebenarnya lembaga ini bukan berasal dari peradaban Islam tetapi dari masa pra-Islam. Kini lembaga ini lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara umum, sistem pendidikan pesantren merupakan sistem pendidikan yang independen dan beradaptasi sesuai dengan kemampuan para pemimpin atau pengelola pesantren terkait.

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.³ Pesantren pada dasarnya merupakan asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang dikenal dengan sebutan kiai, atau *ajengan*.⁴ Di pulau Jawa, Indonesia, orang-orang yang dianggap tinggi ilmu pengetahuannya dalam bidang agama Islam disebut kiai (di Jawa Barat *ajengan*) atau ulama.⁵

Di dalam Undang Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa : “Pendidikan di

¹ Dikatakan pra-Islam disebabkan secara historis, pesantren dapat diartikan sebagai penerusan sistem pendidikan pra-Islam di negeri ini, yang oleh sementara kalangan diidentifikasi sebagai *sistem mandala*. Seperti dikatakan Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*; esai-esai pesantren, LkiS, 2001, hlm. 121. *mandala* adalah kata Sansekerta, yang berarti lingkaran. Lebih jelas lagi mengenai *mandala*, lihat Ir. Heinz Frick, *Arsitektur Dan Lingkungan*, Kanisius, 1988, hlm. 42-44.

² Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia V.-cet.-2* Edisi Pemutakhiran, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 302.

³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS: Jakarta, 1994, hlm. 6.

⁴ Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, MATABANGSA, 2001, hlm. 91.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Indonesia diselenggarakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan; sedangkan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan.”

Pesantren dengan sistem pendidikannya yang menyelenggarakan proses pendidikan yang sifat pendidikannya tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Sistem pendidikan pesantren yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan itu dikatakan sebagai sistem pendidikan yang di luar sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan pesantren dengan elemen-elemen pesantren⁶ pada umumnya mengalami perkembangan dari masa ke masa dikarenakan sikap para kiai yang terbuka akan kritik dan saran yang membangun sebagai cara dalam mempertahankan eksistensi pesantren yang dikelolanya.

Elemen-elemen umum sistem pendidikan pesantren itu yang paling pokok, ada lima elemen yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, kitab-kitab klasik, masjid, kiai dan santri.⁷ Dan terus berkembang hingga penyelenggaraan sistem pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kiai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama dan atau para ustadz yang hidup bersama ditengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri.⁸

Pondokan tersebut biasanya terletak tidak berjauhan dengan masjid dan rumah kiai atau *ajengan*. Komplek pesantren di Pulau Jawa umumnya berada di luar kota, bahkan banyak yang dibangun di pinggiran desa, dalam arti di luar permukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya. Di beberapa daerah, seperti

⁶ Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 41-42.

⁷ *Ibid.* hlm. 44

⁸ Mastuhu. *Op.Cit.* hlm. 6

di daerah Sukabumi, ada juga pesantren yang sejak masa kolonial telah berdiri di dalam kota.⁹

Menurut Iskandar, dalam pesantren secara garis besar terdapat dua golongan santri. Pertama adalah *santri mukim*, yaitu santri menetap di pesantren dalam jangka waktu tertentu (umumnya relatif lama). Mereka inilah yang merupakan salah satu inti kehidupan pesantren. Kedua adalah *santri kalong*, yaitu para santri yang tidak menetap di kompleks pesantren, namun secara rutin mengikuti pelajaran yang diselenggarakan pihak pesantren. Kebanyakan dari para *santri kalong* ini berasal dari penduduk kampung atau desa sekitar pesantren tersebut. Para santri inilah yang secara tidak langsung menjadi penghubung kiai dengan penduduk kampung luar pesantren dan sekaligus menjadi semacam alat promosi kiai dan pesantrennya.¹⁰

Ada banyak opini negatif terhadap eksistensi pesantren, mereka menilai pesantren sebagai lembaga yang kaku yang tidak responsif, sulit menerima perubahan (pembaharuan), dengan tetap mempertahankan pola pendidikannya yang tradisional (*salafi*),¹¹ menurut Mursidi, pesantren menjadi semacam institusi yang cenderung eksklusif dan isolatif dari kehidupan sosial umumnya.¹² Masih banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap pesantren. Hal ini muncul karena memang banyak orang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang pondok pesantren, sehingga mereka mempunyai penilaian yang salah terhadapnya.

⁹ Mohammad Iskandar, *Op.cit.* hlm. 91.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹¹ Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa secara garis besar muncul dua kelompok pesantren. Pertama, pesantren *salafi* (tradisional) yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan sistem pengajaran *sorogan* dan *bandongan* sebagai inti pendidikan di pesantren. Kedua, pesantren *khilafah* (modern) yang disamping pengajaran kitab-kitab klasik, telah memasukkan pelajaran umum dalam pesantren, serta sistem pengajaran *sorogan* dan *bandongan* yang tidak lagi dominan. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 41-42. Dan menurut Iskandar, perbedaan terletak pada sistem klasikal dan kurikulum, silabus dan tahun ajaran yang tidak jelas pada pesantren *salafi*. Lihat Iskandar. hlm. 99.

¹² Mursidi, *Sistem pendidikan Pesantren tradisional sebagai alternative pola pendidikan Islam di Indonesia (Studi pada pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta)*, Magister Studi Islam UII, PDF, hlm. 3.

Selain dari sistem pendidikan Barat oleh kolonial Belanda, datang juga tantangan dari eksponen kaum *mujaddid*¹³ yang memberikan stigma jelek terhadap sistem pendidikan pesantren, dan menginginkan agar pesantren dihapuskan atau setidaknya dirubah ke sistem pendidikan umum yang lebih modern. Para *mujaddid* mengkritik berkaitan dengan lamanya belajar di pesantren yang lamanya puluhan tahun, dan tidak berhenti di sistem pengajarannya semata, melainkan juga materinya, khususnya penggunaan kitab-kitab kuning.¹⁴

Kaum *mujaddid* menurut Noer adalah gerakan Islam modernis,¹⁵ kelompok ini selain aktif dalam mengkritik pemikiran kaum tradisional, juga aktif dalam pembaruan pendidikan. Misalkan saja Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, bisa menjadi ukuran pola lembaga pendidikan kelompok gerakan Islam modernis. Pola pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah menekankan pendidikan formal seperti Barat yang diperkenalkan oleh Belanda atau yang lebih dikenal dengan sebutan “sekolah umum”. Kurikulum yang dipakai pun tidak jauh berbeda dengan kurikulum sekolah pemerintah pada umumnya, kelebihanannya adalah ditambahkan pelajaran agama Islam.¹⁶

Tujuan awal dari pendidikan di pesantren adalah melahirkan ahli agama Islam. Maka sistem pendidikan pesantren tradisional lebih banyak didominasi dengan penguatan terhadap agama Islam, seperti fiqh, tasawuf akhlaq, Hadits dan sejenisnya. Keyakinan ini menurut Basori diakibatkan oleh sebagian besar kiai

¹³ *Mujaddid* atau *kaum tajdid* dan sering pula disebut para pembaru atau *kaum muda* seperti yang diterangkan oleh Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, MATABANGSA, 2001, hlm. 101.

¹⁴ Mohammad Iskandar. *Op. Cit.* hlm. 101.

¹⁵ Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980, hlm. 7, ia mengelompokkan muslim modernis yang ia namakan *Kaum Muda* dengan muslim tradisional yang ia sebut sebagai *Kaum Tua*. Kaum Muda mengkhendaki adanya perubahan dan tidak mau terikat dengan tradisi. Dalam urusan agama, Kaum Muda berusaha menghapuskan *bid'ah* dan *khurafat* yang dipandang sebagai faham dan perbuatan yang berlawanan dengan *syari'at*. Ini juga sekaligus membatasi pengertian muslim modernis di Indonesia yaitu kelompok pengikut pembaruan yang di antaranya dipelopori oleh Muhammad Abduh pada 1849-1905, yang bertujuan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits.

¹⁶ Cara ini dimanfaatkan juga oleh lembaga-lembaga pendidikan milik organisasi kelompok Islam modernis lain, contohnya: Sekolah Al-Irsyad, Sumatera Thawalib, Sekolah Jamiat Khoer, dan lainnya. Lebih jelas lihat Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980, hlm. 95.

yang menolak masuknya ide pembaharuan, karena ide-ide pembaruan itu tidak sesuai dengan tradisi-tradisi pesantren yang menekankan pada ajaran agama.¹⁷ Oleh karena itu Departemen Agama yang dipimpin KH Wahid Hasyim menawarkan ide pembaharuan dengan merekonstruksi tujuan pembelajaran di pesantren, yang semula pesantren diarahkan untuk melahirkan ahli agama (ulama atau kiai) menjadi tenaga kerja yang bisa bersaing di dunia kerja.¹⁸

Masuknya sistem klassikal (penjenjangan waktu belajar dengan sistem kelas) yang diperkenalkan pada masa kolonial Belanda tidak mematikan sistem *halaqah* yang tetap dipertahankan.¹⁹ Ada anggapan bahwa pesantren sebagai sebuah kerajaan bagi kiai pendirinya, dan apabila kiai tersebut meninggal maka pesantren tersebut akan hilang.²⁰ Mayoritas kiai beradaptasi secara arif dengan tantangan zaman dan tuntutan realistis masyarakat. Bentuk adaptasi secara arif bisa terlihat dengan sistem pendidikan pesantren yang merespon dengan sikap “mempelajari sambil mencontoh”. Di satu sisi pesantren mempelajari sistem pendidikan Belanda atau menggantinya dengan sistem pendidikan umum yang menjadi *tren* pada masanya, namun juga dalam batas-batas tertentu saja dan menyesuaikan dengan pendidikan agama. Dalam prakteknya adalah dengan memakai sistem klassikal kurikulum dan silabus serta tahun ajar yang lebih jelas.²¹ Sistem klassikal atau kuliah mimbar atau juga bisa disebut sistem madrasi/madrasah adalah sebuah sistem pendidikan modern dengan menggunakan pengajaran yang dilaksanakan di dalam ruang kelas. Sistem pengajaran yang didasarkan pada

¹⁷ Ruchman Basori, *The Founding Father Pesantren Modern Indonesia Jejak Langkah K.H.A. Wahid Hasyim*, Inceis, 2006, hlm. 103.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁹ Sistem *halaqah* adalah sistem menghafal teks-teks berbahasa Arab. juga cara penyampaian pelajaran diberikan secara berkelompok dalam satu lingkaran, tidak jauh berbeda dengan kelompok pengajian. Lihat Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, MATABANGSA, 2001, hlm. 96.

²⁰ Di Jawa perkataan kiai lebih lazim dipakai daripada perkataan ulama. Kiai adalah seorang sarjana Muslim yang menguasai bidang-bidang tauhid, fiqh dan sekaligus juga seorang ahli sufi. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 34-35, mengenai penjelasan kiai lebih terperinci lagi lihat Iskandar, *op.cit.*, bab pendahuluan.

²¹ Mohammad Iskandar, *Op.Cit.* hlm. 99.

sistem klasikal. Dalam sistem klasikal ini, seorang guru dihadapkan dengan jumlah siswa yang cukup besar (kurang lebih 30-40 siswa/kelas).²²

Banyaknya studi tentang sistem pendidikan pesantren mengesankan adanya keunikan tersendiri dari dunia pesantren. Keunikan pesantren itu semakin bertambah kuat dalam pandangan masyarakat karena kemampuannya untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi bahkan memiliki kemampuan adaptasi dan daya tahan terhadap perubahan sosial.

Kemampuan tersebut diatas terdapat juga di pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan Desa Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang terkenal dengan program pengabdian masyarakatnya, salah satunya dengan program ketrampilan pertanian, pesantren Annida Al-Islamy, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, yang terkenal dengan pesantren *falakiyah* (Ilmu Falak (astronomi)), dan perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang terkenal dengan pesantren Aswaja.²³ Semuanya merupakan representasi dari lembaga pendidikan tradisional yang berorientasi kerja dan semi-modern, karena pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama semata, tetapi program pendidikan telah mempertimbangkan pangsa pasar dan mengejar ketertinggalan pendidikan pondok pesantren dengan sekolah-sekolah umum yang modern, sebab pesantren-pesantren ini telah memadukan sistem pendidikan pesantren tradisional dengan sistem pendidikan umum. Contohnya, pesantren At-Taqwa yang berdiri sejak tahun 1940 M. oleh KH. Noer Ali ini semula hanya terfokus pada pengajaran membaca dan menulis al-Qur'an, tauhid, serta fiqh saja, kemudian pada tahun 1962 didirikan Madrasah Menengah Attaqwa (MMA) yang merupakan perkembangan sistem dari sebelumnya yang

²² Hendra Surya, *Menjadi Manusia Pembelajar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 172.

²³ Aswaja menurut KH Muhyiddin Abdusshomad, didalam bukunya yang berjudul *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi*, Surabaya:Khalista, 2008., hlm 4. Dalam istilah masyarakat Indonesia, Aswaja adalah singkatan dari *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Ada tiga kata yang membentuknya, yaitu: *Pertama, Ahl*, berarti keluarga, golongan atau pengikut. *Kedua, Al-Sunnah*, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya, semua yang datang dari Nabi Muhammad, berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi. *Ketiga, Al-Jama'ah*, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa *Khulafaur Rasyidin* (Khalifah Abu Bakr, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib). Dari ini, dapat dipahami bahwa *Ahlussunnah Wal-Jama'ah* adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya.

sistem pendidikan pesantren tradisional berkembang menjadi sistem pendidikan madrasah yang berjenjang kelas dan lama masa pendidikan selama enam tahun, sistem ini dikembangkan sejak tahun 1962 untuk putra dan 1964 untuk putri di pesantren Attaqwa.

Pemilihan pondok pesantren At-Taqwa, Annida Al-Islamy, dan el-Nur el-Kasysyaf sebagai sample dan setting penelitian di Bekasi didasarkan pada pemilihan waktu berdirinya yang mendekati awal Orde Baru di Bekasi dan masih ada hingga saat ini serta pelaksanaan kegiatan kepesantrenan yang bercirikan modern namun masih mempertahankan ciri khas pesantrennya yang tradisional di era saat ini yang tengah dihadapkan pada pengaruh Pemerintah Orde Baru.

Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa alasan yakni; *pertama*, pada awal Orde Baru sampai turunnya Presiden RI Soeharto (1967-1998) sistem pendidikan pesantren menunjukkan kemampuan mempertahankan keberadaan dirinya di bawah tekanan dan pengawasan pemerintah Orde Baru. *Kedua*, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya sekolah umum negeri, tidak mematikan sistem pendidikan pesantren. Dalam konteks ini sistem pendidikan pesantren sebagai pendidikan keagamaan dapat melakukan adaptasi dengan tuntutan masyarakat. *Ketiga*, secara akademis perkembangan sistem pendidikan pesantren modern juga sangat menarik untuk dikaji, karena sistem pendidikan pesantren modern merupakan jawaban atas segala problematika dan kritik atas sistem pendidikan pesantren tradisional selama ini.

Oleh karenanya, pesantren dengan segala keunikan dan dinamikanya merupakan kajian yang selalu menarik untuk dibahas. Para peneliti, baik asing maupun lokal, cukup banyak yang mengkaji pesantren ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang seperti pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Beberapa di antaranya seperti Zamakhsyari Dhofier²⁴, Karel A. Steenbrink²⁵, Mohammad Iskandar²⁶, Mastuhu²⁷, dan beberapa lainnya

²⁴Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES. 1982.

²⁵ Karel Steenbrink. *Pesantren, Madrasah, Sekolah pada masa Kontemporer*. Jakarta: LP3ES. 1991.

²⁶ Mohammad Iskandar. *Para Pengemban Amana; Pergulatan Pemikiran kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Penerbit : MATABANGSA, 2001.

yang karyanya cukup diperhitungkan. Namun, dibandingkan dengan jumlah pesantren yang begitu banyak, sejumlah penelitian itu belum memadai, terutama karena pesantren-pesantren yang diteliti umumnya pesantren tradisional di pedesaan Jawa Timur dan Madura, lalu di daerah Jawa Barat khususnya Priangan. Sejauh pengetahuan yang penulis miliki, belum banyak penelitian mengenai sistem pendidikan pesantren di Bekasi. Berpijak dari sekilas uraian sederhana diatas maka penulis mengambil judul “*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren di Bekasi Pada Masa Orde Baru 1967-1998 (Studi Kasus Pesantren Attaqwa, Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf)*”.

1.2. Perumusan Masalah

Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah seperti apa dinamika sistem pendidikan pesantren pada masa Orde Baru yaitu selama periode 1967-1998, khususnya terletak di daerah Bekasi dengan studi kasus pada pondok pesantren Attaqwa, pondok pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf. Berdasarkan rincian permasalahan tersebut, maka akan diajukan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut;

1. Faktor apa yang membuat Pesantren At-Taqwa, Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf dengan sistem pendidikan pesantren tradisionalnya, dapat berkembang di Bekasi?.
2. Bagaimana dinamika sistem pendidikan pesantren dan seperti apakah profil pesantren di Bekasi pada masa Orde Baru dengan studi kasus Pondok Pesantren At-Taqwa, Pondok Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf.

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penulis membatasi waktu dan ruang lingkup penelitian. Rentang waktunya adalah antara tahun 1967 hingga

²⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta:INIS, 1994.

1998. Tahun 1967 dijadikan titik tolak awal penulisan karena tahun ini merupakan awal berdirinya pemerintah Orde Baru. Sedangkan tahun 1998 dijadikan sebagai akhir periode penelitian karena awal berdirinya pemerintah Reformasi atau akhir pemerintah Orde Baru.

Selama kurun waktu penelitian ini, penulis menjadikan pesantren Attaqwa, pesantren Annida Al-Islamy, dan perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf sebagai studi kasus mengenai dinamika sistem pendidikan pesantren di Bekasi pada masa Orde Baru. Ini karena gagasan sistem pendidikan modern yang ditawarkan oleh Orde Baru cukup mempengaruhi sistem pendidikan pesantren tradisional. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pesantren Attaqwa, pesantren Annida Al-Islamy, dan perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf yang sebelumnya menggunakan sistem pendidikan pesantren tradisional hingga menjadi sistem pendidikan pesantren tradisional-modern. Perkembangan sistem pendidikan pesantren ini yang akan dilihat, apa sebab perkembangan ini dan akibat dari perkembangannya bagi pesantren At-Taqwa, Annida, dan el-Nur el-Kasysyaf.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Heuristik

Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber yang dapat mendukung penulisan skripsi ini, terutama sumber-sumber primer. Sumber primer ini dapat penulis peroleh melalui dari tulisan-tulisan di buku, media tulis lainnya dan media online maupun website resmi pesantren serta peraturan pemerintah yang dibuat mengenai pesantren pada kurun waktu penelitian. Selain sumber tulisan, ada juga wawancara dengan orang-orang yang hidup sezaman, seperti kiai penerus kiai sebelumnya dan alumnus pesantren. Sumber primer lainnya adalah tentu saja pesantren itu sendiri. Selain menggunakan sumber primer dari kebijakan-kebijakan dari Orde Baru, seperti SKB 3 Menteri 1975, UU RI No.2 Tahun 1989, PP No.73 Tahun 1991, guna melengkapi penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang membahas tentang pesantren secara umum.

Dalam melakukan pencarian sumber-sumber, baik primer maupun sekunder, penulis cukup mengalami kesulitan terlebih lagi pada data-data penerimaan santri yang tidak didapat secara utuh, sehingga memaksa penulis mengandalkan wawancara kepada beberapa sumber, seperti pengasuh pesantren saat ini dan alumnus pesantren. Sumber-sumber sekunder penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Pesantren At-Taqwa, Perpustakaan Annida Al Islamy, Perpustakaan At-Taqwa, Perpustakaan Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (YAPINK), Perpustakaan Pusat UI, dan ada pula yang merupakan koleksi pribadi penulis dan pinjaman koleksi sahabat.

1.4.2. Kritik

Kritik menjadi sangat penting dalam menyaring informasi yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Hal ini dilakukan agar data-data yang diperoleh memiliki nilai kredibilitas yang tinggi sehingga dalam penulisan, penulis dapat mempertahankan nilai akademisnya dan menghasilkan karya tulis yang bersifat ilmiah. Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian atas sumber-sumber yang ditemukan. Dengan menguji dan membandingkan semua sumber yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat.

1.4.3. Interpretasi

Setelah menyaring berbagai informasi dari sumber-sumber yang ada dan menghasilkan data-data yang objektif yang diperlukan untuk mendukung penulisan, penulis akan melakukan interpretasi terhadap data-data tersebut. Dengan demikian akan didapatkan fakta yang memiliki tingkat kebenaran tinggi. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, penulis akan menggunakannya sebagai bahan untuk merekonstruksi dalam bentuk tulisan. Di sinilah penulis akan menginterpretasikan mengapa sistem pendidikan pesantren dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat layak menjadi satu sistem pendidikan nasional serta bagaimana pengaruh yang diakibatkannya.

1.4.4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari proses metode penelitian saya. Dalam tahap ini, penulis akan menuliskan semua fakta yang ada menjadi sebuah rangkaian cerita yang menarik secara kronologis.

1.5. Sumber Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer yang penulis gunakan yaitu diantaranya surat keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1987 mengenai penyelenggaraan Madrasah Aliyah program khusus, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 mengenai pendidikan luar sekolah. Selain itu penulis juga menggunakan sumber-sumber lain dari pesantren terkait yaitu seperti kebijakan-kebijakan pesantren.

Tulisan dalam buku yang penulis gunakan adalah *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian tentang unsur dan nilai Sintem pendidikan Pesantren oleh Mastuhu, Sejarah pendidikan Islam di Indonesia : lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangannya oleh Hasbullah, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai oleh Zamakhsyari Dhoefier, Kapita Selekta Pendidikan Islam oleh Arifin, Muzayyin, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi oleh Mujamil Qomar, Sejarah Pendidikan Islam oleh Hanun Asrohah, Pesantren dalam Perubahan Sosial oleh Manfred Ziemek, dan buku-buku lainnya yang akan bertambah selama selesainya skripsi ini. Buku-buku tersebut membahas mengenai pesantren, namun belum ada yang membahas sistem pendidikan pesantren di Bekasi.*

Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan yaitu diantaranya. "Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional" dalam *Masyarakat Indonesia; Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, jilid XXXIV, No. 2, 2008, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", dalam jurnal *The Journal of Asian Studies*, vol. 55, No. 3 (Aug, 1996), pp. 613-634, "Pesantren dalam Bingkai Politik Birokrasi dan Pendidikan Islam di Indonesia", dalam *Jurnal ATTARBAWI*,

vol. 7 No. 1 : Mei 2008-Oktober 2008, “Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* vol. 9 No. 2-2011. Selain itu penulis juga menggunakan sumber internet yang diterbitkan oleh masing-masing pesantren, yaitu diantaranya situs resmi Pesantren Attaqwa, situs resmi Pesantren Annida Al-Islamy, situs resmi Pesantren Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasasyaf.

1.6. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dinamika sistem pendidikan pesantren di Bekasi pada masa Orde Baru. Apakah dinamika tersebut memajukan pesantren atau sebaliknya, sebagai indikatornya adalah jumlah santri. Apakah mengalami penambahan penerimaan santri atau mengalami penurunan penerimaan santri tiap tahunnya sebagai indikasi sukses atau tidak suksesnya kebijakan pembangunan oleh pemerintah Orde Baru atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya. Namun, buruknya sistem administrasi dan pengarsipan pesantren, menyulitkan penulis untuk mendapatkan data penerimaan santri tiap tahunnya pada masa Orde Baru. Penulis akan mengandalkan wawancara, walau cara ini kurang tepat dan banyak kekurangannya. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan sistem pendidikan pesantren secara luas, khususnya di Bekasi;
2. Dapat mengetahui dan memahami secara kritis mengapa sistem pendidikan pesantren tradisional harus dipertahankan eksistensinya;
3. Menambah khasanah baru dalam dunia pendidikan pesantren di Indonesia;
4. Dapat memberikan sumbangan akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui hal-hal seputar dunia pendidikan pesantren, khususnya pada era Orde Baru.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi menjadi lima bab pembahasan.

Bab pertama, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, metode penelitian, sumber penelitian yang dipergunakan, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi uraian singkat sejarah pesantren dan sistem pendidikannya di dalam tiga waktu periode, yaitu periode pertama masa sebelum Kemerdekaan hingga masa Kemerdekaan, kedua, masa Kemerdekaan hingga masa Demokrasi Terpimpin/Orde Lama. Dan ketiga, masa Demokrasi Terpimpin/Orde Lama hingga masa Orde Baru.

Bab ketiga Dalam bab ini akan dibahas sejarah pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren At-Taqwa, Pondok Pesantren Annida Al-Islamy, Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf dan perkembangannya ketiga pesantren ini; Visi, Misi, dan Tujuan, sistem pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa, Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf.

Bab keempat akan membahas dinamika sistem pendidikan pesantren Attaqwa, Annida Al-Islamy, Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf. Dan bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah kebijakan Orde Baru terhadap pesantren. Bagian kedua adalah respon pesantren terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru. Bagian ketiga adalah hal-hal yang masih bertahan di pesantren pada masa Orde Baru

Bab kelima akan menutup rangkaian penelitian penulis dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB 2

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI JAWA PADA MASA KEMERDEKAAN HINGGA AWAL ORDE BARU

Seperti disebutkan di awal Bab Pendahuluan, pesantren mengalami perkembangan yang dinamis di dalam sistem pendidikannya. Perkembangan ini merupakan jawaban atas kritik yang di tujuhan kepadanya, maka perkembangan sistem pendidikan pesantren juga mengikuti perkembangan zamannya. Akan tetapi pesantren juga terus mempertahankan sistem pendidikan dengan tradisi-tradisi pesantrennya.

Bab ini akan menjelaskan secara singkat sejarah sistem pendidikan pesantren pada masa Kemerdekaan hingga awal masa Orde Baru. Pada masa Kemerdekaan ini, sistem pendidikan pesantren tradisional merupakan sistem utama yang tetap di gunakan oleh lembaga pesantren pada masa kemerdekaan yang kemudian terus berkembang pada masa Orde Baru hingga kini menjadi sistem pendidikan pesantren semi-modern²⁸ (perpaduan sistem tradisional dengan

²⁸Perbedaan mendasar antara pesantren *salaf* (tradisional) dengan pesantren *khalaf* (modern), terutama pada pesantren *salaf*, para santri hanya mempelajari pengetahuan Islam saja. Terlepas dari kenyataan bahwa pesantren telah mengubah sistem pengajarannya dengan mengelompokkan secara hierarkis sehingga santri harus mengikuti pelajaran tertentu, dari yang terendah hingga yang tertinggi, pelajaran-pelajaran yang diajarkan di pesantren *salaf* adalah sama, yakni dengan memusatkan perhatian pada pengajaran pelajaran-pelajaran keislaman. Meskipun demikian, perkembangan zaman telah mendorong banyak pesantren untuk melakukan perubahan. Modernisasi pesantren telah menyebabkan penampilan beberapa pesantren berbeda dari pesantren tradisional dalam banyak hal. Perbedaan itu terutama terletak pada sistem pendidikannya akibat hadirnya sistem madrasah dan terutama hadirnya sekolah-sekolah umum dalam kompleks pesantren. Dalam madrasah telah diperkenalkan pelajaran-pelajaran sekuler karena mereka harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama. Dengan perubahan yang sifatnya penambahan ini, para santri pada pagi hari belajar di madrasah atau sekolah umum lainnya, seperti SMU, dan baru pada malam hari mereka mempelajari kitab-kitab yang membahas materi keislaman. Lihat Endang Turmudi, *Pendidikan Islam Setelah seabad Kebangkitan Nasional*, Majalah yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Masyarakat Indonesia; Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XXXIV, No. 2, 2008, hlm. 81. Lalu perbedaan pesantren semi-modern dengan pesantren modern yang sama-sama mempertahankan sistem *halaqah* adalah perbedaannya terletak pada banyaknya kitab-kitab kuning yang dipakai. Pesantren modern lebih sedikit sekali memakai kitab-kitab kuning, artinya sudah banyak terjadi penyederhanaan kitab atau bahkan menggantinya dibanding pesantren semi-modern yang masih mempertahankan banyaknya kitab-kitab kuning dan sedikit terjadi penyederhanaan.

sistem pendidikan modern). Sebelum masuk ke pembahasan, tidak ada salahnya sedikit membahas asal-usul sistem pendidikan pesantren serta perkembangannya sebelum masa Kemerdekaan.

2.1. Selayang Pandang Sistem Pendidikan Pesantren dan Perkembangannya sebelum Masa Kemerdekaan

Sistem pendidikan pesantren menurut M. Arifin adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.²⁹ Unsur-unsur sistem pendidikan pesantren menurut Mastuhu dapat dikelompokkan sebagai berikut: aktor atau pelaku, seperti: kiai, santri, sarana perangkat keras, seperti masjid, asrama, atau pondok, rumah kiai dan sebagainya.³⁰ Sarana perangkat lunak, seperti: tujuan, kurikulum, metodologi pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya. Unsur-unsur pesantren berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya pesantren bersangkutan. Untuk pesantren kecil unsur-unsurnya cukup dengan kiai, santri, asrama atau pondok, kitab-kitab keagamaan, dan metode pengajaran, akan tetapi untuk pesantren besar perlu ditambah dengan unsur unsur lain, seperti : Ustadz sebagai pembantu kiai dalam pengajaran, gedung sekolah atau madrasah, pengurus, tata tertib dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pesantren.³¹

Dhofier, membagi pesantren ke dalam tiga kategori, yaitu: kecil, menengah dan besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai jumlah santri kurang dari seribu dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten (pada umumnya pesantren tidak terbatas santrinya berasal dari satu kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri berjumlah 1000-2000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten (bahkan luar pulau Jawa). Pesantren besar biasanya mempunyai santri berjumlah lebih dari

²⁹ Muzayyin Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Biona Aksara, 1995 Cet, ke-3, hlm. 257.

³⁰ Mastuhu. *Op. Cit.*, hlm. 19.

³¹ *Ibid.*, hlm. 55-56.

2000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa provinsi.³² Dhofier membagi kriteria pesantren besar dan kecilnya dari jumlah santrinya, padahal menurut Iskandar, jumlah santri selalu berubah-ubah, pesantren yang awalnya banyak santrinya, pada akhirnya santrinya jauh berkurang, sehingga kriteria ini pun menjadi tak berarti lagi.³³

Dalam sistem pendidikan Islam, kegiatan pendidikan diselenggarakan melalui pondok pesantren. Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Seperti kita ketahui, bahwa datangnya Islam dibawa oleh para pedagang muslim. Sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya yaitu para pembeli dagangannya. Penyiarnya dengan berbagai macam, melalui berlaku sopan santun, ramah-tamah, tulus ikhlas, jujur dan adil di berbagai macam tempat dan waktu.³⁴

Sistem pendidikan Islam informal tersebut di atas, berkembang menjadi pendidikan Islam langgar atau surau yang masih sangat sederhana. Di pusat-pusat pendidikan seperti inilah, berkumpul sejumlah murid, besar dan kecil, duduk di lantai, menghadapi sang guru, belajar mengaji. Tempat-tempat pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk madrasah atau sekolah yang berdasar keagamaan.³⁵

Menurut Turmudi, pada tahap awal, lembaga pesantren memang lebih memfokuskan perhatiannya pada upaya pemantapan *tauhid* (teologi) dan pembinaan *tashawuf* (sufisme dan akhlaq).³⁶ Namun demikian, selanjutnya

³² Zamakhsyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm.44.

³³ Untuk lebih jelas lagi lihat Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 93.

³⁴ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Dirjen Binbaga Islam Depag, Jakarta, 1986. Hlm. 209.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 212.

³⁶ Pesantren saat itu kurang memperhatikan pendalaman keilmuan Islam. Hlm ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya literatur ke-Islaman karya ulama-ulama terkemuka. Barulah pada abad XIX ketika mulai terbuka kontak langsung antara umat Islam di Nusantara dan dunia Islam lainnya, termasuk umat Islam di negara-negara Arab, pesantren bisa mengembangkan pengajarannya, mengingat di pesantren mulai banyak ulama dengan pengetahuan Islam yang memadai setelah mereka belajar di negeri-negeri Arab. Lihat Endang Turmudi, *Pendidikan Islam Setelah seabad Kebangkitan Nasional*, Majalah yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan

pembinaan *tashawuf* (sufisme dan akhlaq) di pesantren yang sudah berkembang justru hanya sebagian kecil saja karena sebagian besar pesantren tidak mengembangkan *sufisme* bahkan ada pula yang menolaknya.

Didorong oleh keinginan untuk lebih mengintensifkan pendidikan agama pada anak-anak, maka sang guru atau pak kiai dengan bantuan masyarakat memperluas bangunan di sekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat mengaji dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tak perlu bolak-balik pulang ke rumah orang tua mereka. Anak-anak menetap tinggal bersama pak kiai di tempat tersebut. Tempat mengaji seperti ini di sebut *Pondok Pesantren*.³⁷

Sistem pendidikan pada pondok pesantren yang masih sama seperti sistem pendidikan di surau, langgar atau masjid, hanya lebih intensif dan dalam waktu yang lebih lama.³⁸ Santri dibebaskan memilih bidang pengetahuan apa yang akan mereka pelajari dan pada tingkat pelajaran mana yang di minatnya karena sebuah kurikulum pesantren tidak berdasar umur, lama belajar atau tingkat pengetahuan.

Pada umumnya pesantren tradisional tidak mengenal kurikulum, silabus dan tahun ajaran yang jelas. Seorang santri dapat datang dan pergi kapan saja ia mau. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pesantren tidak mengenal ijazah tanda tamat belajar. Dalam pengambilan mata pelajaran tidak ada ketentuan yang ketat, kitab-kitab mana yang akan dipakai dan dipelajari terlebih dahulu. Namun dalam kasus-kasus tertentu, ada kitab-kitab yang dianggap semacam prasyarat untuk mempelajari kitab lainnya. Bahasa Arab misalnya, meskipun tidak secara langsung menyangkut permasalahan agama, namun karena Al-Qur'an dan Hadis menggunakan bahasa Arab, maka bahasa ini diperlukan seolah-olah pelajaran agama pula. Sejak pertama kali santri datang menginjakkan kakinya di pesantren, ia harus mempelajari bahasa Arab, dan menghafalnya tanpa boleh salah.³⁹

Indonesia (LIPI), *Masyarakat Indonesia; Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XXXIV, No. 2, 2008, hlm. 72.

³⁷ Zuhairini, *Op.Cit.*, hlm. 212.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

³⁹ Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 100.

Selain tidak ada tahun ajaran dan kurikulum yang jelas dan sistematis, sistem pendidikan di pesantren juga tidak mengenal masa liburan resmi. Para santri boleh mengambil liburan kapan saja waktunya. Lamanya libur pun tergantung kemauan mereka. Meskipun demikian, ada juga bulan tertentu yang dianggap setengah masa liburan. Bulan yang dianggap setengah liburan itu adalah bulan Ramadhan (puasa). Dalam bulan itu, biasanya pesantren-pesantren mengurangi kegiatan rutinnnya. Seringkali bulan Ramadhan dipergunakan sebagai masa perenungan, baik oleh kiai, maupun para santrinya. Kadangkala dalam bulan itu diadakan semacam latihan diskusi, berdakwah, yang tidak jarang dengan melibatkan masyarakat dan ulama dari luar. Arena semacam itu sekaligus dimaksudkan untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman para santri terhadap pelajaran yang telah diterimanya.⁴⁰

Para santri biasa datang dari desa di sekitar pesantren untuk belajar di Masjid. Jika pesantren sudah terkenal, biasanya para santri datang dari tempat yang jauh. Pada tingkat permulaan, di samping mempelajari membaca Al-Qur'an, murid-murid juga diajarkan cara salat. Murid juga dilatih untuk ikut pada salat berjamaah agar terbiasa melakukan kewajiban ini. Di samping itu, juga mempelajari masalah teologi yang bersangkutan dengan soal iman (kepada Allah), tauhid, menjauhkan sirik. Pelajaran elementer tersebut biasanya diberikan pada waktu petang atau malam hari karena pada pagi hari atau siang hari mereka membantu orang tua baik di sawah maupun kebun.⁴¹ Sedangkan pengajian kitab kuning hanya diikuti oleh santri yang sudah memiliki kualifikasi tertentu. Pengajian kitab ini menggunakan dua metode yakni sorogan dan weton/bandongan.⁴² Biasanya sorogan⁴³ diberikan kepada santri yang sudah senior, atau paling tidak santri baru yang telah menguasai pembacaan Al-Qur'an dengan baik.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 100

⁴¹ Deliar Noer, *loc.cit.*, seperti dikutip Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia V.- cet.-2* Edisi Pemutakhiran, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 303-304.

⁴² Zamakhsyari Dhofier, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁴³ *Ibid.*, Lihat hlm. 78.

⁴⁴ Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 97.

Materi yang dipelajari di pesantren berupa kitab-kitab karya-karya para ulama *mutaakhirin*,⁴⁵ kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, teks tertulis, karena itu cara penyampaiannya dijelaskan secara lisan oleh para kiai, sangat penting. Proses belajar-mengajarnya adalah beberapa santri membaca kitab tertentu di bawah bimbingan kiai. Ia biasanya membaca teks buku baris demi baris dan menerjemahkannya ke dalam bahasa pengantar (tergantung pada daerahnya, seperti Melayu, Jawa, dan Sunda) disertai *syarah* (komentar seperlunya). Bagi Wahid, ciri utama dari pengajian tradisional ini adalah cara pemberian pengajarannya, yang ditekankan pada penangkapan harfiah (*letterlijk*) atas suatu kitab (teks) tersebut, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab lain.⁴⁶ Buku-buku yang dipelajari biasanya dicetak di Mekah, Kairo, dan Istanbul. Setelah santri menamatkan kitab tertentu, mereka memperoleh ijazah, setelah itu mereka dapat berpindah ke pesantren lain untuk mempelajari kitab lain. Banyak kiai terkenal menjadi ahli sejumlah kitab tertentu, kebanyakan kiai hanya mengajarkan kitab kuning.⁴⁷

Di samping mengajarkan pengetahuan dasar tentang agama Islam, para kiai juga memberikan latihan mengenai cara hidup dan berpikir orang Islam, sikap hormat, takzim, dan kepatuhan mutlak santri kepada kiai merupakan salah satu nilai utama yang ditanamkan kepada setiap santri mereka. Selama berlangsungnya pendidikan, sering kali terjadi perubahan fundamental dalam struktur kepribadian santri.⁴⁸

Seorang murid yang baru masuk di pondok pesantren, tidak secara langsung belajar pada pak kiai di pondok pesantren itu, kecuali bila dia memang telah sanggup. Biasanya murid baru, belajar lebih dahulu pada asisten kiai tersebut, yaitu seorang pelajar yang telah jauh kajiannya, yang disebut guru bantu

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi : Esai-esai Pesantren*, LkiS, 2001, hlm. 71.

⁴⁷ “Kitab kuning” adalah kitab klasik yang ditulis pada beberapa abad yang lalu dalam huruf Arab yang dipakai di lingkungan pesantren. Kitab tersebut disebut “kitab kuning” karena kertas dari kitab berwarna kuning, kitab itu dibawa dari Timur Tengah. Kitab ini berisi ilmu-ilmu keislaman yang ditulis dengan huruf Arab tanpa *syakl* (tanda baca) sehingga disebut juga “kitab gundul.”

⁴⁸ Sartono Kartodirjo, *Op.Cit.*, hlm.23, seperti dikutip Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia V.- cet.-2 Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Hlm. 304.

atau *badal*. Bila murid telah dapat membaca dan dapat memahami alfa kadarnya kitab, barulah dia menyertai kelompok yang langsung mengaji pada kiai pesantren tersebut.⁴⁹ Cara belajar seperti ini, hasilnya sangat minim, kemajuan seorang santri tergantung pada ketekunan, kerajinan, dan minatnya terhadap pelajaran. Kepatuhan mengikuti pelajaran dan disiplin di pesantren diserahkan kepada santri.

Untuk memperoleh hasil yang memadai, seorang santri biasanya belajar 10 sampai 15 tahun bahkan bisa lebih lagi hingga seumur hidup. Tidak banyak yang berkemauan keras dan berani menghadapi kesulitan hidup di pesantren, apalagi dalam waktu lama. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang mengundurkan diri. Ada pula yang pindah ke pesantren lain dengan harapan di pesantren baru bernasib baik, tetapi lebih banyak dijumpai mereka yang kembali ke kampung halaman mereka untuk dipakai sehari-hari.⁵⁰

Ketekunan seorang santri sangat diperlukan dalam menempuh masa belajar secara tradisional. Sifat belajar di pesantren lebih merupakan syarah sepihak yaitu dari kiai kepada santri, daripada pembahasan bersama antara kiai dengan santri-santrinya. Keahlian yang dimiliki oleh kiai-kiai menyebabkan santri-santri pergi berpindah-pindah dari pesantren yang satu ke pesantren lain.⁵¹

Jika ditinjau dari sudut pengembangan intelektual, kondisi pesantren semacam itu kelihatannya memang lebih menguntungkan bagi orang-orang cerdas, rajin dan tekun. Mereka yang ingin sukses harus bersedia mengorbankan banyak waktunya untuk belajar. Sistem kebebasan yang ada di lingkungan pesantren, justru meminta imbalan yang cukup tinggi dari para santrinya. Mereka harus mampu mendisiplinkan dirinya sendiri.⁵²

Di Jawa, sering terjadi seorang kiai memberi bantuan dan sokongan kepada santri yang dianggap cukup ahli untuk membuka pesantren baru. Tidak jarang terjadi santri yang pandai diambil kiai sebagai menantunya. Sering kali terjadi menantu menggantikan mertuanya, jika mertuanya tidak sanggup lagi mengajar, baik karena terlampau tua atau meninggal. Dalam hal menantu pindah

⁴⁹ Deliar Noer, *Op.Cit.*, Hlm. 15, seperti dikutip Zuhairini, *Ibid.*, Hlm. 213.

⁵⁰ Poesponegoro, *Op.Cit.*, hlm. 305.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 305.

⁵² Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 100.

ke tempat lain dengan membentuk pesantren baru, tidak jarang menantu itu dibekali dengan beberapa santri kiai untuk belajar.⁵³ Dengan demikian, terutama di Jawa Timur dan Jawa Barat banyak pesantren yang mempunyai hubungan erat antara pesantren yang satu dengan lainnya, karena pertalian darah pemimpin-pemimpinnya.

Kehidupan pesantren berpusat pada kiaiinya, sering terjadi, sebuah pesantren yang terkenal, mati sama sekali jika kiai yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini terjadi, terutama pengganti kiai itu keahliannya berbeda atau tidak sama kepopulerannya dengan kiai yang digantikannya.⁵⁴ Kiai dengan sebagai pusat kehidupan pesantren mengendalikan sistem pendidikan pesantrennya, mempunyai otoritas tertinggi dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan kecil maupun besar pengaruhnya untuk pesantren.

Pengaruh kiai pada masa itu tidak hanya terasa pada pesantren atau suraunya, melainkan juga terasa ke seluruh desa. Kiai yang bersangkutan dimuliakan oleh segenap penduduk desa. Dalam soal sehari-hari, pendapat dan nasihatnya sering diminta oleh orang-orang kampungnya.⁵⁵ Perkataan seorang kiai umumnya tidak dibantah oleh para santri, ia menjadi panutan orang ramai, fatwanya dianggap benar, apalagi karena seolah-olah menjadi monopolinya yang diajarkannya sedikit demi sedikit kepada santrinya. Kedudukannya yang demikian itu ia tempati hingga hari tuanya, bahkan sering terjadi bahwa setelah matinya pun pengaruhnya belum juga putus.⁵⁶ Namun, kurang tepat rasanya jika mengatakan bahwa fatwa kiai menjadi sebuah monopoli kepada santrinya, sebuah fatwa dapat diganti apabila sudah tidak sesuai dengan menggunakan tradisi intelektual pesantren yaitu metode *Bahtsul Masa'il (Mudzakaroh)*,⁵⁷ metode ini

⁵³ Deliar Noer, *Op.Cit.*, hlm. 17-18, seperti dikutip Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia V.- cet.-2 Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 305.

⁵⁴ Poesponegoro. *Op.Cit.* hlm. 305.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 305.

⁵⁶ Deliar Noer, *Op.Cit.*, Hlm. 18-19, seperti dikutip Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto *Sejarah Nasional Indonesia V.- cet.-2 Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 306.

⁵⁷ Mudzakaroh merupakan pertemuan ilmiah, yang membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah dan masalah agama oada umumnya. Lihat Rohadi Abdul Fatah, M. Tata Taufik, Abdul Mukti Bisri, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan: dari Tradisional, Modern, Hingga Post*

sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode musyawarah. Hanya bedanya, pada metode mudzakah pesertanya adalah para kiai atau para santri tingkat tinggi. Metode ini sayangnya tidak bisa diketahui akar sejarahnya dengan pasti, sehingga tidak diketahui apakah metode ini muncul beriringan dengan kemunculan pesantren di Indonesia.

Pada 1920-an sistem pendidikan di pesantren-pesantren mendapat semacam gugatan dan kritikan pedas dari para pembaru atau *kaum muda*. Kaum Tradisional di wilayah Priangan Barat, khususnya Sukabumi menyebut para pembaru itu dengan sebutan kaum *mujaddid* atau *kaum tajdid* dan sering pula disebut “muftahid jaman ayeuna”. Berkaitan dengan lamanya belajar di pesantren, para *mujaddid* mengatakan bahwa agama Islam tidak menyuruh para kiai mengajari 10 tahun *nahu*, 10 tahun *fikih*, sementara iman tauhidnya tidak sempurna.⁵⁸ Waktu kritik-kritik semacam itu dilontarkan, sebenarnya di beberapa pesantren sudah mulai dikembangkan pelajaran sistem kelas, atau madrasah tingkat *ibtidaiyah* bagi anak-anak atau santri tingkat pemula. Misalnya madrasah yang dikembangkan oleh pesantren Cantayan dan Genteng.⁵⁹ Kemudian mereka menilai kitab-kitab kuning sudah ketinggalan zaman, artinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perlu diganti. Bahkan ada yang secara ekstrem mengatakan bahwa orang yang menggunakan kitab-kitab ulama *mutaakhirin*, termasuk golongan *kufar*, *musyrik*, dan *fasiq*. Ada pula yang menuduh kaum tradisional itu bukan kaum *ahli sunnah waljamaah*.⁶⁰

Gugatan juga datang dari pemerintah kolonial Belanda, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam sangat jelek baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial.⁶¹ Oleh karena itu, mereka memilih alternatif kedua,

Modern, Listafariska Putra, 2005. Lihat juga Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, PT LkiS Pelangi Aksara, 2004.

⁵⁸ “Pesantren”, *Pembela Islam* No. 8 Mei 1930, hlm. 13, seperti dikutip Iskandar, *Op.Cit.* hlm. 101.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

⁶¹ Mastuhu, *Op.Cit.*, hlm. 21.

yaitu; mendirikan sekolah-sekolah sendiri dengan sistem pendidikan barat (modern) yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang telah ada.⁶²

Sistem pendidikan Barat dijadikan acuan dan standar untuk menjadikan sistem pendidikan pesantren beralih ke sistem pendidikan Barat yang bisa dikatakan *westernisasi* pendidikan Indonesia. Alasan utama Westernisasi sistem pendidikan Indonesia – untuk melemahkan persatuan Islam – tetapi juga menjelaskan keterpaduan yang kuat antara strategi pendidikan Belanda dan kegiatan misionaris Kristen.⁶³ Tetapi, pendapat ini bisa dibilang berlebihan dikarenakan sistem pendidikan Belanda adalah sistem pendidikan sekuler yang merupakan bentuk kenetralan Belanda terhadap agama di Indonesia dan juga anggapan bahwa sistem pendidikan pesantren begitu buruknya sehingga Belanda lebih memilih sistem pendidikan sekuler.

Menurut Mohammad Iskandar, Belanda tampaknya percaya bahwa penerapan pendidikan sekuler Barat dan pemuadannya dengan strategi kolonial akan cukup untuk menghancurkan pranata pendidikan Islam yang ada di koloni. Sikap Islam fobia ini antara lain tercermin dari peraturan-peraturan yang dikeluarkannya. Pada tahun 1905 misalnya pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan setiap orang untuk meminta izin secara tertulis, jika hendak membuka pengajaran agama. Kemudian pemerintah membentuk satu tim panitia yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan tadi. Adapun yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah bupati atau patih, dan penghulu sebagai salah satu anggotanya. Banyak protes berkaitan dengan peraturan itu dialamatkan kepada pemerintah karena pemerintah dianggap hendak ikut campur dalam masalah agama. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1925, protes itu dikabulkan.⁶⁴

Walau sistem pendidikan Barat menjadi acuan sistem pendidikan kolonial Belanda, namun sistem pendidikan pesantren tetap menjadi acuan masyarakat pribumi yaitu ketika terjadi “polemik kebudayaan” di tahun 1930-an,⁶⁵ sistem

⁶² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 226-227.

⁶³ *Ibid*, hlm. 23.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 103.

⁶⁵ Polemik ini bermula dari tulisan S. Takdir Alisjahbana *Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia* (Pujangga baru, 2 Agustus 1935). Ia membedakan "Zaman pra-Indonesia" (yang berlangsung hingga akhir abad ke-19) dan "zaman Indonesia" (yang

pendidikan di pondok pesantren untuk pertama kali dibanggakan sebagai sistem yang tak terpaku pada penumpukan pengetahuan dan pengasahan otak, tetapi juga mementingkan kepribadian, karakter manusia.⁶⁶ Hal ini bisa berdasarkan pada tiga elemen utama yang menjadikan pesantren sebagai sebuah sub-kultur: pola kepemimpinan di dalamnya yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas.⁶⁷

Pesantren tidak pernah bisa lepas dari masyarakat yang mengitarinya. Peranan yang paling sederhana adalah jasa “pelayanan keagamaan” kepada masyarakat sekitar- diwaktu *talqin* harus dibacakan atau doa selamat harus diucapkan. Disamping menjadikan wadah pendidikan, pesantren juga sebagai media tempat “ritus peralihan” bagi para remaja. Peralihan dari situsai remaja ke suasana dewasa.⁶⁸

Dari sejarah ini terlihat bahwa sebenarnya sistem pesantren bersifat “open minded”, “akomodatif”, dan “produktif”, walau mengalami penurunan jumlah santri yang memprihatinkan, yang disebabkan berbagai faktor internal dan eksternal, terutama makin banyaknya bermunculan pesantren baru dan sekolah lainnya. Tetapi sistem pesantren tetap berkembang dan eksis.

Apabila pada masa perjuangan kemerdekaan saja sudah terdapat kemunduran jumlah murid-murid (santri) pesantren dan madrasah, maka memasuki masa kemerdekaan hingga Orde Lama atau masa Revolusi, kemunduran tersebut makin meningkat. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu, bangsa Indonesia mengalami peperangan yang panjang. Baik ikut serta dalam perang Dunia ke-2, perang melawan pasukan sekutu yaitu: Inggris dan Belanda

mulai pada awal abad ke-20). Ia menegaskan tentang lahirnya zaman Indonesia Baru, yang bukan sekali-kali dianggap sambungan dari generasi sambungan Mataram, Minangkabau atau Melayu, Banjarmasin atau Sunda. Karenanya tiba waktunya mengarahkan mata kita ke Barat. Selanjutnya, terjadi polemik mengenai dunia pendidikan yang melibatkan sejumlah besar tokoh, yaitu S. Takdir Alisjahbana, Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hajar Dewantara. Tulisan mereka inilah yang dihimpun oleh Achdiat K. Miharja didalam buku *Polemik Kebudayaan* yang terbit pada tahun 1948.

⁶⁶ Taufik Abdullah, *Islam dan masyarakat : pantulan sejarah Indonesia*. LP3ES. 1983.hlm.110

⁶⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; esai-esai pesantren*, LkiS, 2001, hlm. 233-234.

⁶⁸ Taufik Abdullah. *Op.Cit.*,.hlm. 111.

hingga perang melawan seperatis atau pemberontakan. Dalam masa yang penuh peperangan ini maka kegiatan pendidikan pesantren pun terhambat.

Pada zaman revolusi fisik, pesantren merupakan salah satu pusat gerilya dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan. Banyak santri membentuk barisan Hizbullah yang kemudian menjadi salah satu embrio bagi Tentara Nasional Indonesia.⁶⁹ Pesantren-pesantren telah berubah menjadi markas-markas “Hizbullah”. Pengajian telah berubah menjadi latihan menggunakan senjata.⁷⁰ Hal inilah yang merupakan salah satu faktor terhambatnya aktivitas kegiatan pengajian dan perkembangan sistem pendidikan pesantren.

Perlunya menggambarkan secara umum perkembangan sistem pendidikan pesantren ini untuk melihat adanya dinamika sistem pendidikan pesantren sebelum masa kemerdekaan untuk melihat kesinambungan sistem pendidikan pesantren pada masa kemerdekaan. Karena itu, perkembangan sistem pendidikan pesantren di Jawa berkaitan dengan dinamika sistem pendidikan pesantren di Pondok Pesantren At-Taqwa, Pondok Pesantren Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf yang lahir setelah masa pemerintah Kolonial Belanda yang merupakan pesantren-pesantren yang tertua di Bekasi. Selanjutnya akan dibahas selayang pandang sistem pendidikan pesantren pada masa kemerdekaan yang merupakan pokok pembahasan bab ini.

2.2. Selayang pandang sistem pendidikan pesantren dan perkembangannya pada masa Kemerdekaan hingga sebelum masa Orde Baru.

Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, lepas dari belenggu penjajahan asing dan lainnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan martabat, serta sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Terutama sendi-sendi pendidikan bangsa, tidak terkecuali pendidikan Islam yaitu pendidikan pesantren. Dengan demikian proklamasi membawa perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

⁶⁹ Mastuhu, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁷⁰ Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Pustaka Sastra LkiS Yogyakarta, cet. Ke-2, 2007, hlm. 335.

Sistem pendidikan pesantren pada masa kemerdekaan berkembang lambat, sehingga hanya beberapa aspek saja sistem pendidikan pesantren berkembang, seperti kurikulum, metode dan cara pengajarannya. Terlebih lagi sikap pesantren yang mempertahankan sistem pendidikannya dan sedikit menyesuaikan dengan perubahan zaman sebagai respons terhadap ekspansi sistem pendidikan umum yang disebarakan pemerintah dengan memperluas cakupan pendidikan mereka.

Sejak awal kehadiran pesantren didalam sistem pendidikannya dengan sifatnya yang lentur ternyata mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntutan masyarakat. Begitu juga pada masa kemerdekaan, banyak pesantren mampu menampilkan dirinya berperan aktif mengisi kemerdekaan dengan ikut berperang mempertahankan kemerdekaan dan membantu membangun negara, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral.

Meskipun demikian, pesantren juga tidak luput dari berbagai kritik terhadap kelemahan sistem pendidikan pesantren tradisionalnya. Tetapi beberapa pesantren dapat segera mengidentifikasi persoalan ini dan melakukan berbagai inovasi untuk pengembangan pesantren. Disamping pengetahuan agama Islam, diajarkan pula pengetahuan umum dan ketrampilan (vocational) sebagai upaya untuk memberikan bekal tambahan kepada santri agar selepas mereka dari pesantren dapat hidup mandiri dan mapan ditengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren juga telah menggunakan sistem klasik dengan sarana dan prasarana pengajaran sebagaimana yang ada di sekolah-sekolah umum. Bahkan ada juga pesantren yang lebih cenderung mengelola dan membina lembaga pendidikan formal, baik madrasah atau sekolah umum mulai dari tingkat dasar, hingga menengah atas.

Dinamika sistem pendidikan dan kelembagaan pondok pesantren ini meng-indikasikan terjadinya keberlangsungan dan perubahan dalam sistem pondok pesantren. Dalam konteks ini, pesantren disamping mampu terus menjaga eksistensinya juga sekaligus bisa mengimbangi dan menjawab perubahan dan tuntutan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren memiliki kelenturan budaya yang memungkinkannya bisa tetap hidup dan berkembang di

tengah masyarakat. Penting ditegaskan di sini bahwa dinamika tersebut pada kenyataannya tidak menggeser ciri khas dan sekaligus kekuatannya sebagai lembaga pendidikan Islam dan mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisionalnya.

Pesantren dalam mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional dan usahanya masuk kedalam sistem pendidikan nasional mengalami berbagai tantangan dan rintangan yang cukup berat, misalkan dalam lingkup pendidikan, terjadi persaingan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan non-pesantren yang pada masa kemerdekaan sistem pendidikan non-pesantren menjadi sistem pendidikan nasional yang utama.

Mirip dengan pesantren pada masa kolonial, pesantren dengan sistem pendidikannya di masa kemerdekaan juga memberikan respons terhadap ekspansi sistem pendidikan umum yang disebarkan pemerintah dengan memperluas cakupan pendidikan mereka untuk dapat bersaing agar mampu menjaga eksistensinya. Respon ini lebih lanjut dengan mengembangkan sistem pendidikan modern untuk menambah atau memperbaiki ke dalam sistem pendidikan pesantren tradisional.

Pengembangan sistem pendidikan pesantren yang telah dimulai ditahun 1920-an di beberapa pesantren Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengadopsi sistem madrasah, sebagaimana sistem yang berlaku di sekolah-sekolah umum, tetapi pelajarannya dititik beratkan pada pelajaran agama saja. Sistem *halaqah*⁷¹ digantikan dengan sistem kelas dan pengaturannya memakai metode klasikal dengan mempunyai lima kelas, misalnya: madrasah pesantren Genteng yang dipimpin Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi.⁷² Pelajaran agamanya tetap menggunakan literatur kitab-kitab klasik, merupakan perkembangan sistem pendidikan pesantren tradisional. Pengembangan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi terus berlanjut di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sedikitnya terdapat dua cara yang dilakukan pesantren dalam hal ini: pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata

⁷¹ Sistem dimana pengajarannya secara melingkar, seperti dijelaskan oleh Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁷² Lebih jelas lagi lihat Mohammad Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 120-131.

pelajaran dan ketrampilan umum; kedua, membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum.⁷³

Cara pertama, seperti telah dikemukakan di atas, telah dimulai kalangan pesantren sejak masa Belanda, meski dengan skala yang sangat terbatas. Tetapi dalam masa kemerdekaan, pembaruan kurikulum itu terus menemukan momentumnya. Namun perlu ditegaskan, bahwa pembaruan kurikulum ini tidak berjalan merata di seluruh pesantren; bahkan pesantren-pesantren yang menerima pembaruan tersebut hanya menerapkannya secara terbatas. Tambahan lagi, terdapat banyak pesantren yang dipimpin oleh kiai lebih konservatif yang umumnya cenderung sangat resistan terhadap pembaruan kurikulum atau substansi pendidikan pesantren.

Kemunculan madrasah ini kemudian mendapatkan perhatian pemerintah, pada tahun 1946 dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah dilakukan dengan memasukkan tujuh mata pelajaran umum yang harus diajarkan sebagai program kurikuler. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Departemen Agama pada tahun ajaran 1958/1959 dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) sebagai salah satu usaha pembaruan sistem pendidikan madrasah. Melalui program ini, bagi madrasah yang sudah memenuhi standar yang telah ditentukan, mendapatkan pengakuan telah memenuhi kewajiban belajar.⁷⁴

Mulai saat itu hingga berlangsung di masa awal Orde Baru, pemerintah giat melakukan penerangan madrasah swasta dan memperbanyak madrasah negeri dan sekolah umum, sedangkan pesantren semakin banyak yang tertarik dengan mendirikan madrasah swasta dengan mencampurkan kurikulumnya dengan kurikulum sendiri, dan tidak sedikit yang meniru madrasah seperti madrasah di Asia Barat (Timur Tengah) disebabkan pendirinya atau kiainya pernah menimba ilmu disana sembari pergi Haji di Mekkah. Seperti, Kiai Haji Noer Ali yang mendirikan Madrasah Menengah At-Taqwa dan Syekh Muhadjirin yang mendirikan Madrasah Swasta Annida Al-Islamy.

⁷³ Mujamil Qomar, *Op.Cit.*, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 244.

Pemerintah melakukan kompromi dengan diterapkannya sistem ganda. Ini berarti bahwa model pendidikan sekuler yang dituntut oleh para pemimpin nasionalis sekuler didampingi oleh model pendidikan agamawi yang dituntut oleh para pemimpin Muslim. Kelak, model yang pertama ini dikenal sebagai pendidikan “umum”, yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan yang kedua dikenal sebagai pendidikan “agamawi” dikelola oleh Departemen Keagamaan (Depag).⁷⁵ Karena dengan adanya sistem pendidikan pesantren tradisional yang mengikuti zamannya, menjadikan pesantren tetap mempunyai daya tariknya.

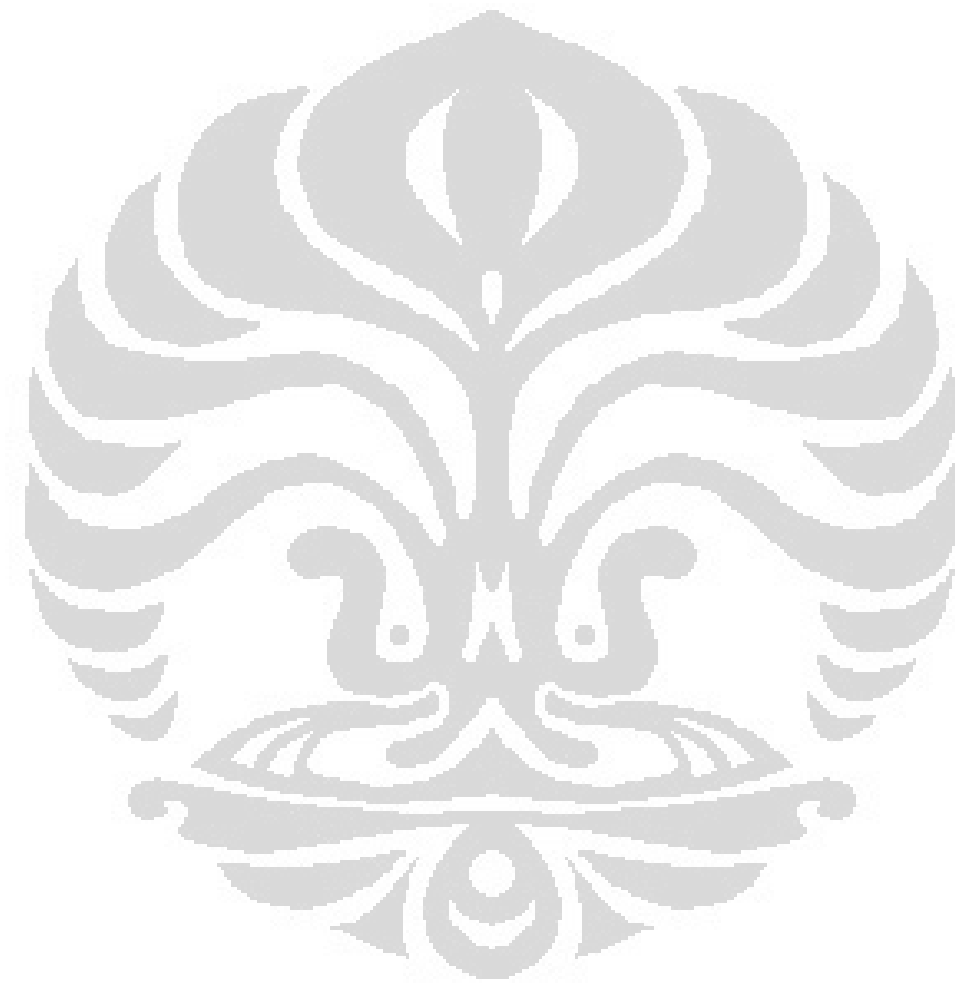
Perpaduan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan formal tersebut dilihat dari perspektif tertentu masih menimbulkan kelemahan. Di samping itu, kehadiran sistem pendidikan formal yang diadaptasi pesantren juga mengurangi sikap independensi pesantren. Dengan menyelenggarakan sistem pendidikan formal, konsekuensinya pesantren harus mengikuti standar-standar yang diterapkan pemerintah. Misalnya, pesantren tidak lagi bisa membikin kurikulum sendiri untuk kepentingan madrasah Tsanawiyahnya yang mengikuti jalur Departemen Agama.⁷⁶

Kelemahan lainnya lagi adalah timbulnya orientasi ekonomis di kalangan pesantren yang bisa mengurangi kadar keikhlasan santri ketika belajar di pesantren. Menurut Mujamil Qomar, para santri boleh jadi mengharap memperoleh ijazah sebagai “tiket” untuk memperoleh kedudukan atau pekerjaan tertentu di masa depan seperti yang terjadi pada siswa-siswa sekolah pada umumnya. Persoalan-persoalan ini merupakan segi-segi kelemahan dari sistem pendidikan pesantren yang mengadaptasi sistem pendidikan formal. Sistem ini juga memiliki kelebihan-kelebihan pada segi-segi lainnya. Dengan cara ini, sistem pendidikan pesantren tradisional tetap dapat mempertahankan tradisi pesantrennya dan tetap berfungsi dalam pengertian aslinya, yakni sistem yang telah di bahas sebelumnya, dan sekaligus merupakan sistem pendidikan Islam madrasah bagi anak-anak di lingkungan pesantren. Boleh jadi, sebagian murid-murid madrasah

⁷⁵ Muhammad Siroz, *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*; penerj, Lilian D. Tedjasudhana. Jakarta: INIS, 2004. hlm. 41.

⁷⁶ Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, hlm. 81.

ini juga menjadi santri mukim di pesantren yang bersangkutan.⁷⁷ Tetapi, setidaknya dengan terdaftar sebagai murid madrasah, mereka kemudian mendapat pengakuan dari Departemen Agama, dan dengan demikian memiliki akses lebih besar didalam menentukan masa depannya. Misalnya adalah lulusan MTs yang dapat melanjutkan ke SMA, ataupun lulusan MA yang dapat melanjutkan ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri).



⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

BAB 3

**GAMBARAN UMUM DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
PESANTREN AT-TAQWA, ANNIDA AL ISLAMY, DAN PERGURUAN
ISLAM el-NUR el-KASYSYAF PADA MASA ORDE BARU**

3.1. Profile Pondok Pesantren

3.1.1. Potret Pondok Pesantren Attaqwa

Pondok Pesantren At-Taqwa Putra yang didirikan pada tahun 1940, sekembalinya K.H. Noer Alie dari menuntut ilmu pengetahuan di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1939. Pada saat itu K.H. Noer Alie mendirikan Pondok Pesantren salafi atau lebih tepatnya disebut dengan pesantren tradisional.⁷⁸ dan fokus pengajarannya adalah membaca dan menulis saja, yaitu kegiatan pengajian al-Qur'an dan kitab kuning secara tradisional (dengan sistem bandongan atau weton dan sistem sorogan) yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama yaitu tafsir, hadits, fiqh dan bahasa Arab. Tempat belajar dan mengajar mulai dikembangkan. Masjid dianggap sudah tidak mampu lagi menampung jumlah murid. Atas dukungan orang tuanya, Noer Alie mulai mengembangkan pengajian menjadi pesantren dengan cara membangun madrasah di depan masjid.⁷⁹

Sebagian besar murid K.H. Noer Alie adalah merupakan pelimpahan dari K.H. Zahrudin (guru dari KH. Noer Alie), hal itu terjadi karena K.H. Zahrudin kembali pulang ke Jambi, sehingga murid-muridnya yang berasal dari Jambi ikut bersama dia pulang ke Jambi, sedangkan sebagian lagi murid-muridnya lagi yang berasal dari Jakarta dan Jawa, dia anjurkan untuk melanjutkan pendidikannya ke K.H. Noer Ali.⁸⁰

Pesantren Attaqwa yang dikenal masyarakat Bekasi memiliki lembaga pendidikan yang terbagi menjadi dua bagian namun satu yayasan yaitu: Pondok

⁷⁸ <https://sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaroji/aku-rindu-kh-noer-alie>.diakses 18:06:2012 pukul 01:02.

⁷⁹ Ali Anwar, *Kemandirian ulama Pejuang*, Dokumentasi pribadi Yayasan Attaqwa, 2006, hlm. 45.

Pesantren At-Taqwa Putra dan Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Pondok Pesantren At-Taqwa Putra terletak Jl. KH. Noer Ali, Ujung Harapan Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Sedangkan, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri terletak di Kampung Ujungharapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ujungharapan merupakan perkampungan seluas 618 hektar.⁸¹

Visi Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Putri adalah menciptakan santri yang berilmu amaliah beramal ilmiah dengan landasan Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang diformulasikan dalam kalimat singkat: ikhlas, berzikir, berfikir, dan beramal. Misi Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Putri membentuk insan sholeh/ah yang mampu menegakkan ajaran Islam dalam aspek kehidupannya, insan yang berzikir dan berfikir, yang mampu menerima dan memberi nasehat, tidak otoriter dan tidak pula rendah diri.⁸²

Pondok Pesantren Attaqwa dulunya pada tahun 1940-1962 adalah pesantren dengan sistem pendidikan pesantren tradisional. Menurut Ali Anwar, untuk mengefektifkan proses belajar dan mengajar, Noer Alie menerapkan metode model Makkah yang dimodifikasi dengan kondisi tempatnya, dimana para murid mendatangi guru atau badal sesuai dengan keahlian dan jam belajar. Jadwal kegiatan para murid pun diatur ketat. Secara umum, biasanya sebelum fajar menyingsing para santri sudah harus bangun. Sekitar 04.30 salat shubuh lalu disusul dengan dzikir dan akhlak. Jam 06.00-07.00 belajar menghafal, lalu istirahat untuk sarapan pagi dan mandi. Belajar utama dilakukan dari jam 07.30-12.00. setelah itu istirahat salat dzuhur, makan siang, dan tidur siang. Jam pelajaran tambahan dilanjutkan dari jam 14.00-18.00. usai salat magrib belajar hadits. *Mudzakarah*⁸³ dilakukan jam 21.00-22.00. setelah itu para murid istirahat tidur.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 45-46

⁸² http://attaqwaputri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57
diambil Pukul 4:38 WIB 21/12/2011.

⁸³ Mengenai *Mudzakarah* lihat hlm. 72.

⁸⁴ Ali Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Metode sorogan tetap dipertahankan, dengan santri mengelilingi guru sambil bersila. Apabila satu materi pelajaran selesai, sang santri diuji oleh Noer Alie.⁸⁵ Metode ini masih dipertahankan hingga saat ini. walau pada perkembangannya termasuk Pondok Pesantren semi--modern (campuran sistem pendidikan pesantren tradisional dengan sistem pendidikan pesantren modern) di Kabupaten Bekasi, disebabkan telah memakai sistem klassikal.

Sistem Klassikal ini dikembangkan sejak tahun 1962 untuk Putra dan pada tahun 1964 untuk Putri.⁸⁶ Pada tahun 1980-an masa kepemimpinan KH. Noer Alie, pesantren ini mulai merintis sistem pengajarannya yang hanya berfokus pada materi kitab-kitab kuning berkembang dengan masuknya materi pelajaran non-kitab kuning, contohnya materi pelajaran bahasa Inggris dan ekonomi.⁸⁷ Perkembangan tersebut berorientasi pada tuntutan masyarakat dan menyesuaikan sistem pendidikan modern. Sejak KH Noer Alie memimpin pesantren ini mulai nampak perpaduan antara sistem pengajaran tradisional yang mengkaji kitab kuning, serta tidak asing bagi santri mempelajari ilmu-ilmu umum yang disebut sekuler dalam pesantren ini. Ini dikarenakan sikap keterbukaan KH Noer Alie terhadap pembaruan, semakin banyaknya pembaruan dari KH Noer Alie maka semakin banyak pula santri yang mondok di pesantren Attaqwa Babelan. Respon KH Noer Alie terhadap pembaruan ini akan lebih dijelaskan di bab selanjutnya.

Menurut pembagian dari Dhofier, pesantren Attaqwa merupakan pesantren besar (jumlah santri dalam kategori pesantren besar adalah lebih dari 1000 santri). Menurut Laporan Pesantren Attaqwa, Perguruan Attaqwa Yayasan P-3 (Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pertolongan Islam) perhitungan kasar, jumlah total santri dari tingkat Ibtidayah ada 1345 santri dari 19 cabang antara tahun 1975 sampai 1986. Dari tingkat Mutamasittah, rata-rata ada 150 santri per tahun dari satu cabang dari tahun 1981 sampai 1986. Untuk tingkah Tsanawiyah, rata-rata ada 650 santri per tahun dari satu cabang dari tahun 1981 sampai 1986. Jumlah

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 47.

⁸⁶ <http://gepista915.blogspot.com/2011/04/gambaran-umum-mts.html> diambil Pukul 4:41 WIB 21/12/2011.

⁸⁷ Berdasarkan wawancara dengan Khaerul Umam Noer, lihat lampiran 15.

rata-rata 650 santri itu dibagi menjadi kira-kira 200 santri laki-laki dan 450 santri wanita.

Perkembangan pesantren sejak berdirinya sampai sekarang mengalami perubahan yang cukup menarik, yaitu periode persiapan, periode pembinaan dan periode pengembangan. Periode persiapan ini bermula semenjak KH. Noer Ali membangun pesantren pada tahun 1940 sekembalinya beliau dari menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah sampai 6 Agustus 1956 dengan didirikannya Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam (YP3). Periode pembinaan dimulai semenjak didirikan Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam (YP3) pada 6 Agustus 1956 sampai dengan digantinya nama Yayasan dengan Yayasan Attaqwa pada 17 Desember 1986. Setelah terbentuknya anggota Panitia Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam (YP3) merasa perlu dilakukan peningkatan dan perluasan gerak dan kegiatan panitia, terutama dalam bidang dakwah, pendidikan dan penyuluhan terhadap umat. Maka mereka menganggap perlu meningkatkan panitia ini menjadi sebuah Yayasan yang resmi dan tercatat di pemerintahan. Pada hari Senin 6 Agustus 1956 dicatatkanlah secara resmi Yayasan ini kepada notaris Eliza Pondang dengan nama Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam dengan nomor register 11. Periode pengembangan ditandai dengan tahun 1986, setelah tiga puluh tahun, Yayasan P3 mengadakan regenerasi kepengurusan dan sekaligus mengadakan perubahan nama dan perbaikan Anggaran Dasar untuk menyesuaikannya dengan Undang-undang Keormasan nomor 8 tahun 1982. Perubahan tersebut dicatatkan pada notaris Soedirja, SH. pada tanggal 17 Desember 1986 dengan nomor register 16. Semenjak tanggal tersebut nama Yayasan berubah menjadi Yayasan Attaqwa.⁸⁸

Pada tahun 1956, K.H. Noer Alie mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam yang disebut dengan Yayasan P3. Inisiatif mendirikan yayasan tersebut adalah dilatar belakangi karena habisnya kampung beliau akibat dibakar habis oleh Belanda

⁸⁸ <http://ikpma-mesir.blogspot.com/2012/04/sejarah-singkat-yayasan-attaqwa.html> diakses pada hari Senin, 18-06-2012, pukul 01:20.

yang ketika itu meninggalkan banyak korban jiwa serta janda-janda dan para anak yatim yang tak berdosa. Oleh beliau kampung tersebut dibangun kembali. Setelah kampung tersebut dibangun kembali, banyak anak yatim dan para janda-janda yang dipelihara oleh Yayasan tersebut. Pada saat itu K.H. Noer Alie melakukan pembangunan fisik serta pembangunan ilmu dengan berusaha mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan melakukan usaha-usaha bidang sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan ummat terhadap masyarakat kampung yang pada saat itu bernama kampung Oejung Malang. Untuk mengkoordinasikan kegiatan inilah beliau membentuk sebuah panitia Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam yang disebut dengan Yayasan P3.⁸⁹

Pada tahun 1954, K.H. Noer Alie merintis Sekolah Dasar Islam (SDI) sambil beliau menyiapkan kader-kadernya dengan cara mengirimkan murid-muridnya pergi belajar keluar daerah seperti ke Bandung (Pesantren Sukamiskin), Yogyakarta (Pesantren Al-Munawwir) dan Ponorogo (Pondok Modern Gontor). Di antara murid-muridnya yang beliau kirim adalah Ustazah Sholehah Noer, BA yang tidak lain adalah putri beliau sendiri yang beliau kirim pergi belajar ke Yogyakarta (Pondok Pesantren Muallimat).⁹⁰

Pada tahun 1956, K.H. Noer Alie membangun sebuah masjid yang diberi nama dengan Masjid Jami At-taqwa. Lalu pada tahun 1962, K.H. Noer Alie kembali membangun Madrasah Menengah At-Taqwa (MMA) yang sempat terhenti akibat beliau berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air yang didirikan, lama masa pendidikan selama enam tahun. Hal itu terjadi karena pada saat itu masyarakat Oejung Malang belum bisa sepenuhnya menerima keberadaan Madrasah yang dirasakan masih terbilang baru untuk kondisi saat itu.⁹¹

Pada tahun 1965, K.H. Noer Alie mendirikan Madrasah Al-Baqiyatussalihat yang sekarang namanya dirubah menjadi Pondok Pesantren

⁸⁹http://attaqwaputri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60. diakses hari Senin, 11/06/2012, pukul: 2:12.

⁹⁰http://attaqwaputri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60. diakses hari Senin, 11/06/2012, pukul: 2:12.

⁹¹<http://attaqwaputra.sch.id/tentang-kami/profile-pondok-pesantren-attaqwa-pusat/12-tentang-kami/32-sejarah-berdirinya-pondok-pesantren-attaqwa.html>. diakses hari Senin, 11/06/2012, pukul: 2:00.

Attaqwa Puteri. Ketika itu kader-kader yang beliau kirim untuk belajar di luar daerah telah kembali pulang untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat selama mereka belajar di luar daerah. Orang yang pertama kali diangkat untuk menjadi kepala Sekolah untuk Madrasah Al-Baqiyatussalihat ini adalah Al-Ustadz Drs. Ma'ali Syamsuddin.⁹² Orang yang pertama kali diangkat untuk menjadi kepala Sekolah untuk Madrasah Al-Baqiyatussalihat ini adalah Al-Ustadz Drs. Ma'ali Syamsuddin. Baik Pondok Pesantren Attaqwa Putra dan Putri mulai menggunakan sistem klasikal pada madrasahnyanya.⁹³

Keistimewaan pesantren Attaqwa dibanding pesantren Annida Al-Islamy dan perguruan Islam el-Nur el-Kasysysaf adalah pesantren Attaqwa memiliki hampir semua madrasah yang ada di Bekasi, dan pesantren Attaqwa menerapkan sistem pendidikan tradisional yang tidak berpegang pada mazhab satu tertentu, lalu keistimewaan dari KH Noer Alie sendiri yang terkenal sebagai Ulama pejuang di Bekasi hingga diangkat sebagai pahlawan Nasional pada tahun 2006. Keistimewaan itu terlihat dari adanya materi pelajaran Sejarah Perjuangan KH Noer Alie dan dijadikannya nama KH Noer Alie sebagai nama jalan utama di Bekasi. Sumbangsihnya dari pesantren Attaqwa adalah pesantren Attaqwa telah membuka daerah Ujung Malang yang awalnya daerah tertinggal, daerah terpinggirkan, daerah yang sulit dalam akses jalannya dan tak berpendidikan agama menjadi daerah dengan akses jalannya yang mudah, dan menjadi daerah Ujung Harapan yang sesuai dengan cita-cita pendiri pesantren Attaqwa yaitu perkampungan Syurga.⁹⁴

3.1.2. Potret Pondok Pesantren Annida Al-Islamy

Pesantren Annida al-Islami beralamat di Jalan Ir.H. Juanda No.124 A RT 02 RW 07 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur. Secara geografis, Kelurahan Margahayu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi di sebelah

⁹²http://attaqwaputri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=60. diakses hari Senin, 11/06/2012, pukul: 2:13.

⁹³ <http://gepista915.blogspot.com/2011/04/gambaran-umum-mts.html>. diambil Pukul 4:41 WIB 21/12/2011.

⁹⁴ <https://sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaraji/aku-rindu-kh-noer-alie>.diakses 18:06:2012 pukul 01:11.

Timur, Kelurahan Duren Jaya di sebelah Utara, Kelurahan Marga Jaya di sebelah Barat, dan Kelurahan Pengasinan di sebelah Selatan. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Pesantren Annida Al-Islamy didirikan dan di pimpin oleh Syekh KH Muhadjirin Amsar Addary, yaitu seorang ulama kharismatik yang terkenal dengan tingginya keilmuan agamanya dan keahliannya di bidang ilmu *falak*.⁹⁵

Pesantren Annida Al-Islamy yang berdiri sejak tahun 1963. Nama Annida Al-Islamy terilhami dari doa KH Muhadjirin yang diambil dari Surat Ali imran 193-194 yang berbunyi, “*Rabbana Innana Sami’na Munadian Yunadi lil Iman*”, artinya adalah “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kami kepada iman”. Sesuai dengan nama “Annida” yang dapat diartikan “seruan / panggilan”. Adapun arah pendidikan di Pesantren Annida Al-Islamy banyak mengadopsi “fan” / mata pelajaran di Mekkah dan Madinah saat KH.Muhammad Muhadjirin belajar. Kekayaan khazanah pemahaman Islam dari berbagai mazhab melahirkan sikap toleransi diantara berbagai macam faham keislaman. Arah pendidikan itulah yang hendak dicapai oleh KH.Muhammad Muhadjirin melalui kurikulum yang dirancangnya.⁹⁶

Di dalam pendirian pesantren ini turut dipengaruhi oleh keluarnya KH Muhadjirin dari jabatannya menjadi kepala sekolah di Pesantren Bahagia⁹⁷ yang

⁹⁵ Ilmu *falak*, berdasarkan bahasa, *falak*, (Ar) cakrawala, lengkung kaki langit; ilmu falak, ilmu tt bintang-bintang di langit (tt peredarannya, perhitungannya); ilmu perbintangan. Falakiah, (Ar) astrologi. Lihat Badudu, J.S., *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Maret 2003, hlm. 104.

⁹⁶ Wawancara dengan KH Muhadjirin Aiz, lihat lampiran 7.

⁹⁷ Pesantren Bahagia merupakan sebuah pesantren *salaf*, ini terlihat dari jabatan kepala sekolah yang dijabat oleh KH Muhadjirin, menurut cerita masyarakat Bekasi menduga dan mempercayai bahwa Pesantren Bahagia adalah Pesantren Attaqwa hal ini diperkuat dengan berdirinya Madrasah Attaqwa sebagai pergantian sistem Pesantren Bahagia yang berdasarkan cerita yang berkembang di Attaqwa, KH Abdurrahman mendapat perintah dari KH Noer Ali untuk mendirikan Pesantren Bahagia. Namun, tidak jelas kapan tanggal dan tahun pasti berdirinya Pesantren Bahagia, diperkirakan pada 1949. KH Muhadjirin yang merupakan menantu KH Abdurrahman bin Mu'allim Shodri dan pengajar di Pesantren Bahagia terjadi ketidaksesuaian dengan KH Noer Ali, yang berakibat KH Muhadjirin mendirikan pesantren Annida dan KH Noer Ali melanjutkan dan merubahnya menjadi pesantren Attaqwa. Hal ini berdasarkan wawancara dengan KH Muhadjirin Aiz, SH. MH. (Putra KH Muhadjirin dan pengasuh Pesantren Annida Al-Islamy).

merupakan pesantren pertama di daerah Bekasi. Pendiri Pesantren Bahagia adalah mertua KH Muhadjirin yaitu KH. Abdurrahman Sodri. Ketika wafatnya mertua KH Muhadjirin tersebut, mulai terjadi ketidaksesuaian dengan pengurus lainnya yang berlangsung cukup lama sehingga memutuskan untuk melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri dari kepengurusan Pesantren Bahagia.⁹⁸

Di pondok pesantren pertama di Bekasi yaitu Pesantren Islam Bahagia, yang berada di daerah Bulan-Bulan, dekat alun-alun di jantung kota Bekasi,⁹⁹ ketiga ulama itu bahu-membahu menegakkan ajaran Islam di Bekasi dan sekitarnya. Pada tahun 1963 tak jauh dari tempat pondok pesantren Bahagia, Syaikh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary mendirikan pondok pesantren Annida Al-Islamy.

Syaikh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary yang terkenal dimasyarakat Bekasi sebagai ulama yang ahli dalam bidang falak, lahir pada tanggal 10 November 1924, di Kampung Baru, Cakung, sebuah daerah di pinggiran kota Jakarta. Ayahnya seorang pedagang, H. Amsar, sedangkan ibunya Hj. Zuhriah. Syaikh Muhajirin kecil mendapat pendidikan agama dari kedua orang tuanya dan kerabatnya. Beliau belajar membaca Al-Quran, selesai menghatamkannya, orang tuanya mengadakan tasyakuran. Dan beberapa waktu kemudian mereka mengirimkannya kepada beberapa mu'allim (guru) agar dapat mempelajari dasar-dasar ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya.¹⁰⁰ Semasa hidupnya beliau hanya mengabdikan waktunya dengan mengajar santri-santrinya di pondok pesantren Syaikh Muhajirin juga dikenal sebagai ulama yang alim dan ahli dalam berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu falak. Ulama yang satu ini produktif menulis. Ia telah mengarang lebih dari 38 kitab, semuanya berbahasa Arab. Yang paling terkenal, yang berjudul *Mishbah az-Zhulam*, delapan jilid, merupakan syarah

⁹⁸ Tubagus Zainuddin. *Peran Syekh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary dalam Pengembangan Kajian Hadis Melalui Karya-Karyanya*. Makalah Jurusan Tafsir-Hadits Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008. Hlm. 19 diperkuat dengan wawancara kepada KH Muhadjirin Aiz.

⁹⁹ Wawancara dengan KH Muhadjirin Aiz, lihat lampiran 7. Hal ini diperkuat dengan cerita-cerita dari mulut ke mulut di pesantren Attaqwa, walau cerita tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁰⁰ www.almarhlmah.ac.id diakses pada hari Sabtu, 2 Juni 2012 pukul 15.30.

(ringkasan) kitab *Bulugul Maram* yang juga diajarkan di Pesantren Annida.¹⁰¹ Menurut salah seorang santrinya¹⁰² beliau adalah ulama yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa bulan (baca:hilal) dalam ilmu falak dapat dilihat dengan ukuran 2 derajat dengan langsung menggunakan mata kepala dan bantuan alat tradisional. Dalam hal ini tidak sembarangan orang dapat melihat hilal pada derajat tertentu, semua itu memerlukan tahapan-tahapan dalam waktu yang tidak sebentar, ilmu ini pun diajarkan di Annida Al-Islamy dan merupakan mata pelajaran wajib pesantren.

KH Muhadjirin yang telah lebih dahulu mendirikan madrasah sebelum membangun pondok pesantren telah mengenal sistem kelas, sehingga ketika Pondok Pesantren Annida Al-Islamy selesai pembangunannya, KH Muhadjirin memakai sistem pendidikan pesantren tradisional kepada pondok pesantren Annida Al-Islamy dan memakai sistem pendidikan madrasah pada madrasah Annida Al-Islamy yang mana tidak terintegrasi. Artinya, KH Muhadjirin memakai sistem kelas di madrasah dan memakai sistem *halaqah* di pondok pesantren.¹⁰³ Madrasah ini pun sedikit berbeda dengan madrasah lainnya, sebab KH Muhadjirin yang telah mengenal sistem pendidikan Darul Ulum Addiniyah Mekkah yang turut di masukkan kedalam madrasahnyanya.¹⁰⁴ Madrasah Tsanawiyah ini merupakan satu-satunya MTs di Bekasi yang secara khusus memasukkan mata pelajaran kitab kuning ke dalam kurikulum pendidikannya, yang juga menjadi ciri khas dari pesantren Annida Al-Islamy itu sendiri.

Pesantren yang sejak tahun 1990-an masih dipimpin pendirinya yaitu KH Muhadjirin Amsar Addary ini mulai merintis pendidikan yang tradisional berupa madrasah dengan fan dari Mekkah dan Madinah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada tuntutan masyarakat dan menyesuaikan prinsip-prinsip pendidikan modern. Dengan berubahnya orientasi pendidikan di pesantren ini, maka sistem pengajaran mengenalkan materi pelajarannya

¹⁰¹ Mengenai daftar kitab yang ditulis KH Muhadjirin lihat lampiran 17.

¹⁰² Wawancara dengan H. Abdul Rohman Al-Marzuqy (24 tahun, eks santri KH Muhadjirin) lihat lampiran 9.

¹⁰³ Wawancara dengan KH Aiz Muhadjirin, (Putra KH Muhadjirin dan penerus Pengasuh Pesantren Annida Al-Islamy) lihat lampiran 7. Hal ini diamini oleh Abdul Rahman dan Mahfudz Sjafii.

¹⁰⁴ Wawancara dengan KH Aiz Muhadjirin lihat lampiran 7.

memasukkan pelajaran umum, contohnya materi pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan sastra Indonesia, dan bahasa Inggris, serta Matematika. Mulai nampak perpaduan antara sistem pengajaran tradisional yang mengkaji kitab kuning, serta tidak asing bagi santri mempelajari ilmu-ilmu umum tersebut dalam pesantren ini. Pada bab selanjutnya akan menjelaskan perkembangan ini lebih mendalam sebagai langkah pesantren merespon kebijakan Orde Baru dan tuntutan zaman.

Perkembangan pesantren sejak berdirinya sampai sekarang mengalami perkembangan yang cukup menarik, yaitu pada awal pembentukannya Pesantren Annida Al-Islamy, belum tersedia tempat untuk belajar. Untuk sementara perguruan menggunakan lokal milik Bpk. R. H. Ahmad Rus di Jalan Alun-Alun Barat (sekarang Jalan Veteran) Bekasi. Pembukaannya dimulai pada hari Rabu tanggal 03 April 1963 dengan susunan kepengurusan : Ketua I. K.H. Abdul Hamid, Ketua II. K.H. M. Muhadjirin, Sekretaris R.H. Ahmad Rus dan Bendahara M. Ibrahim.¹⁰⁵ Kemudian pada tanggal 6 Agustus tahun 1963, Kiai Muhadjirin membeli sebidang tanah di Kampung Mede sebagai awal dimulainya pembangunan Annida Al-Islamy. Selanjutnya pada tahun 1984 didirikanlah Asrama diatas tanah wakaf Nyak Manduh sebagai dampak dari bertambah banyaknya santri yang belajar.

Pada masa itu Pesantren memilih mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional. Hanya saja dalam sistem pembelajarannya turut mengadopsi sistem pendidikan madrasah, di samping sistem sorogan dan bandongan yang tetap berjalan. Kurikulum pendidikan yang dirancang oleh KH. Muhammad Muhadjirin banyak dipengaruhi oleh kurikulum Mekkah dan Madinah. Namun demikian tujuan dari kurikulum tersebut tidak diarahkan untuk “hanya” membenarkan salah satu pandangan atau mazhab saja, melainkan untuk memunculkan sikap toleransi terhadap pelbagai pandangan/mazhab tersebut. Sistem Pendidikan Madrasah di sini bukan berarti Pondok Pesantren Annida Al-Islamy membuka pendidikan madrasah formal yang mengikuti 100% ketentuan

¹⁰⁵ Tubagus Zainuddin. *Peran Syekh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary dalam Pengembangan Kajian Hadis Melalui Karya-Karyanya*. Makalah Jurusan Tafsir-Hadits Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008. Hlm. 19

Departemen agama, akan tetapi pembelajaran kitab-kitab kuning diselenggarakan dengan model berjenjang, kelas-kelas tertentu, dan dengan kurikulum yang telah ditentukan pula dan turut dilaksanakan di Madrasah Annida Al-Islamy.¹⁰⁶ Lalu pada masa selanjutnya hingga kini pesantren mengalami banyak perkembangan, yang perkembangan ini akan dibahas di bab selanjutnya.

Hal yang menjadi keistimewaan dan sumbangsih dari Pesantren Annida Al-Islamy adalah adanya pelajaran tentang ilmu falak yang diajarkan oleh pendirinya, KH. Muhammad Muhadjirin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ilmu falak adalah pelajaran wajib di Pesantren ini, dan tidak sembarang orang bisa menguasainya. Sang pendiri dari Pesantren ini juga merupakan figur yang menarik, karena produktifitasnya dalam menulis buku, khususnya kitab tentang pengajaran agama Islam, yang total berjumlah 38 kitab.

3.1.3. Potret Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf

Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (YAPINK) berdiri kokoh di tepi Jln. Sultan Hasanuddin No. 203 Tambun Selatan. Secara administratif, Kecamatan Tambun Selatan yang memiliki luas sebesar 3.506 Ha, masuk kedalam Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cibitung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Setu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bekasi ini terkenal di masyarakat Bekasi sebagai pesantren yang bercirikan tujuan dan arah pendidikannya kepada Ahlussunah Wal Jama'ah dengan mencetak lulusannya sebagai ahli berbahasa Arab dan berjiwa Ahlussunnah Wal Jama'ah.¹⁰⁷

YAPINK telah menyediakan fasilitas masjid di dalam areal putra dan musholla di dalam areal putri. Masjid "Al-Kasysyaf" telah dibangun sejak awal pendirian YAPINK, sementara musholla khusus putri dibangun sekitar era tahun 70-an. Keduanya telah mengalami beberapa kali renovasi. Khusus untuk masjid "Al-Kasysyaf" telah dilakukan pelebaran areal dengan pembangunan "Majelis al-'Ilm" di belakangnya, untuk menopang kebutuhan kapasitas jama'ah yang semakin

¹⁰⁶ Wawancara dengan KH Aiz, lihat lampiran 7.

¹⁰⁷ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

banyak. Sehari-hari "Majelis al-'Ilm" digunakan untuk areal khusus sholat bagi tamu wanita, dan di luar waktu sholat digunakan untuk areal pelatihan seni-seni keislaman.¹⁰⁸

Dalam *Profil Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (YAPINK)* secara harfiah "*el-Nur el-Kasysyaf*" artinya cahaya penerobos, yang berdiri kokoh di tepi Jln. Sultan Hasanuddin Tambun Selatan Bekasi, Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua yang ada di daerah Bekasi. Pesantren ini resmi dibuka dan mulai menjalankan operasional pendidikan pertama kali pada tanggal 20 Februari 1969, dengan dukungan dari beberapa sesepuh desa Tambun dan dikomandoi oleh Alm. KH. Drs. Moh. Dawam Anwar. Melihat proses awalnya, YAPINK didirikan karena rasa prihatin terhadap kondisi masyarakat desa Tambun yang saat itu masih sulit mengenyam pendidikan--khususnya pendidikan agama--, di samping ada isu-isu akan didirikannya tempat ibadah non-Muslim di kawasan Tambun yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kekhawatiran akan bergesernya akidah masyarakat dan keinginan untuk membentengi generasi-generasi penerus menjadi salah satu motivasi utama untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan agama yang seirama dengan keyakinan dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat. Oleh sebab itu, digelarlah pertemuan khusus oleh beberapa sesepuh desa Tambun, diprakarsai oleh Alm. H. Abdillah Mas'ud (mertua Alm. KH. Drs. Moh. Dawam Anwar), dan dihadiri oleh Alm. H. Ahmad Sadeli, Alm. H. Marzuki Alam, Alm. H. Abd. 'Ain, Ust. Bukhori, BA, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan sebuah madrasah yang nanti akan dipimpin oleh seorang *mu'allim* (guru) yang akan direkrut dari daerah Jawa Timur.¹⁰⁹

Menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut, akhirnya berangkatlah Alm. H. Abdillah Mas'ud dan Alm. H. Ahmad Sadeli ke pesantren Tebuireng Jombang, menemui sang Kiai, untuk meminta arahan selanjutnya. Kiai merespon positif niat dari masyarakat desa Tambun, lalu merekomendasikan untuk bertemu dengan "Mohammad Dawam Anwar" seorang alumni Tebuireng yang dipandang layak

¹⁰⁸ <http://yapink.net/fasilitas/asrama> diakses pada hari Kamis, 21 Juni 2012, pukul 11:30.

¹⁰⁹ <http://yapink.net/tentang-kami/profil> di akses hari Senin, 11 Juni 2012 pukul 2:31.

untuk mengemban amanat masyarakat Tambun, dan pernah menjadi guru agama dan bahasa Arab di Pesantren Tebuireng dan Pesantren Seblak Jombang, yang saat itu sedang menyelesaikan studinya di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹⁰

Melalui beberapa pertemuan yang dilakukan, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah dengan KH. Drs. Moh. Dawam Anwar sebagai pimpinannya. Beliau namakan madrasah tersebut sebagai Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (PINK) yang selanjutnya didaftarkan kepada pemerintah atas nama Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (YAPINK). Beriringan dengan adanya madrasah tersebut, KH Dawam Anwar turut mendirikan pesantren Salafiyah dengan sistem pendidikan pesantrennya mencontoh sistem pendidikan pesantren Tebuireng Jombang, lalu pada perkembangan selanjutnya pesantren Salafiyah ini dinamakan dengan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf oleh KH Dawam Anwar.¹¹¹

Pada hari pertama kepemimpinan KH Dawam Anwar mempunyai sebanyak 40 murid putra dan putri yang umumnya sudah putus sekolah. Namun setelah kepemimpinan beliau selama tiga tahun, hanya 25 siswa yang lulus. Untuk menampung lulusan MTs, KH Dawam Anwar membuka MA, namun ternyata hanya empat siswa saja yang melanjutkan di PINK. Murid KH Dawam Anwar di MTs PINK ada yang meneruskan ke pesantren lain dan ada yang bekerja. Meskipun siswanya hanya tinggal empat orang yang masuk ke kelas 1 Aliyah, bahkan hingga dalam tiga tahun pelajaran hanya itu siswanya, namun para guru tetap mengajar seperti biasa hingga empat siswa itu lulus.¹¹²

Dua murid KH Dawam Anwar dari lulusan Aliyah PINK meneruskan belajar di Fakultas Adab IAIN Jakarta, satu orang meneruskan studi di IKIP Rawamangun Jurusan Bahasa Arab dan satu lagi bekerja. Dua di antara empat murid KH Dawam Anwar yang kini mengabdikan diri di perguruan tinggi yang dibentuk oleh PINK yakni Institut Agama Islam Sholahuddin Al-Ayyubi (INISA)

¹¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

¹¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

¹¹² <http://yapink.net/tentang-kami/tokoh-pendiri/kiai-dawam> diakses Senin, 11 Juni 2012 pukul 6:53.

adalah Drs. H. Abd. Rosyid Thoha, M.Mpd, lulusan Fakultas Adab IAIN Syahid Jakarta dan sekarang menjabat Dekan Fakultas Adab INISA, dan Drs. Moh. Fauzi Yunus, M.Mpd, lulusan IKIP Rawamangun Jakarta jurusan Bahasa Arab dan sekarang menjabat Dekan Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab INISA.¹¹³

Pesantren ini sendiri termasuk pesantren besar menurut Dhofier. Pada awalnya, jumlah santrinya tidak terlalu banyak, dimana pada tahun 1969 sampai 1972 total hanya ada 40 santri dan pada tahun 1972 sampai 1975 total hanya ada 20 santri. Peningkatan baru ada pada tahun 1975 sampai 1978, dimana rata-rata per tahun ada 30 santri. Lalu pada tahun 1980an sampai 1990 meningkat menjadi 100 santri per tahun, dan setelah tahun 1990 sampai 1998 meningkat menjadi ratusan santri per tahunnya.¹¹⁴

Pesantren yang sejak awal memadukan pondok dengan madrasah dalam satu kompleks PINK dengan sistem pendidikan pesantren tradisional yang mencontoh dari pesantren Tebuireng, mengalami perkembangan yang cukup menarik dengan diakuinya sistem pendidikan YAPINK kedalam sistem pendidikan Al-Azhar, Mesir pada tahun 1990-an. Hal ini menjadi cara KH Drs Moh. Dawam Anwar yang lahir di Jombang, 12 Agustus 1938 dan memperistri Hj. Dedeh Nurhaidah, (Pemilik Koperasi Pondok Pesantren YAPINK) untuk merespon kebijakan Orde Baru yang pada bab selanjutnya akan dijelaskan.

KH Dawam Anwar yang mempunyai karir pendidikan sebagai berikut:

- Madrasah Tsanawiyah Tebuireng, 1955-1957;
- Madrasah Aliyah Tebuireng, 1958;
- Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum, Jombang, 1967-1968;
- Jurusan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, 1968-1975.

KH. Drs. Moh. Dawam Anwar mengawali karir politiknya sejak 1960-1964 sebagai anggota GP (Gerakan Pemuda, red) Ansor Montong, Tuban, kemudian 1964-1968 sebagai penasehat IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, red) Jombang Selatan dan anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, red) Jombang, merangkap sebagai anggota Musyawarah Ulama NU

¹¹³ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

¹¹⁴ Berdasarkan wawancara dengan KH. Sahid, lihat lampiran 12.

(Nahdlatul Ulama, red) Tebu Ireng. Pada 1970-1972 pindah ke Ciputat dan menjabat sebagai anggota PMII dan Penerangan GP Ansor Ciputat.

Kemudian pada 1977-1987 terpilih menjadi anggota DPRD Dati II Bekasi dari PPP dan Syuriah NU Kabupaten Bekasi. Pada 1994-98 menjabat Katib PBNU. Lalu menjabat Sekretaris Dewan Syuro DPP-PKB sejak 1998 hingga akhir hayatnya. Almarhum juga berprofesi sebagai pengajar di beberapa pondok pesantren antara lain di Tuban, Tebu Ireng, Seblak, dan Al Falah-Jakarta, dan menjadi pengasuh Yapink Tambun serta sejak 1984-2003 di Inisa Tambun, Bekasi yang masih didalam YAPINK.¹¹⁵

YAPINK selama kepemimpinan KH Dawam Anwar, berafiliasi pada Nahdlatul Ulama dan menitikberatkan pendidikannya pada pendalaman materi Ahlussunnah Wal Jama'ah. Karena Aswaja adalah wasiat Rasul, dan alm. KH Dawam Anwar adalah ulama yang Insya Allah memahami Islam yang baik dan benar. Terkait aktifitas IPNU, IPPNU, GP Anshor, PMII, PBNU, PPP dan PKB, itu semua merupakan "kendaraan" dakwah *Li'ilaikalimatillah* yang sama-sama berlabel Aswaja. Saya tidak bermaksud berlebihan dengan apa yang saya sampaikan, namun semua berdasar pada data dan fakta yang saya temukan dan telah dipahami oleh setiap orang yang mengenal almarhum almaghfurlah.¹¹⁶

Sejak awal, PINK diformulasikan dan diproyeksikan untuk menjadi lembaga pendidikan yang tetap konsisten mempertahankan ruh dari Qonun NU yaitu ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan mempelajari kitab-kitab kuning yang mengajarkan mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah. Tatkala sekolah-sekolah (madrasah negeri) di sekitarnya berubah haluan dengan meninggalkan kitab kuning, KH Dawam Anwar tetap teguh mempertahankannya dan tetap menerapkan pola pendidikan pesantren tradisional.

Pada tahun 1969, KH Dawam Anwar ditawarkan oleh H. Abdillah dan pendiri PINK lainnya untuk menggunakan sistem pendidikan pesantren yang seperti apa yang ingin digunakan di PINK, KH Dawam Anwar memilih untuk

¹¹⁵ <http://yapink.net/tentang-kami/tokoh-pendiri/kiai-dawam>, diakses Senin, 11 Juni 2012 pukul 6:55.

¹¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Haris (eks santri YAPINK dan guru di MTs YAPINK), lihat lampiran 10.

menggunakan sistem pendidikan pesantren tradisional di pesantren Tebuireng tahun 1950-an. Dikarenakan KH Dawam Anwar merupakan lulusan pesantren Tebuireng dan sangat mengenal serta memahami sistem pendidikannya¹¹⁷ hal inilah yang mendasarkan KH Dawam Anwar sangat ingin mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional dan mengikuti perkembangan pesantren Tebuireng sebagai inspirasi KH Dawam dalam mengembangkan sistem pendidikan pesantren PINK.

Pada tahun 1973, berdiri jenjang pendidikan madrasah Aliyyah sebagai lanjutan jenjang pendidikan Tsanawiyah. Lalu hal itu ditindaklanjuti dengan mendirikan YAPINK. Dengan berdirinya yayasan ini mempermudah KH Dawam Anwar dalam mengembangkan pesantrennya, ini terlihat dengan didapatkannya dana untuk pembangunan asrama di pesantrennya. Asrama sendiri selesai dibangun pada tahun 1978. Pada tahun 1980-an KH Dawam Anwar memasukkan sistem pendidikan Al-Azhar tanpa merubah sistem yang ada sebelumnya.¹¹⁸

Keistimewaannya dari PINK adalah kemampuan dari KH Dawam Anwar di bidang Bahasa Arab di mana terbukti dengan banyaknya lulusan PINK menjadi guru-guru Bahasa Arab, khususnya disekitar Bekasi. Kemampuan ini juga turut membantu beberapa lulusannya yang ingin meneruskan jenjang pendidikan di Al-Azhar Mesir, karena telah diakuinya sistem pendidikan PINK di Al-Azhar Mesir. Pesantren ini juga mengutamakan kitab-kitab kuning yang beraliran Ahlussunnah Wal Jamaah dengan meninggalkan kitab-kitab kuning diluar tersebut.¹¹⁹

Kontribusi dari YAPINK adalah menjadi pelopor pesantren yang mengadakan ujian negeri pertama kali dibanding pesantren Annida Al-Islamy dan pesantren Attaqwa. YAPINK juga menjadi pelopor pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam yaitu INISA sebagai lanjutan jenjang pendidikan Aliyyah di PINK. Lalu menjadi penghasil guru-guru Bahasa Arab di Bekasi, disebabkan keistimewaannya yang menitik beratkan Bahasa Arab di INISA selepas dari MA.

¹¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

¹¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Haris, lihat lampiran 10.

¹¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid, lihat lampiran 14.

BAB 4

DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBERTAHANAN PESANTREN PADA MASA ORDE BARU

Pada bab sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana sistem pendidikan pesantren berkembang dari sistem pendidikan pesantren tradisional yang muncul di masa pra-Islam hingga sistem pendidikan pesantren modern sebelum masa orde baru, apa saja sistem pendidikan pesantren yang berkembang, dan bagaimana sistem pendidikan pesantren tradisional dapat berkembang dengan mengikuti arah perubahan zaman. Pada bab ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah sistem pendidikan pesantren di Bekasi pada masa Orde Baru, dan keberlanjutan sistem pendidikan pesantren tradisional dimasa pembangunan yang digalakkan oleh rezim Orde Baru. Sebelumnya, akan dijelaskan dahulu modernisasi sistem pendidikan pesantren pada masa Orde Baru

4.1. Kebijakan Orde Baru Terhadap Pesantren

Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru.¹¹⁹ Pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden dalam Sidang MPRS bulan Maret 1968 menandai surutnya dua kekuatan politik utama dalam Demokrasi Terpimpin dari panggung politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI, dengan meninggalkan ABRI seorang diri. Partai politik sendiri masih belum dapat berkembang setelah “dilumpuhkan” rezim Orde Lama. Dalam keadaan demikian, Orde Baru dalam hal ini ABRI memiliki *surplus of power* untuk berbuat apa saja. Namun demikian, mereka tidak tergoda untuk membentuk pemerintahan junta

¹¹⁹ Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1984), hlm. 406. Penafsiran terhadap Supersemar sendiri berbeda-beda. Apakah Supersemar hanya merupakan instruksi kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tugas memulihkan keamanan, stabilitas negara, dan menjaga kewibawaan Soekarno; atautkah ia merupakan pelimpahan wewenang dari Soekarno kepada Soeharto? Ironisnya, naskah asli Supersemar sampai kini belum ditemukan sehingga sering menimbulkan pergunjingan.

militer.¹²⁰ ABRI lalu ”mengajak” kaum teknokrat menata perekonomian nasional. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru diharuskan menciptakan sebuah format politik baru yang berlainan dengan format politik masa sebelumnya.¹²¹ Jika pada masa pasca-kemerdekaan, diberlakukan sistem politik demokrasi parlementer/liberal, lalu lewat Dekrit 5 Juli 1959, Bung Karno menggantinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Setelah dua sistem politik ini berakhir dan berganti dengan sistem demokrasi Pancasila. Format politik baru ini dikenal dengan sebutan Orde Baru, format itu berlangsung hingga akhir Orde Baru yaitu dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Persoalan utama yang menghadang rezim Orde baru adalah warisan krisis dari rezim sebelumnya. Ada dua macam krisis. Di bidang ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi. Pada tahun 1966 bahkan laju inflasi mencapai 650%. Sementara itu, dibidang politik, terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antarkelompok-kelompok politik dalam masyarakat.¹²²

Untuk mengatasi dua krisis ini, pemerintah mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar.¹²³ Dalam bidang politik, diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi.¹²⁴

Dalam rezim Orde Baru, yang dimulai dengan penumpasan pemberontakan 30 September 1965, Presiden Soeharto menguasai semua dimensi kehidupan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan militer dan birokrasi pemerintah di semua tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional). Soeharto mengeluarkan kebijakan ”liberal” (pasar bebas) yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun membatasi peran masyarakat

¹²⁰ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 4-5. Seperti dikutip Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 185.

¹²¹ Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 185-186.

¹²² *Ibid.*, hlm. 185-186

¹²³ Mengenai pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar harap periksa Mochtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 95. Seperti dikutip Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 186.

¹²⁴ Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 186.

sipil. Untuk bidang pendidikan rezim ini mendorong terjadinya modernisasi sistem pendidikan agar dapat selaras berjalan dengan format pembangunan.

Pemerintah menganggap proses belajar mengajar di pondok pesantren tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan karena sistem pendidikan pondok pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan menggunakan manajemen yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, hal itu sebagai akibat pemerintah menganut sistem pendidikan Barat yang dinilai lebih modern dan mempunyai sistem yang standar. Tampaknya pemerintah menerapkan standar ganda. Satu sisi pesantren dianggap pemerintah sebagai lembaga yang harus dibina dan dikembangkan karena mempunyai peran yang cukup strategis untuk ikut memobilisasi masyarakat guna mendukung stabilnya pembangunan ekonomi, namun di sisi lain keberadaan pondok pesantren ditempatkan jauh dari sistem pendidikan nasional. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan pondok pesantren dianggap tidak mempunyai standar baku.¹²⁵

Untuk menyeragamkan pesantren sesuai dengan Orde Baru, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Dan kebijakan-kebijakan itu adalah SKB Tiga Menteri tahun 1975, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Melalui SKB ini, madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Lalu mengenai batasan dan penjenjangan madrasah. Yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Adapun penjenjangan madrasah meliputi:

- a. Madrasah Ibtidaiyah
- b. Madrasah Tsanawiyah
- c. Madrasah Aliyah.

¹²⁵ Ali Riyadi, Ahmad, *Pesantren dalam Bingkai Politik Birokrasi dan Pendidikan Islam di Indonesia*, jurnal AT TARBAWI, Vol. 7 No. 1 : Mei 2008 – Oktober 2008, hlm. 95.

Untuk merealisasikan SKB tersebut, Departemen Agama melalui penertiban, penyeragaman, dan penyamaan penjenjangan pada madrasah-madrasah dengan langkah-langkah:

- a. Menciutkan jumlah PGAN dan mengubah status sebagian besar PGAN tersebut menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah
- b. Mengubah status Sekolah Persiapan IAIN, menjadi Madrasah Aliyah Negeri.
- c. PGA-PGA yang diselenggarakan oleh pihak swasta, juga harus dirubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA)

Selain mengadakan penataan terhadap penjenjangan madrasah, Departemen Agama mengeluarkan kurikulum baru pada 1976 yang menjadi kurikulum standar. Kurikulum tersebut dilengkapi dengan pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum, serta pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum, serta dilengkapi dengan penjelasan berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi agama maupun bidang studi pengetahuan umum.¹²⁶

Kemudian pada tahun 1984 keluar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No. 9299/U/1984 dan No. 45 tahun 1984, tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Surat Keputusan Bersama tahun 1984 ini merupakan tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri tahun 1975.¹²⁷

Untuk menegaskan dari SKB Tiga Menteri tersebut diatas, maka Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan PP No. 73 tahun 1991, penegasan ini untuk menetapkan posisi sistem pendidikan pesantren tradisional didalam Sistem Pendidikan Nasional yaitu sistem pendidikan

¹²⁶ Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 198-200.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 198-200.

pesantren tradisional berada pada posisi diluar sekolah umum yang diakui pemerintah Orde Baru.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diperjelas bahwa pada sekitar pertengahan dekade tahun 1970-an, perhatian pemerintah mulai ditujukan pada pembinaan madrasah secara lebih sistematis, misalnya, dengan lahirnya kurikulum 1973 dan SKB 3 Menteri Tahun 1975 yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah sejajar dengan sekolah umum Negeri. Selanjutnya pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam UU tersebut, pendidikan madrasah diakui sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam; madrasah mendapatkan pengakuan sebagai subsistem pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Masuknya madrasah ke dalam subsistem pendidikan nasional memiliki berbagai konsekuensi, antara lain: (1) dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah-sekolah pemerintah; (2) madrasah mengikuti kurikulum nasional; (3) madrasah ikut serta dalam Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), dan berbagai peraturan yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K). Dengan demikian, keuntungan positif yang diperoleh melalui UU tahun 1989 dan PP tahun 1990 ternyata juga melahirkan berbagai kendala.¹²⁸

Dualisme antara Departemen Agama dan Departemen P dan K ini terus berlangsung. Hal yang sama juga terjadi dalam pembinaan pendidikan dasar. Kesemrawutan manajemen pendidikan dasar ini tentunya juga berdampak pada pembinaan sekolah-sekolah yang ada di bawah Departemen Agama. Dengan sendirinya, terjadi dualisme sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Departemen Agama. Integrasi dan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum baru terbatas pada aspek struktur dan muatan kurikulumnya saja.

4.2. Tanggapan Pesantren Terhadap Kebijakan Modernisasi Pendidikan Orde Baru.

¹²⁸ Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, LkiS, 2008, hlm. 206.

Pada saat negara mencoba menyeragamkan sistem pendidikan pesantren, maka pesantren merespon kebijakan Orde Baru sesuai dengan dinamikanya, dalam artian ada pesantren yang merespon secara *akomodatif* dan ada juga pesantren yang merespon secara *defensif*. Ada pesantren yang meresponnya dengan merevisi kurikulumnya dan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum dan membuka kelembagaan serta fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kependidikan umum. Pada sisi yang lain, ada pesantren yang tetap melakukan peran bertahan dengan mempertahankan substansi pendidikan tradisional.¹²⁹

4.2.1. Respon Pesantren Attaqwa

Pesantren Attaqwa menanggapi kebijakan pemerintah dengan terbuka. Hal ini dikarenakan KH Noer Alie yang merupakan pendiri pesantren memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan. Berdasarkan sejarahnya, pesantren Attaqwa sudah memulai kegiatannya sejak sebelum masa Orde Baru seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Respon KH. Noer Ali terhadap SKB Tiga Menteri pada Tahun 1975 adalah mengubah standar kurikulum yang ada di pesantren Attaqwa yang sebelumnya pembagian proporsionalnya 70% Agama dan 30% Umum menjadi sekurang-kurangnya 30% Agama dan 70% Umum. Walau begitu, kurikulum agama tersebut tidak ada pengurangan maupun penambahan, yang terjadi adalah duplikasi mata ajar dengan konten yang sedikit berbeda. Misalkan pada mata ajar fikih, terdapat konten fikih dari Departemen Agama dan konten fikih dari kitab kuning. Selain perubahan pada kurikulum, pesantren Attaqwa mengubah sistem penjenjangan yang ada di pesantren Attaqwa yang sebelumnya menggunakan sistem penjenjangan madrasah diniyah menjadi sistem penjenjangan yang serupa sistem penjenjangan sekolah umum. Adapun penjenjangan madrasah meliputi:

- a. Madrasah Raudlatul Atfhal, (dua tahun masa belajar),
- b. Madrasah Ibtidaiyah (enam tahun masa belajar),
- c. Madrasah Mutawassitah (tiga tahun masa belajar),

¹²⁹ Ali Riyadi, Ahmad, *Pesantren dalam Bingkai Politik Birokrasi dan Pendidikan Islam di Indonesia*, jurnal AT TARBAWI, Vol. 7 No. 1 : Mei 2008 – Oktober 2008, hlm. 95-96.

- d. Madrasah Tsanawiyah (tiga tahun masa belajar),
- e. Madrasah Ma'had Ally (tiga tahun masa belajar).

Selanjutnya pada tahun berikutnya sekitar tahun 1991 respon pesantren Attaqwa adalah mengeluarkan Ijazah yang sebelumnya Ijazah lokal yang tidak diakui pemerintah menjadi Ijazah yang diakui pemerintah dan disamakan statusnya Ijazahnya dengan Ijazah sekolah umum, sehingga lulusan madrasah Attaqwa dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum.

Kebijakan Orde Baru yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975 juga ikut mengubah tujuan dari pesantren Attaqwa. Bila awalnya pesantren Attaqwa ini bertujuan untuk mencetak ahli-ahli agama maka kebijakan ini membuat Attaqwa mencetak tenaga-tenaga siap kerja. Perubahan itu terlihat pada 1992 saat Attaqwa mulai mengadakan ujian nasional di pesantrennya sendiri dan mulai menggunakan ijazah negeri. Keberadaan ijazah negeri inilah yang membuat pesantren Attaqwa berubah menjadi pencetak tenaga-tenaga siap kerja.

SKB Tiga menteri 1975 ini juga ikut mengubah sistem kurikulum di pesantren Attaqwa khususnya dalam waktu pembelajaran kitab. Sebelumnya di pesantren Attaqwa menggunakan cara menyelesaikan kitab terlebih dahulu lalu berganti dengan kitab yang lain dan tidak terpengaruh naik kelas atau tidaknya di maderasah. Setelah SKB itu dikeluarkan maka sistemnya berubah dimana walau kitab belum selesai tapi kalau santri naik kelas di madrasah maka kitabnya juga ganti.¹³⁰

Menurut artikel dari A'wanuddin Ahmad Addaraji,¹³¹ KH. Noer Alie pernah mengkritik konsep "Pembangunan di Segala Bidang" yang dikatakannya sebagai konsep yang kontradiktif. Beliau melihat pemerintah tengah berusaha menjadikan manusia Indonesia dengan kepribadian ganda, yaitu kepribadian yang memiliki karakter yang saling bertentangan. Di satu sisi, Pemerintah Republik Indonesia berusaha mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang agamis dengan mengadakan lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), tapi di sisi lain

¹³⁰ Berdasarkan wawancara dengan Sahrul fauzi. Lihat lampiran 13.

¹³¹ sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaraji/aku-rindu-kh-noer-alie diakses pada hari Senin, 11/06/2012 pukul 10:32. Bersumber dari Ali Anwar, *Kemandirian Ulama Pejuang*, Yayasan Attaqwa: Bekasi, 2006.

juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan tradisi yang justru merusak agama, dengan dalih pembangunan budaya, seperti aliran kepercayaan dan kebathinan. Oleh karena itu, menurutnya pembangunan disegala bidang akan gagal.

Bagi KH. Noer Alie, pembangunan ekonomi harus dimulai dengan pembangunan karakter manusia dan karakter manusia hanya dapat dibangun berdasarkan agama. Nilai-nilai yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi adalah kerja keras, kejujuran, kedisiplinan dan keteraturan. Hanya mungkin tercipta apabila manusia menghayati Islam sebagai agama dengan sistem yang komprehensif, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, menurut beliau, “sistem pendidikan harus menciptakan manusia yang pintar (pandai) dan benar (baik)”. yaitu berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan dewan masjid, KH. Noer Alie pernah meminta pengurus melakukan pendataan jamaah masjid beserta musholla-musholla. Daftar jamaah dari berbagai musholla itu diperintahkannya untuk diberi kode hijau atau merah. Kode hijau itu berarti sudah berada digaris “aman”, sedangkan kode merah bermakna bahwa jamaah tersebut perlu dibantu. Berdasarkan daftar jamaah tersebut, maka zakat, infaq, dan shodaqoh didistribusikan. Beliau mengatur sendiri bagaimana dana-dana sosial itu disalurkan. Ada yang memang langsung dibagikan kepada mustahik, tapi ada yang berupa pinjaman..¹³²

KH. Noer Alie juga memperlihatkan saluran-saluran air yang menjadi sumber pengairan bagi persawahan di sekitar kampung. Tidak jarang, beliau mengajak penduduk kampung untuk bekerja bakti membersihkan saluran air di tepi jalan agar tidak menjadi sarang penyakit dan tidak tersumbat ketika musim hujan tiba. Selain itu, tidak jarang KH. Noer Alie mencangkul sendiri kebunnya untuk ditanami berbagai macam tanaman. Beliau juga turun ke sawah bersama petani untuk menanam benih padi, memanennya tatkala musimnya tiba. Ketika pemerintah daerah datang menawarkan bantuan, beliau meminta kepada

¹³² sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaroji/aku-rindu-kh-noer-alie diakses pada hari Senin, 11/06/2012 pukul 10:32.

pemerintah tersebut untuk memperbaiki saluran air dan memastikan tersedianya bibit tanaman dan pupuk.¹³³

Tidak hanya infrastruktur KH. Noer Alie juga mendidik para santriatinya untuk bisa mandiri. Ketika para santriatinya menerima bantuan dana untuk mendirikan gedung koperasi santriatinya, beliau meminta untuk ikut memotong padi ketika sawah milik yayasan memasuki musim panen. Hasil tersebut kemudian dijual dan dibelikan bahan bangunan. Yayasan yang dipimpin oleh KH. Noer Alie mengelola asset wakaf yang sangat banyak. Asset itu tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Seperti Babelan, Tarumajaya, Penggarutan, Kaliabang, Kebalen, Gabus, Teluk Pucung, Pekayon, dan banyak lagi yang lainnya. Kebanyakan asset ini dalam bentuk tanah sawah. Karena kekurangan pengurus untuk mengelolanya, beliau mengizinkan para petani untuk menggarap tanah sawah milik yayasan tersebut dengan sistem bagi hasil.¹³⁴ Pada menjelang musim tanam tiba, para petani yang berminat untuk mengelola sawah yayasan tersebut di daerah tertentu hanya satu orang, maka kepada mereka ditawarkan untuk melakukannya bersama. Jika tidak, maka penentuan akan dilakukan dengan cara lelang. Siapa yang menawarkan bagi hasil lebih tinggi kepada yayasan, maka dialah yang berhak mengelolanya.¹³⁵

Pesantren Attaqwa juga melakukan respon yang lain, yaitu penyederhanaan mata pelajaran atau bidang studi atau menyatukan mata pelajaran yang duplikasi, artinya satu mata pelajaran tetapi ada dua konten. Sebelumnya, PP Attaqwa melalui Koordinator Bidang Kurikulum mencantumkan begitu banyak mata pelajaran. Banyaknya mata pelajaran ini karena beberapa mata pelajaran diambil dari cabang mata pelajaran itu yang dijadikan satu pelajaran masing-masing, sebelum 1990-an, jumlah mata pelajaran, terutama pelajaran agama, yang diajarkan pada PP Attaqwa cukup banyak, berdasarkan kitab pedoman Perguruan Attaqwa yayasan P-3, di antara mata pelajaran pada jenjang Tsanawiyah, di

¹³³ sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaraji/aku-rindu-kh-noer-alie diakses pada hari Senin, 11/06/2012 pukul 10:32.

¹³⁴ Hal ini dibenarkan oleh pengurus santri Attaqwa Putra (Fauzi, kelas 2 MA Attaqwa) dalam wawancara dengan penulis pada hari Sabtu, 09/06/2012. Lihat lampiran 13.

¹³⁵ sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaraji/aku-rindu-kh-noer-alie diakses pada hari Senin, 11/06/2012 pukul 10:32.

antaranya meliputi: *Al-Qur'an, Tafsir, Hadits*¹³⁶ dan *Ilmu Hadits, Tauhid* (keesaan Allah), *Fikih* (Ilmu tentang hukum Islam), *Adab dan Akhlak* (Kesopanan; kehalusan dan kebaikan budi pekerti), *Sejarah Islam, Bahasa Arab, Nahwu*,¹³⁷ *Mutholaah* (pelajaran Bahasa Arab yang isinya cerita-cerita berbahasa Arab untuk melatih Bahasa Arab), *Ilm Balaghoh*,¹³⁸ *Qawafy*¹³⁹ dan *Faraidh/fikih mawaris* (Ilmu tentang ahli waris), *Ilmu Jiwa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tarbiyah* (Pendidikan Islam) dan *Taklim* (Pengajaran agama Islam), *Tarikh* (sejarah), *Ilmu Bumi, Olahraga, Idaroh* (Tata Negara), *tarbiyatul wathoniyah* (semacam P4 (Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila) jika sekarang adalah PKN), *Ilmu Sosial, Arudh*¹⁴⁰, *Manthiq*,¹⁴¹ *Shorof*¹⁴².

Dalam daftar mata pelajaran tersebut, sebetulnya terdapat beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam satu kategori. Misalnya *Qawafy* dan *Faraidh*, termasuk dalam kategori pelajaran *Faraidh*. Akan tetapi, kenyataannya masing-masing merupakan memiliki materi ajar yang berbeda, ada materi khusus

¹³⁶ Hadis adalah sabda dan perbuatan nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat-sahabatnya (untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam). Lebih jelas lihat Muhaemin, *Al-Qur'an dan Hadis untuk Kelas VII MTs*, Jil. 1.-ed. 1.-Cet. 1.- Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, hlm. 5

¹³⁷ Nahwu adalah kaidah-kaidah Bahasa Arab untuk mengetahui bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (Mufrod) atau ketika sudah tersusun (Murokkab). Termasuk didalamnya adalah pembahasan Shorof. Karena Ilmu Shorof bagian dari Ilmu Nahwu, yang ditekankan kepada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika mufrodnya. Lebih jelas lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial, LkiS*, 1994, hlm. 260.

¹³⁸ Istilah “‘Ilm Al-Balaghah” terdiri atas dua kata, yaitu ‘ilm dan al-Balaghah. Kata “‘Ilm” dapat ditujukan sebagai nama suatu bidang tertentu. Kata “‘Ilm” juga diartikan sebagai materi-materi pembahasan dalam kajian suatu disiplin ilmu (al-Qadhaya allati tubhatsu fihi). Kata “ilm” juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang materi kajian dalam suatu bidang tertentu. Wacana Jurnal ilmu Pengetahuan Budaya, *Wacana: Nasionalisme dan Penafsiran*, Vol. 7 No. 1, April 2005, hlm. 56.

¹³⁹ Ilmu yang mempelajari tentang aturan kata pada akhir bait sya’ir Multazim. sya’ir Arab Multazim adalah terdiri dari 2(dua) rukun, yaitu wazan dan qafiyah.

¹⁴⁰ Ilmu ‘arudh adalah ilmu yang membahas pola-pola syi’ir Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Lihat A. Mustofa Bisri, *Koridor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Januari 2010, hlm. 73.

¹⁴¹ Mantiq adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari cara berpikir salah. Dr. KH. Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan aspirasi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. 1. September 2006, hlm. 411.

¹⁴² Sharaf atau dibaca Shorof adalah salah satu nama cabang Ilmu dalam pelajaran Bahasa Arab yang khusus membahas tentang perubahan bentuk kata (Bahasa Arab: kalimat). Perubahan bentuk kata ini dalam prakteknya disebut Tashrif. Oleh karena itu dinamakan Ilmu Sharaf (perubahan; berubah), karena Ilmu ini khusus mengenai pembahasan Tashrif (pengubahan; mengubah). Lebih jelas lihat KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial, LkiS*, 1994, hlm. 260.

madrasah dan ada juga materi pondok, sehingga terjadi dua kali ujian dalam satu mata pelajaran *Faraidh*, satu pelajaran tetapi dua materi yang digabung, misalkan ketika menggunakan materi dari kitab, maka materi dari buku ajar ditutup. Lalu misalnya *Nahwu*, *Balaghoh*, *Manthiq*, termasuk dalam kategori pelajaran Bahasa Arab, bahkan terdapat juga pelajaran Bahasa Arab. Kemudian disederhanakan menjadi dua kategori pelajaran, yaitu *Nahwu* dan Bahasa Arab.¹⁴³

Respon berikutnya adalah kalender pendidikan, dimana pada tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Daud Yusuf, melakukan perubahan kalender pendidikan pada semua sekolah pemerintah. Aturan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan belajar sekolah pemerintah diseragamkan pelaksanaannya, yaitu dimulai pada bulan Juli hingga berakhir pada bulan Juni. Libur kegiatan belajar pada bulan Juni, tidak lagi pada bulan Ramadhan, sehingga pada bulan Ramadhan sekolah tidak libur. Perubahan ini mendapat respon yang alot dari Ponpes Attaqwa, Ponpes Attaqwa sejak berdiri hingga tahun 1998 menggunakan kalender pendidikan sendiri dengan memakai tahun Hijriyah yang awal tahun ajarnya adalah setelah Idul Fitri/Lebaran, baru pada tahun 1997-1998, Ponpes Attaqwa melaksanakan perubahan dengan cara mengganti kalender hijriyah menjadi kalender pendidikan nasional dengan kalender masehi dan berdampak menambah durasi belajar dari setahun menjadi satu setengah tahun, hal ini mendapat reaksi kekesalan dari para santri yang disebabkan harusnya telah selesai tutup kitab hingga dibuka kembali untuk diulang kembali.¹⁴⁴ Setelah itu kalender pendidikannya mengikuti kalender nasional hingga saat ini.

4.2.2. Respon Pesantren Annida Al-Islamy

Dalam menanggapi kebijakan Orde Baru pesantren Annidia Al-Islamy melakukan kebijakan yang hampir sama dengan Pesantren Attaqwa yaitu membuka diri terhadap perubahan. Namun pada manajemen pengelolaannya pesantren ini lebih memisahkan pengelolaan madrasah dengan pengelolaan

¹⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Khaerul Umam Noer, lihat lampiran 15.

¹⁴⁴ Berdasarkan wawancara dengan Khaerul Umam Noer (27 tahun, eks santri PP Attaqwa dan pengurus Yayasan Attaqwa), lihat lampiran 15.

pesantren.¹⁴⁵ Hal itu dilakukan karena KH Muhadjirin tidak ingin sistem pendidikan pesantrennya tercampur dengan sistem pendidikan madrasah. Artinya sistem pendidikan pesantren Annida Al-Islamy masih mempertahankan sistem *halaqah* yang non-klasikal.¹⁴⁶ Lalu bedanya dengan sistem *halaqah* yang klasikal adalah dengan adanya patokan kelas di madrasah yang belajar di ruang kelas dan terbagi dengan pembagian kelas.

Kebijakan Orde Baru yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975 juga ikut mengubah tujuan dari pesantren Annida. Bila awalnya pesantren Annida ini bertujuan untuk mencetak ahli-ahli agama maka kebijakan ini membuat *attaqwa* mencetak tenaga-tenaga siap kerja. Perubahan itu terlihat pada 1976, saat Annida mulai mengadakan ujian nasional dengan menumpang di sekolah lain dan mulai menggunakan ijazah negeri.

SKB Tiga menteri 1975 ini juga ikut mengubah sistem kurikulum di pesantren Annida khususnya dalam waktu pembelajaran kitab. Sebelumnya di pesantren Annida menggunakan cara menyelesaikan kitab terlebih dahulu lalu berganti dengan kitab yang lain dan tidak terpengaruh naik kelas atau tidaknya di madrasah. Setelah SKB itu dikeluarkan, sistemnya tetap sama, yaitu harus menyelesaikan satu kitab untuk mempelajari kitab berikutnya. Hal itu tetap berlaku walaupun si santri itu naik kelas di madrasah.

Selain mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional, KH. Muhadjirin juga mempertahankan watak mandirinya. Hal itu terlihat dalam sikap KH. Muhadjirin selama Orde Baru yang tidak pernah mau menerima bantuan dari Orde Baru.¹⁴⁷ Selama bantuan itu tidak berbau kampanye partai politik, maka KH Muhadjirin menerima sumbangan. Seperti pada tahun 1995 yang menerima bantuan 10 ekor ayam kampung untuk program ketrampilan pesantren dari pemerintah, walau tidak berjalan seperti yang diharapkan.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan H.Abdul Rahman (24 tahun, eks murid KH Muhadjirin), lihat lampiran 9.

¹⁴⁶ Berdasarkan wawancara dengan Kiteng (santri dan pemilik kantin di dalam pesantren Annida Al-Islamy sejak 1985) pada hari Sabtu, 02/06/2012. Lihat lampiran 8.

¹⁴⁷ Ini diamini oleh semua narasumber pesantren Annida Al-Islamy.

¹⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kiteng, lihat lampiran 8.

Kurikulum di Pesantren Annida Al Islamy senantiasa beradaptasi dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang dirancang oleh Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional. Namun demikian khusus untuk kurikulum agama, maka dipengaruhi juga oleh telah selesainya suatu kajian terhadap kitab-kitab tertentu dan dilanjutkan dengan kajian terhadap kitab-kitab berikutnya.¹⁴⁹

Respon Syekh Muhadjirin terhadap SKB Tiga Menteri pada Tahun 1975 adalah mengubah standar kurikulum yang ada di pesantren Annida yang sebelumnya pembagian proporsionalnya 95% Agama dan 5% Umum, menjadi sekurang-kurangnya 30% Agama dan 70% Umum setelah membutuhkan waktu yang lama agar dapat terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Selain perubahan pada kurikulum, pesantren Attaqwa mengubah sistem penjenjangan yang ada di pesantren Attaqwa yang sebelumnya menggunakan sistem penjenjangan madrasah diniyah menjadi sistem penjenjangan yang serupa sistem penjenjangan sekolah umum. Adapun penjenjangan madrasah meliputi:

- TPQ (satu tahun masa belajar),
- Madrasah Tsanawiyah (tiga tahun masa belajar),
- Madrasah Aliyah (tiga tahun masa belajar),
- Ma'had Aly (empat tahun masa belajar).

Selanjutnya pada tahun berikutnya sekitar tahun 1979 respon pesantren Annida adalah mengeluarkan Ijazah, yang sebelumnya Ijazah lokal yang tidak diakui pemerintah, menjadi Ijazah yang diakui pemerintah dan disamakan statusnya Ijazahnya dengan Ijazah sekolah umum, sehingga lulusan madrasah Annida dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Respon tersebut bagi pesantren Annida berpandangan bahwa kelangsungan hidup dan belajar santri harus diutamakan. Oleh karenanya seluruh perubahan kurikulum sejak zaman Orde Lama sampai dengan Orde Baru senantiasa diikuti. Ijazah sebagai syarat formal bagi setiap alumni pun senantiasa mengikuti sistem pendidikan modern, walaupun diakui pada awalnya membutuhkan waktu untuk dapat sinkron dengan

¹⁴⁹ Berdasarkan wawancara dengan KH Aiz, lihat lampiran 7. Hal ini dibenarkan oleh narasumber lainnya, seperti H. Abdul Rohman, Kiteng, Mahfudz Sjafii.

administrasi pendidikan modern. Ijazah ini didapatkan setelah Ponpes Annida mengikuti Ujian Negeri (UN), walau pada tahun itu santri Ponpes Annida menggabungkan diri dalam ujian di sekolah lain, seperti di MTsN dan MAN yang ada disekitar Bekasi.¹⁵⁰

Selama masa Orde Baru, Syekh Muhadjirin tidak pernah merespon dalam mendirikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, seperti; pertanian, peternakan, agri bisnis, koperasi, dan pengembangan ekonomi lainnya melalui badan pengembangan pesantren dan masyarakat. Hal ini didasarkan sikap Syekh Muhadjirin yang sangat mengutamakan pembelajaran agama.¹⁵¹

Ponpes Annida Al-Islamy juga melakukan perubahan lain, yaitu pengembangan mata pelajaran atau bidang studi. Sebelumnya, Ponpes Annida mencantumkan begitu banyak mata pelajaran. Banyaknya mata pelajaran ini karena beberapa mata pelajaran diambil dari nama-nama kitab, atau cabang dari mata pelajaran tertentu yang dijadikan satu pelajaran masing-masing. Sejak awal, jumlah mata pelajaran, terutama pelajaran agama, yang diajarkan pada pesantren Annida cukup banyak. Seperti umumnya pelajaran agama di pesantren-pesantren di Bekasi pada jenjang tsanawiyah, diantaranya meliputi: *Al-Qur'an, Tafsir, Hadits dan Ilmu Hadits, Tauhid, Fiqih dan Ushul Fiqih, Adab dan Akhlak, Bahasa Arab, Insya dan Takbir, Nahwu, Mutholaah, Balaghoh, Manthiq, Bahasa Indonesia, Tarbiyah dan Taklim, Albayan,*¹⁵² *Tarikh, Maqulat,*¹⁵³ *Sejarah Agama, Ilmu Sosial, Arudh, Manthiq, Shorof, Falaq, dan Tasawuf.*

Dalam daftar mata pelajaran tersebut, terdapat beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam satu kategori lalu dikembangkan menjadi beberapa cabang dari mata pelajaran tersebut. Misalnya mata pelajaran *fiqih*, yang dikembangkan

¹⁵⁰ Berdasarkan wawancara dengan KH Aiz Muhadjirin, lihat lampiran 7.

¹⁵¹ Berdasarkan semua narasumber yang mengatakan bahwa KH Muhadjirin tidak pernah berpolitik dan bersikap netral.

¹⁵² Al-Bayan (نباي) menurut pengertian bahasa adalah Al-Kasyafu (فشركل) yang berarti membuka atau menyatakan. Bisa juga disebut Al-Lidhaah. Artinya menerangkan atau menjelaskan. Seperti yang dikatakan DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Penerjemah: Usman Sy'roni, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta Islamic Centre, Penerbit Hikmah, 2008, hlm. 188.

¹⁵³ Maqulat secara bahasa artinya pengertian atau yang dikatakan. Dalam mantiq dipakai dengan arti mahmul. Contoh dalam *ta'rif Mahiyah* : *Mahiyah* adalah apa yang dikatakan (*ma yuqolu*), atas jawaban *ma huwa*, yang dimaksud *ma yuqolu* adalah *ma yuhmalu*. Seperti dijelaskan H. Abdul Rahman, berdasarkan wawancara dengan H. Abdul Rahman, lihat lampiran 9.

menjadi *Fiqih Mulok*, *Ushul Fiqih* dan *Faraidh*. Pengembangan ini terjadi pada sejumlah kitab-kitab kuning yang dipelajari dalam satu mata pelajaran tersebut, terlebih lagi kekhasan dalam pesantren ini adalah kitab-kitab *fiqih* yang diajarkan tidak hanya pada satu mazhab, seperti pada mazhab Syafe'i, tetapi juga tiga mazhab lainnya, seperti mazhab Hanbali, Maliki, dan Hanafi.

Lalu pada kalender pendidikan, KH Muhadjirin langsung menyesuaikan dengan perubahan kalender pendidikan yang dipergunakan sesuai dengan kalender pendidikan madrasah yang menginduk ke Departemen Agama, sehingga waktu awal belajar, libur, dan akhir tahun pelajaran sejalan dengan kalender pendidikan nasional. Namun demikian, khusus untuk setiap tanggal merah non Islam, Pesantren Annida Al Islamy tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan. Hingga saat ini berlaku dan terus bertahan tak ada perubahan.

4.2.3. Respon Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (PINK)

Dalam menanggapi kebijakan pemerintah, Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf membuka diri dengan menyesuaikan tuntutan zaman. Namun perbedaan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf dengan sebelumnya adalah Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf mendirikan sekolah umum yang memiliki komposisi kurikulum yang sama dengan sekolah negeri. Hanya saja KH Dawam Anwar memasukkan materi Ahlussunnah Wal Jama'ah didalam kurikulumnya.

Kebijakan Orde Baru yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975 ini tidak mengubah tujuan awal dari pesantren YAPINK. Modernisasi pendidikan, dimana itu menjadi hal yang ditekankan oleh Orde Baru, sudah diterapkan oleh pesantren YAPINK dengan diadakannya ujian nasional di pesantrennya, walau diadakan di sekolah lain. Barulah pada tahun 1975 pesantren YAPINK mengadakan ujian nasional di pesantrennya sendiri.

SKB Tiga menteri 1975 ini juga ikut mengubah sistem kurikulum di pesantren YAPINK khususnya dalam waktu pembelajaran kitab. Sebelumnya di pesantren YAPINK menggunakan cara menyelesaikan kitab terlebih dahulu lalu berganti dengan kitab yang lain dan tidak terpengaruh naik kelas atau tidaknya di madrasah. Setelah SKB itu dikeluarkan maka sistemnya berubah dimana dalam

tiap kelas di madrasah dibagi menjadi beberapa bab dalam kitab. Sebagai contohnya, dalam kelas satu para santri mempelajari kitab A sebanyak 3 bab.¹⁵⁴

Sistem pendidikan di lingkungan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf berstatus swasta penuh dan berpegang pada prinsip “tidak mau menerima bantuan dana dan sumbangan yang berasal dari pemerintah”. Lembaga pendidikan ini dibawah naungan Yayasan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf (Berdiri sejak 1974), yang juga merencanakan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Pada tahun 1970 menerapkan sistem klasikal dari tingkat dasar, tingkat menengah, hingga tingkat tinggi. Masing-masing bidang dibagi ke dalam unit-unit pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (TK Islam), sejak awal berdirinya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, pada tahun 1972 berdiri Madrasah Aliyah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1980, YAPINK mendirikan SMP dan SMA, dan program strata 1 (S1) INISA yang didirikan pada tahun 1983. Lalu pada tahun Karakteristik pembedaan disesuaikan dengan kurikulum khusus materi ajar YAPINK, yang mengintegrasikan antara kurikulum Kemenag, Kemendiknas, dan Tsanawiyah Al-Azhar As-Syarif Kairo.¹⁵⁵ Khusus untuk Tsanawiyah Al-Azhar, YAPINK baru mendapat pengakuan pada tahun

Kekhasan yang dimiliki YAPINK hingga saat ini adalah pemisahan antara pelajar putra dan putri, baik dalam proses belajar-mengajar, aktifitas keseharian, gedung belajar dan asrama. Dengan demikian, pelajar putra dan putri masing-masing memiliki fasilitas dan pusat kegiatan (base camp) tersendiri, sehingga memungkinkan tidak adanya percampuran antara putra dan putri kecuali dalam event-event tertentu. Kekhasan ini diterapkan mulai dari jenjang pendidikan tingkat menengah hingga tingkat tinggi, sedangkan untuk tingkat dasar masih berada dalam satu atap.

Selain sistem klasikal, YAPINK juga menerapkan pendidikan kepesantrenan yang menitikberatkan pada upaya pengembangan potensi keilmuan agama langsung dari sumbernya, kecakapan intelektual dan sosial, serta

¹⁵⁴ Berdasarkan wawancara dengan Drs. Roshid dan dibenarkan oleh KH Sahid.

¹⁵⁵ www.yapink.net diakses pada senin 12-06-2012 pukul 05.00.

pembinaan mental, kedisiplinan, kemandirian, dan keahlian dasar sebagai modal bagi masa depan para santri. Dalam hal kepesantrenan, YAPINK menggunakan sistem pesantren tradisional dengan tetap konsisten mempelajari dan mendalami Al-Qur'an al-Karim dan Hadits Nabi, kitab kuning, bahasa Arab dan ilmu-ilmu pendukungnya, serta kegiatan-kegiatan eksplorasi potensi santri. Sistem kepesantrenan di YAPINK dibagi menjadi 2 jenjang, yakni tingkat menengah (Mutawassitoh) dan tingkat tinggi (Ma'had 'Aly). Dalam masing-masing bidang diterapkan pola pendidikan yang berbeda, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Beberapa kitab kuning yang masih aktif dipelajari di YAPINK di antaranya:

- a. Tafsir Al-Jalalain (Tafsir Al-Qur'an)
- b. Jawahir Al-Bukhari, At-Tajrid as-Sharih (Hadits)
- c. Al-Hushun al-Hamidiyah, Umm al-Barahin (Tauhid)
- d. Ta'lim al-Muta'allim, Minhaj al-Muslim (Akhlaq)
- e. Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah, Al-Ajrumiyah, Alfiyah Ibnu Malik (Nahwu Sharaf)
- f. Safinah an-Naja, Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in (Fikih), dan lain-lainnya.

Respon KH. Dawam Anwar terhadap SKB Tiga Menteri pada Tahun 1975 adalah mengubah standar kurikulum yang ada di YAPINK yang sebelumnya pembagian proporsionalnya 70% Agama dan 30% Umum menjadi proporsionalnya pendidikan agama dan umum dalam sistem klasikal direalisasikan dalam pembagian 60% materi agama berbanding 40% materi non-agama. Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) prosentasenya adalah 60% materi agama dan 40% materi umum. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA prosentasenya adalah 40% materi agama dan 60% materi umum. Masing-masing bidang memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Para calon siswa/wali siswa dapat memilih bobot bidang pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan harapannya masing-masing.¹⁵⁶

YAPINK juga melakukan perubahan lain, yaitu pemberian porsi dan target pada pembelajaran kitab, bila di pesantren Attaqwa, kitab-kitabnya yang dipelajari

¹⁵⁶ www.yapink.net diakses pada senin 12-06-2012 pukul 05.00.

kitab standar pesantren dan tergantung pada kelas, apabila naik kelas namun kitab belum selesai, maka di kelas selanjutnya kitab akan diganti. Jika di pesantren Annida Al-Islamy sangat menekankan pada penyelesaian kitab dan baru bisa mengganti kitab yang lebih tinggi. Walau sudah naik kelas di madrasah, apabila kitabnya belum selesai maka tidak bisa mengganti kitabnya. Di YAPINK yang pada sebelum SKB Tiga Menteri Tahun 1975, masih menggunakan kurikulum belajar kitab hingga selesai, maka setelah SKB tersebut dilakukan pemberian porsi dan target, misalnya pada kelas satu tsanawiyah, pemberian porsi dan target kitab *Safinah an-Naja* adalah per bab atau *faslun*, pada kelas satu porsi dan target bab satu hingga tiga, lalu pada kelas dua tsanawiyah bab empat hingga selesai, dan begitu seterusnya.

Respon KH Dawam Anwar terhadap penyederhanaan mata pelajaran kurang lebih sama dengan pesantren Attaqwa, dengan melakukan penyederhanaan mata pelajaran agama yang diambil dari nama-nama kitab, hanya bedanya tidak menggabungkan beberapa cabang menjadi satu mata pelajaran, tetapi lebih kepada pengurangan kitab menjadi beberapa kitab yang masih dipakai hingga sekarang seperti yang disebutkan diatas. Agar tetap menjadi pesantren yang menitik beratkan pada pencetak kader berfaham Ahlussunnah Wal Jama'ah, penyederhanaan kitab-kitab tersebut dan biasanya kitab-kitab tingkat tinggi dialihkan ke kurikulum INISA.

Selanjutnya mengenai kalender pendidikan, YAPINK mencontoh kalender pendidikan pada pesantren Tebu Ireng pada sekitar tahun 1950-an, yaitu setiap hari Jumat, semua kegiatan belajar-mengajar diliburkan, sebaliknya pada hari minggu tidak diliburkan. Hal ini juga menjadi ciri khas YAPINK yang tetap konsisten pada kalender pendidikan hingga sekarang. Selebihnya dari hal tersebut, YAPINK mengikuti kalender pendidikan yang menginduk kepada Departemen Agama dan Departem Nasional, namun tidak meliburkan kegiatan belajar-mengajar apabila libur nasional non-hari besar Islam.

4.3. Hal-hal yang masih bertahan di Pesantren pada masa Orde Baru

Seperti pada pembahasan sebelumnya pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang muncul pada masa pra-Islam dan lahir dari suatu kearifan lokal (local-genius atau indigenius) Nusantara yang mampu bertahan hingga sekarang. Walaupun begitu, hadangan perkembangan zaman telah menuntut pesantren agar lebih berkembang lebih jauh dari bentuk tradisionalnya sehingga memunculkan anggapan bahwa profile pesantren akan selalu berubah dengan mengikuti perkembangan zamannya.

Menurut Rizal, sistem pendidikan pesantren setidaknya menyangkut tujuh aspek kependidikan, yaitu tujuan pendidikan, materi dan struktur kurikulum, sistem gradasi, pendekatan edukasi, model pembelajaran, interaksi edukatif, dan lingkungan & iklim pendidikan. Analisis perbandingan menunjukkan fakta-fakta bahwa ada beberapa aspek yang berubah dalam sistem pendidikan pesantren dari bentuk tradisionalnya selama satu abad terakhir. Meskipun demikian, perubahan itu terjadi dalam aspek-aspek teknis, seperti sistem gradasi dan restrukturasi kurikulum, demikian juga pada aspek formalisasi tujuan. Menyangkut aspek materi, pendekatan dan model pembelajaran hanya mengalami penambahan. Sementara itu, interaksi edukatif dan lingkungan pendidikan yang berbasis pada agama sehingga berwatak religius tetap dipertahankan dan menjadi ciri khas dari sistem pendidikan di pesantren sehingga menjadi daya tarik dan daya jual kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam di Nusantara.¹⁵⁷ Di dalam pembahasan subbab ini, hanya akan dijelaskan hal-hal tradisi pesantren yang masih bertahan di pesantren di Bekasi.

4.3.1. Pendekatan Edukasi

Pesantren memiliki pendekatan edukasi yang khas yang tetap dipertahankan tanpa terpengaruh oleh teori-teori pendidikan modern yang silih berganti karena perbedaan pendekatan filosofis. Pesantren yang lebih mengembangkan filosofi pendidikan berdasarkan pada ajaran Islam, tetap pada pendirian bahwa pendidikan bagi kaum muda, yang lebih mementingkan aspek

¹⁵⁷ Rizal, Ahmad Syamsu, *Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9 No. 2-2011, hlm. 95.

moral daripada pengetahuan, haruslah demikian. Pesantren lebih suka menggunakan konsep pengajaran, alih-alih pembelajaran; konsep pengawasan, alih-alih kebebasan; dan konsep *targhib-tarhib*, atau menanamkan harap dan memberikan pertakut, alih-alih otonomi moral.¹⁵⁸ Pengajaran, pengawasan, dan *targhib-tarhib* secara konseptual inilah yang menjadi corak edukasi yang khas dan berlaku umum di pesantren di samping bentuk-bentuk pendidikan lain yang bersifat teknis.

(a) Pengajaran

Konsep pengajaran lebih berorientasi pada aktifitas guru dalam memberikan ilmu-pengetahuan, sementara konsep pembelajaran lebih berorientasi pada aktifitas siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Konsep mengajar di pesantren, yang bersumber dari ajaran Islam, didasarkan pada filosofi hubungan antara orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Mengajar adalah kewajiban orang yang berpengetahuan dan belajar dari yang berpengetahuan adalah kewajiban orang yang tidak berpengetahuan. Atas dasar konsep ini, dalam proses pendidikan (khususnya pendidikan agama) muncul beberapa nuansa batin hubungan antara guru-siswa (dalam pesantren, hubungan kiai-santri, dalam tasawwuf, hubungan mursyid-murid), di antaranya otoritas keilmuan, *tabarruk*, ketaatan mutlak, kemuliaan guru, paternalisme.¹⁵⁹ Menurut Iskandar, proses pembelajaran baik di pesantren maupun di madrasah pada dasarnya merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan dari orang yang lebih dahulu belajar (guru) kepada orang yang datang belakangan (murid atau santri). Dari sekian banyak santri, umumnya hanya sebagian kecil saja yang mempunyai bakat, pemikiran dan pemahaman yang setingkat atau bahkan melebihi gurunya. Kelompok kecil inilah yang kemudian tampil sebagai manusia-manusia unggul, atau kelompok elite yang mampu hidup, berpikir dan mengembangkan ilmunya secara mandiri dan jernih. Kepada kelompok unggulan seperti ini kata “mencari

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

ilmu” ditafsirkan dengan arti “berijtihad”, sedangkan kepada yang lainnya, cukuplah dengan cara bertaklid (atau berittiba).¹⁶⁰

Abdurrahman Wahid menjelaskan pendidikan tradisional di dalam dua aspek kehidupan di pesantren, yaitu: *pertama*, pemberian pengajaran dengan struktur, metode, dan literatur tradisional. Pemberian pengajaran tradisional ini dapat berupa pendidikan formal di sekolah atau madrasah dengan jenjang pendidikan yang bertingkat-tingkat, maupun pemberian pengajaran dengan sistem *halaqah* (lingkaran) dalam bentuk pengajian *weton* dan *sorogan*. Ciri utama dari pengajian tradisional ini adalah cara pemberian pengajarannya, yang ditekankan pada penangkapan harfiah (*letterlijk*) atas suatu kitab (teks) tertentu. Pendekatan yang digunakan ialah menyelesaikan pembacaan kitab (teks) tersebut, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab (teks) lain. Ciri utama ini masih dipertahankan hingga dalam sistem sekolah atau madrasah, sebagaimana dapat dilihat dari mayoritas sistem pendidikan pesantren dewasa ini (pada masa Orde Baru, red). Dengan demikian, dapat dikatakan pemberian pengajaran tradisional di pesantren masih bersifat nonklasikal (tidak didasarkan pada unit mata pelajaran), walaupun di sekolah atau madrasah yang ada di pesantren dicantumkan juga kurikulum klasikal.¹⁶¹

Kedua, pemeliharaan tata nilai tertentu, yang untuk memudahkan dapat dinamai subkultur pesantren. Tata nilai ini ditekankan pada fungsi mengutamakan beribadah sebagai pengabdian dan memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki. Dengan demikian, subkultur ini menetapkan pandangan hidupnya sendiri, yang bersifat khusus pesantren, berdiri atas landasan pendekatan ukhrawi pada kehidupan dan ditandai ketundukkan mutlak kepada “ulama”. Di seputar pendekatan ukhrawi dan ketundukan mutlak inilah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan corak subkultural dari pesantren, seperti kecenderungan untuk bertirakat dalam usaha untuk mencapai keluhuran budi dan jiwa, keikhlasan untuk mengerjakan apa saja bagi kepentingan guru, dan kelemahan penerapan ukuran-ukuran duniawi dalam

¹⁶⁰ Iskandar, *op.cit.*, hlm. 2-3.

¹⁶¹ Wahid, Abdurrahman, *mengerakkan tradisi : esai-esai pesantren*, LkiS, 2001, hlm. 71-72.

kehidupan seorang santri. Dari kacamata pandangan hidup seperti inilah dapat dimengerti mengapa masih ada pesantren yang menolak bantuan keuangan dari pemerintah dan bahkan dari perorangan muslim yang kaya. Yang dikejar adalah totalitas kehidupan yang diridhoi Allah, betapa remeh dan tidak berartinya sekalipun totalitas itu bisa dilihat dari sudut pandangan duniawi.¹⁶²

(b) Pengawasan

Pengawasan merupakan cara pesantren menegakkan norma-norma (sunnah) kepesantrenannya. Norma ini bisa berupa etika Islam, inilah yang terutama dan pokok, atau disiplin perilaku yang diberlakukan pesantren secara lokal. Norma-norma pesantren ada yang secara formal dieksplisitkan dan bentuk aturan tertulis dibarengi dengan sanksinya, atau berupa konvensi tidak tertulis yang disampaikan secara *relation* (periwayatan dari mulut ke mulut). Pengawasan dalam lingkungan pesantren tidak selalu dalam format terstruktur oleh lembaga pengawas (cara ini dilakukan oleh pesantren yang bercorak modern), tetapi lebih berupa pengawasan melekat oleh warga pesantren sendiri, sehingga setiap warga pesantren merasa dirinya diawasi oleh warga yang lainnya, maka ia harus menjaga norma-norma pesantren.¹⁶³ Pelanggaran norma akan mendapat sanksi, berupa *ta'zir*. Hukuman tersebut biasanya berupa di botak rambutnya, di arak ke keliling kompleks pesantren, di beri hapalan tambahan, dan bahkan di usir dari pesantren. Hukuman tersebut tergantung dengan seberapa berat pelanggaran norma tersebut.

(c) *Tarhib wa Tarhib*

Tarhib wa Tarhib merupakan corak pendidikan yang dikembangkan dari Al-Qur'an, di mana orang yang hendak dibentuk karakternya diberi seperangkat janji-janji keuntungan apabila ia berkomitmen pada nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan, dan diberikan pertakut sebagai *shock therapy* bagi jiwa yang

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁶³ Rizal, Ahmad Syamsu, *Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 9 No. 2-2011, hlm. 104.

memandel. Yang terakhir ini berupa ancaman terkenanya penderitaan apabila ia mengabaikan nilai-nilai kebaikan.¹⁶⁴

Dalam tradisi pesantren, corak pendidikan ini sangat kental terasa dalam seluruh proses pengajian kitab-kitab dalam segala jenis yang bernuansa pada keharusan taat aturan yang berlaku, termasuk pelajaran bahasa Arab. Menurut Steenbrink, menemukan fakta bahwa “walaupun pengajaran bahasa ini (yaitu bahasa Arab, pen.) tidak secara langsung menyangkut masalah agama, namun suasana pesantren di mana para santri tinggal, seluruhnya diresapi pengajaran Arab dan Al-Qur’an, membuat pengajaran bahasa Arab seluruhnya dianggap sebagai pengajaran agama”. Bahkan terdapat sebuah kepercayaan bahwa bahasa utama saat di Surga adalah bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an.

(d) Indoktrinasi

Sebagai lanjutan dari konsep pengajaran adalah indoktrinasi dalam penyampaian ilmu-pengetahuan. Indoktrinasi dimaksudkan sebagai pelesakkan materi ajar oleh guru untuk diinternalisasi oleh santri. Indoktrinasi ini berlaku untuk hampir seluruh ilmu-pengetahuan di pesantren tradisional, baik bidang akidah, fikih, akhlak, ibadah maupun bahasa. Selama menjadi santri dalam proses belajar, seorang santri harus menerima tanpa kritis ilmu-ilmu yang diberikan kiai. Hal ini bukan berarti semua pesantren mengharuskan santrinya menerima tanpa kritis, sebab pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai santri diperbolehkan bertanya kepada kiai.

Efek dari indoktrinasi dalam pendidikan ini adalah seragamnya cara penafsiran para santri-santri terhadap konsep keagamaan, selaras dengan pemahaman kiainya. Fenomena inilah yang menjadikan genealogi ideologi antar pesantren mudah dilacak, dan mengukur sejauh mana suatu pesantren menyimpang dari induk ideologisnya. Fenomena ini turut dimanfaatkan oleh Orde Baru didalam politik pembangunannya dengan salah satu caranya yaitu politik penyeragaman.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

Sejak pada awal dekade 1980-an, tidak ada satu sekolah pun di Indonesia yang tidak berseragam sekolah, semua berseragam sekolah. Mulai saat itu sebetulnya telah terjadi penguasaan institusi pendidikan nasional baik secara fisik maupun mental melalui politik penyeragaman. Secara fisik melalui ketentuan pakaian seragam pada nasional dari tingkat SD-SMTA, sedangkan secara mental melalui penggantian pelajaran *Civic* dengan PMP dan Penataran P4 bagi murid baru, serta materi pelajaran sejarah yang lebih ditekankan sebagai kampanye anti PKI. Penguasa Orde Baru menyadari betul, bahwa pendidikan merupakan wahana yang strategis untuk melakukan indoktrinasi ideologi yang efektif, oleh sebab itu pendidikan harus dikuasai.¹⁶⁵

Namun politik penyeragaman Orde Baru pada pesantren tak terjadi, yang ada hanya di madrasah yang dikelola pesantren. Sebabnya pesantren-pesantren masih setia dengan peci, baju koko dan atau gamis, serta sarung yang merupakan *trademarked* sistem pendidikan pesantren.

Sedangkan pesantren-pesantren di akhir dekade zaman Orde Baru terdapat penambahan-penambahan lainnya, seperti partisipatoris, praktek di ruang Laboratorium, dan *active-learning*, sebagaimana kasus pada Pondok Pesantren Attaqwa, dan Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf.

4.3.2. Model Pembelajaran

Seperti pada pembahasan di bab pendahuluan, dalam tradisi Pesantren dikenal model-model wetonan/bandongan/bandung, sorogan, halaqah dan setoran hafalan, didalam model pembelajarannya. Sementara itu dalam perkembangan selanjutnya pesantren juga mengembangkan model-model pendidikan yang lebih variatif, yang di samping bersifat *static-learning* juga berupa *active learning*.¹⁶⁶

a) Metode Sorogan

¹⁶⁵ Darmaningtyas, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁶⁶ Rizal, *op.cit.*, hlm. 105.

Sorogan, berasal dari kata sorog (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya (badal. Asisten kiai). Seperti dikatakan Iskandar, sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual,¹⁶⁷ dimana seorang seorang santri berhadapan langsung dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya. Sistem sorogan ini terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama bagi seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang alim.

Pembelajaran dengan sistem sorogan biasanya diselenggarakan pada ruang tertentu. Ada tempat duduk kiai atau ustadz, di depannya ada meja pendek untuk meletakkan kitab bagi santri yang menghadap. Santri-santri lain, baik yang mengaji kitab yang sama ataupun berbeda duduk agak jauh sambil mendengarkan apa yang diajarkan oleh kiai atau ustadz sekaligus mempersiapkan diri menunggu giliran di panggil.

Metode pembelajaran ini termasuk metode pembelajaran yang sangat bermakna karena kegiatan pembacaan kitab di hadapan kiai, mereka tidak hanya senantiasa dapat dibimbing dan diarahkan cara membacanya tetapi dapat dievaluasi perkembangan kemampuannya.

Metode sorogan adalah bagian wajib dalam pesantren. Metode ini telah menjadi bagian pembelajaran pesantren dari berabad-abad tahun yang lalu. Seiring perkembangan dalam dunia pendidikan seperti munculnya sekolah-sekolah binaan pemerintah bahkan sampai sekolah yang bertaraf nasional dan internasional, pesantren tetap konsisten dengan metode khasnya itu. Memang seakan terjadi stagnasi disini. Dimana lembaga-lembaga pendidikan modern banyak bermunculan dengan menggembar-gemborkan standar dan mutu kualitas masing-masing, justru pesantren tetap istiqomah dengan metode tradisionalnya.

b) Metode Halaqah/Wetonan/Bandongan/Bandung/Balagan

Metode pengajaran di pesantren (pesantren Attaqwa, Annida Al-Islamy, dan YAPINK adalah sama dan tidak ada perbedaan), untuk bentuk-bentuk tertentu boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan pada pengajian di

¹⁶⁷ Iskandar, *op.cit.*, hlm. 97.

langgar. Sistem menghafal teks-teks berbahasa Arab tetap dipertahankan. Juga cara penyampaian pelajaran diberikan secara berkelompok dalam satu lingkaran, tidak jauh berbeda dengan kelompok pengajian. Sistem ini disebut sistem *halaqah*, yang di Jawa Tengah dan Timur dikenal dengan nama *bandongan*, sementara di Jawa Barat disebut *bandungan* atau *balagan*. Dalam lingkaran itu sang kiai membacakan dan menjelaskan materi pelajaran. Seringkali materi pelajaran itu sang kiai menjelaskannya. Selama pengajaran dan sesudahnya, para santri diberi kesempatan untuk bertanya mengenai masalah-masalah yang belum dimengertinya.¹⁶⁸ Weton, istilah weton ini berasal dari kata wektu (bhs. Jawa) yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan shalat fardlu.¹⁶⁹

Pada pembelajaran tingkat tinggi, kiai atau ustadz kadang-kadang tidak langsung membaca dan menerjemahkan, tetapi menunjuk secara bergiliran kepada para santrinya untuk membaca dan menerjemahkan sekaligus menerangkan suatu teks tertentu. Setelah menyelesaikan pembacaan pada batasan tertentu, kiai atau ustadz memberi kesempatan kepada para santri untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Jawaban dilakukan langsung oleh kiai atau ustadz atau memberi kesempatan terlebih dahulu pada para santri yang lain. Sebagai penutup kiai atau ustadz menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran diatas, seorang kiai/ustadz biasa melakukannya melalui dua macam tes. Pertama: pada setiap tatap muka atau pada tatap muka tertentu. Kedua: pada saat telah dikhatamkannya pengkajian terhadap suatu kitab tertentu.

c) Metode Mudzakah/Bahtsul Masa'il

Menurut Abdul Fatah, Rohadi, dkk, metode *mudzakah* atau dalam istilah lain *bahtsul masa'il* merupakan pertemuan ilmiah, yang membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah dan masalah agama pada umumnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode musyawarah. Hanya bedanya,

¹⁶⁸ Mohammad, Iskandar, *op.cit.*, hlm. 96.

¹⁶⁹ Abdul Fatah, Rohadi, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 67.

pada metode mudzakah pesertanya adalah para kiai atau para santri tingkat tinggi. Mudzakah (diskusi) ini dapat dibedakan menjadi dua macam : a) Mudzakah yang diadakan sesama kiai atau ustadz. Pada tipe ini biasanya disediakan kitab-kitab besar yang merupakan rujukan utama dan dilengkapi dengan dalil-dalil dan metode istimbath (pengambilan hukum) yang lengkap. Tujuannya untuk memecahkan sesuatu masalah agama dan kemasyarakatan yang timbul atau sekedar untuk memperdalam pengetahuan agama, b) Mudzakah yang diadakan antara sesama santri. Tujuannya untuk melatih para santri dalam memecahkan masalah dengan menggunakan rujukan-rujukan yang jelas dan melatih cara berargumentasi dengan menggunakan nalar yang lurus. Mudzakah seperti biasanya dipimpin oleh seorang ustadz atau santri yang senior yang ditunjuk oleh kiai.¹⁷⁰

4.3.3. Interaksi Edukatif di Lingkungan Pesantren

Di lingkungan pesantren, sebagai suatu lembaga pendidikan, hampir keseluruhan interaksi sosial terjadi dalam konteks pendidikan, terutama antara kiai/ustadz dengan santri. Oleh karena itu, corak interaksi yang terjadi adalah interaksi edukatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi edukatif langsung terjadi dalam proses pengajian atau bentuk lainnya, sedangkan interaksi edukatif tidak langsung terjadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan segala sarana yang tersedia dalam pesantren.

Efek interaksi edukatif antara kiai/ustadz dengan santri yang intensif akan menimbulkan imitasi, baik terjadi dengan sengaja atau tidak, karena kiai sebagai orang yang dihormati dan dikagumi mempunyai kelebihan dan keunggulan, sehingga para santri ingin menirunya. Imitasi yang begitu kuat dan menyangkut segi norma, akan menimbulkan proses identifikasi, yaitu proses di mana individu mengadopsi nilai-nilai dari orang lain. Melalui proses inilah, model-mdoel perilaku dan gagasan ditransmisikan dari kiai kepada santrinya.¹⁷¹

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁷¹ Rizal, *op.cit.*, hlm. 107.

Bentuk interaksi sosial yang dominan di pesantren bukanlah kompetitif, tetapi kooperatif dengan ciri-ciri gotong-royong, tolong-menolong, nasihat-menasihati, bahu-membahu, kasih-mengasihi. Hal ini dikarenakan adanya rasa persaudaraan seiman, sehingga interaksi sosialnya bersifat religius, yang menimbulkan rasa cinta dan simpati. Tidak mengherankan apabila para santri tidak alergi dalam hal memberikan pinjaman, baik pinjaman uang maupun pinjaman pakaian; sarung, peci, baju, dan celana.

Agama Islam mendorong terlaksananya interaksi sosial dengan segala aturan dan sarananya, baik interaksi inter-personal maupun antara kelompok. Interaksi edukatif yang didasari oleh ruh Islam ini terjadi secara kontinyu di lingkungan pesantren karena di dukung struktur dan sistem kepesantrenan yang solid dengan segala unsur-unsur pembentuknya, baik interaksi antar individu siswa maupun interaksi antara pendidik dengan yang di didik.¹⁷²

Adapun menyangkut aspek interaksi edukatif yang dari awalnya bernuansa ibadah secara prinsipal dipertahankan, hanya sedikit yang mengalami pergeseran yaitu dikenalkannya sistem bayaran dan Ijazah tanda tamat belajar. Menurut Iskandar, pada umumnya pesantren tradisional tidak mengenal ijazah.¹⁷³ Menurut Mujamil Qomar, timbulnya orientasi ekonomis dengan sistem bayaran di kalangan pesantren yang bisa mengurangi kadar keikhlasan santri ketika belajar di pesantren. Para santri boleh jadi mengharap memperoleh ijazah sebagai “tiket” untuk memperoleh kedudukan atau pekerjaan tertentu di masa depan seperti yang terjadi pada siswa-siswa sekolah pada umumnya.¹⁷⁴

4.3.4. Lingkungan dan Iklim Pendidikan

Lingkungan dan iklim pendidikan yang religius tetap terpelihara sekalipun pada beberapa pesantren menerima juga kehadiran mass media elektronik, atau aktifitas yang bernuansa hiburan, meskipun ditayangkan dan dilakukan secara terkontrol.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷³ Iskandar, *op.cit.*, hlm. 99.

¹⁷⁴ Mujamil Qomar, *op.cit.*, Hlm. 82.

Spirit edukatif yang dibangun oleh ajaran agama (Islam), yaitu semata ibadah, untuk mencari ridho Allah, maka ikhlas beramal (dalam rangka membantu sesama manusia sebagai tanggungjawab sesama muslim) membangun suasana pendidikan yang berkarakter religius dalam setiap unsur-unsurnya. Corak kelembagaan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang khas dan terkonsentrasi di dalam kompleks yang “tertutup”, pesantren dengan “mudah” membentuk secara alami lingkungan yang kondusif bagi pengembangan misi edukatifnya. Suatu lingkungan edukatif dengan iklim yang memadai untuk menimbulkan suasana tertentu yang dikehendaki, dalam konteks pesantren, yaitu suasana religius bagi setiap orang yang ada di dalamnya, baik pada moment fisis, psikologis, maupun sosio-kultural. Dengan suasana itu, pesantren menjadi lingkungan “suci” yang hanya layak dimasuki oleh orang-orang yang bersih, hati perilaku, dan cara hidup.¹⁷⁵ Bahkan terdapat istilah “penjara suci” dikalangan santri, sebab semua penyakit masyarakat dan penyakit hati terperjara di lingkungan “suci” ini.¹⁷⁶

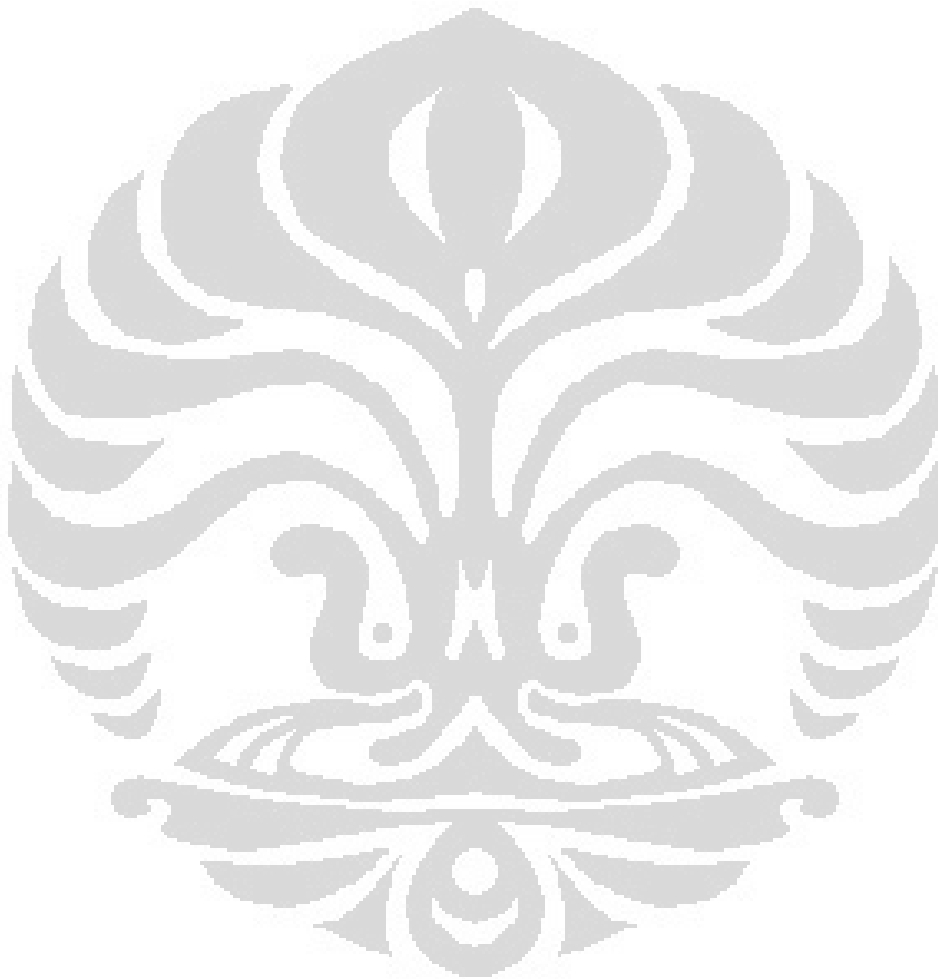
Maka, inilah dinamika sistem pendidikan pesantren yang dapat dijadikan *marketable* dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pesantren yang masih bertahan dengan sistem pendidikan tradisionalnya. Terlepas dari plus minusnya sistem pendidikan pesantren tradisional, yang jelas sistem pendidikan pesantren tradisional di Bekasi pada masa Orde Baru, minimal dapat mempertahankan eksistensinya dan membantu negara dalam hal mencerdaskan anak bangsa dengan bermuara pada akal, nilai, dan moral.

Dampak dari berkembangnya pola semi-modern pada sistem pendidikan pesantren dimasa Orde Baru dan setelahnya bisa disimpulkan menjadi lima, yaitu : *pertama*, Peminat pesantren di Bekasi semakin banyak, disebabkan pesantren memiliki banyak kelebihan dibanding sekolah lainnya, seperti belajar agama, ketrampilan (*life skill*), dan mendapat ilmu umum. *Kedua*, pesantren bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. *Ketiga*, pesantren dapat mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional dan eksistensinya di Bekasi. *Keempat*,

¹⁷⁵ Rizal, *op.cit.*, hlm. 109.

¹⁷⁶ Berdasarkan diskusi dengan santri Attaqwa Pusat Putra langsung di lapangan/pesantren Attaqwa.

lulusan madrasah dan pesantren menjadi serba nanggung. *Kelima*, berkurangnya waktu pembelajaran kitab kuning.



BAB 5

KESIMPULAN

Dalam bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari skripsi ini akan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan pada bab pertama dengan melihat uraian mengenai perkembangan sistem pendidikan pesantren dari berbagai masa pada bab kedua, ketiga, dan keempat dalam skripsi ini.

Pesantren merupakan sistem pendidikan yang tertua dan asli Indonesia, sistem pendidikan pesantren tradisional yang sudah ada sejak masa pra-Islam di Indonesia ini mengalami perkembangan-perkembangan dalam waktu yang lama. sewaktu dengan kedatangan Belanda beserta sistem pendidikan Barat memberikan persaingan yang berarti bagi sistem pendidikan pesantren tradisional, sehingga pada masa sebelum Kemerdekaan telah terjadi perubahan zaman dengan masuknya sistem pendidikan modern yaitu masuknya sistem klasikal pada sistem pendidikan pesantren tradisional.

Sistem pendidikan modern mulai mendapat dukungan lebih dari kalangan kaum *mujaddid* yang melihat sistem pendidikan pesantren tradisional sudah tidak relevan lagi dan harus digantikan dengan sistem pendidikan modern. Para *mujaddid* mengkritik berkaitan dengan lamanya belajar di pesantren yang lamanya puluhan tahun, dan tidak berhenti di sistem jenjang pendidikan saja, melainkan juga kurikulum dengan berorientasi pada kitab-kitab kuning, menurut kaum itu kitab-kitab kuning sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman dan harus kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Tidak hanya berhenti pada kritikan tersebut, juga terdapat asumsi dan stigma negatif bahwa sistem pendidikan pesantren tradisional "alergi" terhadap perubahan dan disebut sarang kejumudan.

Pesantren merespon kritikan tersebut diatas, dengan adaptasi secara arif, dengan menolak kritikan tersebut tetapi mengadopsi sistem pendidikan umum yang sedang trend pada masanya. Misalnya, memakai sistem klasikal, kurikulum dan silabus serta tahun ajar yang lebih jelas. Di sisi lain, ciri-ciri pesantren berikut unsur-

unsur kelembagaannya tidak bisa dipisahkan dari sistem kultural (tradisi lama) dan tidak dapat pula dilekatkan pada semua pesantren secara uniformitas karena setiap pesantren memiliki keunikannya masing-masing, tetapi pesantren secara umum memiliki karakteristik yang hampir sama, di antara karakteristik pesantren itu dari segi: a) materi pelajaran dan metode pengajaran, b) jenjang pendidikan, c) fungsi pesantren, d) kehidupan kiai dan santri. Karakteristik tersebut mengalami perkembangan atas respon pesantren menerima modernisasi pendidikan, tetapi hanya dalam skala yang sangat terbatas, sebatas mampu menjamin pesantren dapat bertahan.

Pada masa Orde Baru, mulai bermunculan jenis pesantren baru produk alam modern; pesantren yang tumbuh berkembang di perkotaan, pesantren yang tidak sekedar mengkaji *kitab kuning* (literatur klasik), tetapi juga mengkaji non-*kitab kuning* (literatur modern). Lalu pesantren memasukkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah umum untuk berjalan beriringan dengan sistem pendidikan pesantren tradisional. Hal ini disebabkan pemerintah Orde Baru meneruskan sistem pendidikan umum yang dibawa oleh kolonial Belanda, untuk dapat mengontrol pesantren agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Penguasa Orde Baru tidak menyukai kalangan agamawan khususnya kalangan pesantren, disebabkan kekuatan Islam dapat mengganti penguasa Orde Baru.

Pesantren mengikuti perkembangan zaman pada masa Orde Baru dengan mempertahankan watak mandiri, menolak bantuan dana yang berorientasi politik, membatasi intervensi penguasa pada sistem pendidikannya, dan menjaga warisan tradisi-tradisi keislaman pesantren. Misalnya, tradisi literatur klasik tetap diajarkan di pesantren walau pesantren juga mengajarkan literatur modern. sehingga dalam konteks perkembangan kesejarahan, pesantren merespon kebijakan Orde Baru sesuai dengan dinamikanya, dalam artian ada pesantren yang merespon secara akomodatif dan ada juga pesantren yang merespon secara defensif. Ada pesantren yang meresponnya dengan merevisi kurikulumnya dan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum dan membuka kelembagaan serta fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kependidikan umum. Pada sisi yang lain, ada pesantren yang tetap melakukan peran bertahan dengan mempertahankan substansi pendidikan tradisional.

Perkembangan yang telah dijabarkan di atas, telah mempengaruhi perkembangan pesantren At-Taqwa, Annida Al-Islamy, dan Perguruan Islam el-Nur el-kasyyaf. Ketiga pesantren ini, menggunakan sistem pendidikan tradisional dan agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta supaya dapat berkembang lebih besar, memasukkan sistem pendidikan umum yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional untuk dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Walau memasukkan sistem pendidikan umum, pesantren turut pula menyesuaikan diri dengan keadaan zamannya sebagai prasyarat agar dapat tetap eksis. Penyesuaian diri ini tidak membuat ketiga pesantren ini meninggalkan tradisi pesantrennya yang menekankan pada metode pembelajaran tradisional yang berupa *sorogan* dan *bandongan* dan tujuan sebagai lembaga pendidikan agama yang *taffaquh fiddin*. Ketiga pesantren ini lebih suka dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang bukan tradisional dan bukan pula lembaga pendidikan modern yang menekankan pada *life skill*. Sehingga ketiga pesantren ini terus dapat membedakan diri dengan sekolah umum yang sekuler. Hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi ketiga pesantren ini dalam menarik minat masyarakat masuk pesantren dan tetap menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat serta bukan pula sebagai lembaga pendidikan yang sarang kejumudan justru tetap menjadi pencetak cendikiawan-cendikiawan muslim yang tidak hanya ahli agama tetapi juga melek teknologi.

Maka sistem pendidikan yang lebih dominan dipergunakan di pesantren-pesantren Bekasi adalah sistem pendidikan pesantren tradisional yang berdampingan dengan sistem pendidikan umum atau disebut dengan sistem pendidikan pesantren semi-modern.

DAFTAR REFERENSI

Arsip

Amsar, Muhammad Muhadjirin, *Sejarah Singkat Perjalanan Hidup : diary perjalanan hidup Syekh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary*, dokumentasi Pondok Pesantren Annida Al-Islamy, Bekasi, 2007.

Anwar, Ali, *K.H. Noer Alie Kemandirian Ulama Pejuang*, Dokumentasi Yayasan Attaqwa, cetakan kedua, Bekasi, Juli 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Artikel/makalah/jurnal

"Pesantren dalam Bingkai Politik Birokrasi dan Pendidikan Islam di Indonesia", dalam *Jurnal ATTARBAWI*, vol. 7 No. 1 : Mei 2008-Oktober 2008.

"The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation", dalam jurnal *The Journal of Asian Studies*, vol. 55, No. 3 (Aug, 1996), pp. 613-634.

"Transformasi Corak Edukasi dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* vol. 9 No. 2-2011.

"Wacana: Nasionalisme dan Penafsiran." Wacana Jurnal ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 7 No. 1, April 2005.

Zainuddin, Tubagus, "Peran Syekh Muhammad Muhadjirin Amsar Addary dalam Pengembangan Kajian Hadis Melalui Karya-Karyanya." Makalah Jurusan Tafsir-Hadits Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008. Hlm. 19

Majalah/surat kabar

"Pendidikan Islam Setelah Seabad Kebangkitan Nasional" dalam *Masyarakat Indonesia; Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, jilid XXXIV, No. 2, 2008.

Buku:

Abdullah, Taufik, *Islam dan masyarakat : pantulan sejarah Indonesia*. LP3ES. 1983

- Abdusshomad, Muhyiddin, *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi*, Surabaya: Khalista, 2008.
- Abdus Salam , Ahmad Nahrawi al-Indunisi, Penerjemah: Usman Sy'roni, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta Islamic Centre, Penerbit Hikmah, 2008.
- Ahmad, Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, PT LkiS Pelangi Aksara, 2004.
- Arifin, Muzayyin, *Kapita Selektu Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bion Aksara, cetakan ketiga, 1995.
- Basori, Ruchman, *THE FOUNDING FATHER Pesantren Modern Indonesia Jejak Langkah K.H.A. Wahid Hasyim*, Inceis, 2006.
- Badudu, J.S., *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Maret 2003.
- Bisri, A. Mustofa, *Koridor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Januari 2010.
- Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, Yogyakarta: Galang Press, Cet. II, Agustus 2004.
- Frick, Heinz, *Arsitektur Dan Lingkungan*, Kanisius, 1988.
- Iskandar, Mohammad, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, MATABANGSA, 2001.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, LkiS, 1994.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS: Jakarta, 1994.
- Muhaemin, *Al-Qur'an dan Hadis untuk Kelas VII MTs*, Jil. 1.-ed. 1.-Cet. 1.-Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Mursidi, *Sistem pendidikan Pesantren tradisional sebagai alternative pola pendidikan Islam di Indonesia (Studi pada pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta)*, Magister Studi Islam UII, Tidak diketahui tahun.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1984.

_____, *Sejarah Nasional Indonesia V.-cet.-2 Edisi Pemutakhiran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rohadi Abdul Fatah, M. Tata Taufik, Abdul Mukti Bisri, *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan: dari Tradisional, Modern, Hingga Post Modern*, Listafariska Putra, 2005.

Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Pustaka Sastra LkiS Yogyakarta, cet. Ke-2, 2007.

Siroj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan aspirasi*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. 1. September 2006.

Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*; penerj, Lilian D. Tedjasudhana. Jakarta: INIS, 2004.

Surya, Hendra, *Menjadi Manusia Pembelajar*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.

Steenbrink, Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah pada masa Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1974.

Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi : Esai-esai Pesantren*, LkiS, 2001.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, PT LkiS Pelangi Aksara, 2004.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Dirjen Binbaga Islam Depag, Jakarta, 1986.

Sumber Wawancara

KH. Aiz Muhadjirin. (7 Juni 2012, pukul 20.00). Pengasuh Pesantren Annida Al-Islamy dan Putra KH Muhadjirin Amsar Addary. Wawancara melalui email.

Kiteng. (2 Juni 2012, pukul 17.30). pemilik kantin Annida Al-Islamy yang menetap dan tinggal didalam komplek Pesantren Annida Al-Islamy sejak tahun 1986, sekaligus santri.

- H. Abdul Rahman. (2 Juni 2012, pukul 15.30), Alumni dan Murid KH Muhadjirin Amsar Addary pada tahun 2000.
- Mahfuzh Syafii. (2 Juni 2012, pukul 16.00), Alumni dan Murid KH Muhadjirin Amsar Addary, kini menjadi Lurah Pondok Annida Al-Islamy.
- Drs. Roshid. (7 Juni 2012, pukul 14.00), Alumni dan Murid KH Dawam Anwar yang kini menjadi pengurus YAPINK bidang Kurikulum sejak tahun 1980-an.
- KH. Sahid. (7 Juni 2012, pukul 16.30), mantan wakil pimpinan YAPINK dan badal KH Dawam Anwar sejak berdirinya YAPINK, Murid pertama KH Dawam Anwar.
- Haris (De Nash). (7 Juni 2012, pukul 21.30), Alumni, Guru di MTs YAPINK dan pengurus asrama.
- Ella. (7 Juni 2012, pukul 16.000,) Alumni TK, MTs, dan MA YAPINK.
- Khaerul Umam Noer. (18 Juni 2012, pukul 13.00), Alumni MI, MTs, dan MA Attaqwa Pusat Putra. Dan cucu KH Noer Alie.
- Fauzi, Sahrul (9 Juni 2012, pukul 18.30) Santri kelas 2 Aliyah Attaqwa Putra dan Pengurus Santri Bidang Kesenian pesantren Attaqwa.

Sumber Internet

www.attaqwaputra.sch.id

www.attaqwaputri.sch.id

www.almarhalah.net

www.yapink.net

<http://ikpma-mesir.blogspot.com>

<http://gepista915.blogspot.com>

<https://sites.google.com/site/awanuddinahmadaddaraji>

Lampiran 2 PP RI No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1991
TENTANG
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak.
2. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah.
3. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.
4. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan luar sekolah di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan luar sekolah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan luar sekolah bertujuan:

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

BAB III
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga belajar dalam bidang tertentu.
- (3) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

- (4) Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.
- (2) Jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan fungsinya ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 7

- (1) Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik.
- (2) Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu terdiri atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan dan kewenangan yang disahkan oleh Pemerintah maupun yang tidak disahkan.
- (3) Jenis tenaga pendidik yang memerlukan pengesahan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik tertentu yang karena kebutuhan kualifikasi tertentu, diwajibkan mendaftarkan diri pada instansi yang ditunjuk oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

BAB VI WARGA BELAJAR

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat menjadi warga belajar baik dengan maupun tanpa memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi warga belajar pada satuan pendidikan luar sekolah tertentu ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 10

- (1) Warga belajar mempunyai hak:
1. belajar secara mandiri;
 2. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
 3. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 4. pindah ke jalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 11

- (1) Warga belajar berkewajiban untuk:
1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali warga belajar yang dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
 2. mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. menghormati tenaga kependidikan;
 4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat tertulis dan tidak tertulis.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 13

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) Kurikulum yang tidak termasuk dalam ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VIII BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kursus

Pasal 14

- (1) Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Warga belajar pada kursus yang menyelenggarakan program Paket A dan B dimungkinkan untuk pindah ke jalur pendidikan sekolah.

Pasal 15

- (1) Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkat kemampuan yaitu, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada kursus-kursus tertentu diatur oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 16

- (1) Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga kependidikan, kurikulum dan alat penunjang belajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Bagian Kedua Kelompok Belajar

Pasal 17

Kelompok belajar diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja dan/atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan dasar diselenggarakan pada kelompok belajar Paket A dan kelompok belajar Paket B.
- (2) Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
- (3) Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Lain

Pasal 19

Selain kursus dan kelompok belajar, pendidikan luar sekolah dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan satuan pendidikan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Terhadap hasil belajar warga belajar dapat diadakan penilaian yang dapat dinyatakan dengan surat keterangan lulus, ijazah atau sertifikat.
- (2) Terhadap satuan pendidikan yang memerlukan pengesahan dari Pemerintah diadakan penilaian.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan umum merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan merupakan tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (3) Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan merupakan tanggung jawab Menteri Agama.
- (4) Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja untuk memenuhi persyaratan jabatan kerja tertentu merupakan tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja.
- (5) Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan merupakan tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) meliputi pemberian bimbingan, dorongan pengayoman dan/atau bantuan.
- (7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan secara terkoordinasi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional bagi warga belajar warga negara Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 24

- (1) Warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan luar sekolah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional baik di dalam maupun di luar negeri wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan luar sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 25

- (1) Perwakilan negara asing di wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga internasional atau badan/kelembagaan swasta asing di wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua ketentuan yang mengatur pendidikan luar sekolah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 95

Lampiran 3 UU RI No.2 Tahun 1989 tentang SISDIKNAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional;
4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;
5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama;
11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB III HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
- (2) Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.

- (3) Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
- (3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (4) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
- (7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (8) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.

- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.
- (3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 16

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

- (3) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (4) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (5) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
- (6) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- (7) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
- (8) Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Sekolah tinggi, institute dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (3) Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 18

- (1) Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
- (2) Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (3) Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
- (4) Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (5) Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
- (6) Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Pasal 21

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
- (2) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:

1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penuaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
 1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 3. menghormati tenaga kependidikan;
 4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

- (1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
- (3) Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak berikut:

1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:

- a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
- b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
- c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
 2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
 4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

1. membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 32

- (1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VIII SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Pasal 34

- (1) Buku pelajaran yang digunakan pada pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 37

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

Pasal 39

- (1) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama; dan
 - c. pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
 - a. pendidikan Pancasila;
 - b. pendidikan agama;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. membaca dan menulis;
 - f. matematika (termasuk berhitung);

- g. pengantar sains dan teknologi;
 - h. ilmu bumi;
 - i. sejarah nasional dan sejarah umum;
 - j. kerajinan tangan dan kesenian;
 - k. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - l. menggambar; serta
 - m. bahasa Inggris.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40

- (1) Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
- (2) Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 41

Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.

Pasal 42

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB XII PENILAIAN

Pasal 43

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.

Pasal 44

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.

Pasal 45

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48

- (1) Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

BAB XV
PENGELOLAAN

Pasal 49

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.

Pasal 50

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
- (3) Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Lampiran 4 Brosur PP Attaqwa Pusat Putra

Tenaga Pengajar

Pondok Pesantren Attaqwa Putra diasuh dan dibimbing oleh tenaga pengajar yang berpendidikan S.1 dan S.2 baik dalam negeri seperti DIM, IPB, STAISIA, LIPIA, UNISMA, UNJ, STAIA, UIJ, PTA, UNINUS, maupun luar negeri seperti Al-Azhar Kairo, Damaskus Syiria, Islamabad Pakistan, dan lain-lain yang berpengalaman dan kompeten di bidang pendidikan.

Kegiatan & Lembaga Penunjang

Urgensi kegiatan ekstra kurikuler adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kreativitas siswa serta untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dilengkapi pula dengan Lembaga-lembaga yang turut membantu proses aktualisasi potensi siswa. Adapun program dan lembaga penunjang itu adalah:

Kegiatan-kegiatan

- Muhadoroh 3 bahasa
- Pramuka
- Seni kaligrafi
- Musabaqah (lathan berpidato)
- Marching Band
- Marawis
- Hadroh

Lembaga-lembaga Penunjang

- Persatuan Pelajar Attaqwa/PPA (organisasi setaraf OSIS)
- Devan Ambalan dan Dewan Penggalang (DA-DP)
- Sanggar Ketertampilan & Kaligrafi
- Lembaga Jurnalistik Attaqwa (LIJA)
- Bengkel Teater Attaqwa (BETA)
- Lembaga Ilmu al-Quran Attaqwa (LIQA)
- Lembaga Retorika Da'wah Attaqwa (LERKDA)
- Orkes Gambus Marawis Ar-Roja

Persyaratan Pendaftaran

CALON PESERTA PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN 2010 - 2011

- Mengisi Formulir pendaftaran
- Membayar administrasi pendaftaran dan Fatrah Ta'aruf Rp. 185.000,-
- Menyerahkan fotokopi ijazah dilegalisasi 3 lembar
- Menyerahkan fotokopi SKHU 3 lembar
- Menyerahkan pas foto hitam putih 3x4 = 3 lbr dan 2x3 = 3 lbr
- Mengikuti tes seleksi yang meliputi: Al-Qur'an, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika dan Tes Akademik
- Bersedia dikeluarkan dari seleksi penerimaan siswa baru bila tidak lulus UN.

Bagi Siswa yang lulus seleksi, maka harus:

- Mengisi daftar riwayat hidup dengan lengkap
- Menyerahkan surat pernyataan (khusus walimurid) dibawah materai 6.000,-
- Menyerahkan foto kopi akte kelahiran
- Menyerahkan Surat Keterangan berkelakuan Baik dari sekolah asal (bagi siswa pindahan)
- Membayar Administrasi keuangan

Waktu Belajar

Pagi : 07.15 - 12.00
 Siang : 16.00-17.30
 Malam : 18.30-20.00
 Sabtu : 05.00 - 06.00 (Khusus Siswa Muakim)



YAYASAN ATTAQWA PUSAT PONDOK PESANTREN ATTAQWA PUTRA MTS. & MA ATTAQWA PUSAT PUTRA Terakreditasi "A" UNGGULAN

Menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011

Waktu Pendaftaran

■ **GELOMBANG I**
 Mulai Februari 2010 s/d 17 April 2010
 Setiap hari kerja dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB
 Tes Seleksi : 18 April 2010
 Pengumuman : 25 April 2010

■ **GELOMBANG II**
 Mulai 19 April 2010 s/d 12 Juni 2010
 Setiap hari kerja dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB
 Tes Seleksi : 13 Juni 2010
 Pengumuman : 20 Juni 2010



Tempat Pendaftaran :
 Jl. KH. Noer Alie, Ujung Harapan Desa Bahagia
 Kec. Babelan Kab. Bekasi 17612
 Telp. (MTS) 021 - 89134895, (MA) 021-8920391, 0813 89354511, 0812 88552058

Pembukaan

Pondok Pesantren Attaqwa Putra berdiri sejak tahun 1940. Pendirinya adalah Al-Marhum Al-Maghfurah K.H. Noer Alie, seorang tokoh masyarakat Bekasi yang dituluki Singa Karawang Bekasi.

Ketokohan K.H. Noer Alie diakui oleh dunia internasional dan nasional. Dipangung nasional beliau mendapatkan anugerah sebagai Pahlawan Nasional & Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan KEPPRES RI. No. 085 /TK/TAHUN 2006 yang diresmikan pada tanggal 10 November 2006.

Visi, Misi & Tujuan

Pondok Pesantren Attaqwa Putra mempunyai Visi, Misi & Tujuan :

Visi :
 Ikhlas, Berdzikir Berfikir dan Beramal

Misi :
 Membina, mengembangkan dan memelihara masyarakat madani yang ikhlas, berdzikir, berfikir dan beramal shaleh melalui pendidikan, dakwah kegiatan ekonomi dan sosial, dalam menuju baidatun thayyibatun warobun ghafur.

Tujuan :

- Menjadikan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT beramal shaleh, berbudi luhur, dapat bekerja di dunia dengan baik dan menuai pahala di akhirat kelak.
- Membantu Pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa.
- Mendidik siswa agar ber-akhlaq al-karimah dan berilmu pengetahuan.
- Mempersiapkan siswa agar bisa dan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat.
- Mempersiapkan siswa agar bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.
- Mengembangkan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang: Tahsinul Qiroah, Al-Qur'an, Tahfidz Al-Qur'an dan al-hadits, qiroah al-kutub, Tahfidz Alfiah, pidato tiga bahasa, drama, organisasi, olahraga, dan lain-lain.

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan Pondok Pesantren Attaqwa Putra adalah kurikulum integrasi (Integrated Curriculum), yaitu kurikulum perpaduan antara kurikulum Depag, Diknas dan kurikulum internasional yang berafiliasi ke Timur Tengah. Dengan Integrated Curriculum, siswa diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun diluar negeri dan dapat hidup berkembang dalam membangun Masyarakat.

Program Studi

A. Program Jurusan :

- IAI : Studi yang menitikberatkan ilmu-ilmu agama.
- IPA : Program studi yang menitikberatkan pada praktek ilmu-ilmu eksakta.
- IPS : Program studi yang menitikberatkan pada pengkajian ilmu-ilmu sosial.

B. Program Siswa Berprestasi

Wadah yang disediakan oleh Pondok Pesantren yang diproyeksikan bagi siswa yang berprestasi dan memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu. Diharapkan menjadi life skill santri di masyarakat dan merupakan bekal awal dalam meneruskan jenjang akademisnya kelak. Pada sisi lain tentunya menjadi duta-duta Attaqwa dalam berbagai perlombaan, kompetisi dan olimpiade. Adapun bidang tersebut adalah:

- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Qiroat kutub
- MIPA (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam)
- Sain Tek
- Tahfidz al-Qur'an
- Tahfidz al-Fiyah
- Tahfidz al-Hadits
- Azrafati

Sarana & Prasarana

Kelengkapan Pondok Pesantren Attaqwa Putra adalah:

- Gedung milik sendiri
- Perpustakaan Nasional - Lab. Bahasa Arab, Komputer, Lab. IPA Fisika/Biologi
- Laboratorium Bahasa - Lab. Otomotif
- Lahan yang luas, asri dan alami
- Full Day School
- Kepercayaan masyarakat yang tinggi dan teknologi, life skill dan ilmu agama sebagai bekal hidup di masyarakat.
- Kesempatan kerja luas.
- Lulusnya dapat melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

Lampiran 5 Brosur Perguruan Islam el-Nur el-Kasyfah

Profil YAPINK

YAPINK berdiri kokoh di atas tanah wakaf di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Lembaga Pendidikan ini telah berdiri sejak tanggal 20 Februari 1969 dan dirintis oleh H. Abdillah Mas'ud (Alm.), KH. Moh Dawam Anwar (Alm.), H. Marzuki Alam (Alm.), H. Ahmad Sadei (Alm.), serta H. Abd. 'Alim (Alm.) serta beberapa tokoh lainnya. Melihat dari sejarah panjang berdirinya YAPINK, betapa sangat pesat pertumbuhannya saat ini, bahkan hingga kini Lembaga Pendidikan YAPINK telah memiliki 9 cabang, yang tersebar dari Lampung Utara, Lampung Selatan, Jakarta Utara, Bekasi, hingga ke Cikampek. Selain itu, dari tahun ke tahun jumlah murid dan alumuninya terus bertambah masing-masing mampu bergilang di berbagai lapisan masyarakat dan aneka ragam profesi.

Menegok latar belakang dan sejarah tujuan didirikannya YAPINK adalah untuk membentengi aqidah masyarakat Tambun-Bekasi dan sekitarnya, serta segenap lapisan masyarakat pada umumnya dengan aqidah Islamiyah yang benar-benar lurus, selain itu, lembaga YAPINK ini senantiasa mengajarkan siswa didiknya pada pembelajaran pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah serta terhadap doktrin ahlus sunnah wal-jama'ah.

Sering dengan perkembangan yang pesat, serta muatan kurikulum keagamaan yang kuat dan mendalam, Lembaga Pendidikan YAPINK mampu mendapatkan "madalah/kreditasi" atau penilaian kualifikasi kesetaraan dari Al-Azhar University, Mesir sejak tahun 1996 hingga sekarang sehingga dengan kesepakatan ini memungkinkan YAPINK untuk dapat mengizinkan alumni-alumni madrasah aliyahnya secara otomatis ke Al-Azhar University, Kairo Mesir tanpa melalui tes di negeri tersebut, baik secara beasiswa penuh ataupun biaya tanggungan pribadi.

Sekretariat Pendaftaran:
Jalan Sultan Hasanuddin No. 226
Pusat Perk. Tambun (021) 88326564
Pondok Putra (021) 88322623
Tlx. (021) 88332265

Keuntungan Belajar di YAPINK

- Mendapatkan Ijazah SMP dan SMA Diknas, Serta Ijazah MTS dan MA YAPINK.
- Mendapatkan Bimbingan Akhlak Islami khas pesantren.
- Mendapatkan dasar penanaman UMTAQ yang kuat serta penguasaan yang memadai di bidang ITEX.
- Mendapatkan tutorial khusus agar mahir berpidato 3 bahasa (Indonesia, Arab, Inggris).
- SMA-MA YAPINK telah mendapatkan nilai "A" dari pemerintah terkait.
- Ijazah MA YAPINK telah mendapat Muadalah/standarisasi dari Al-Azhar University, Mesir, Universitas Islam Madinah KSA, UIN Pakistan, Universitas Zaitunyah Tunisia.
- Ijazah INISA telah mendapat Muadalah/standarisasi dari Cairo University, Mesir dan Universitas Liga Arab, Mesir.

Lain-lain

Ruang Belajar antara pelajar putra dan putri terpisah Tahun Ajaran sesuai dengan kalender Diknas
Ditambahkan bagi pelajar untuk menetap di asrama (sistem boarding school) agar lebih intensif

Syarat Pendaftaran

- Memper Formlir Pendaftaran
- Menyerahkan Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 (2 lbr)
- Menyerahkan foto copy STTB / surat tanda kelulusan dari sekolah / fotocopy raport yang dilegalisir oleh sekolah
- Melakukan Ulang pendaftaran

Denah Lokasi

WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai sejak brosur diedarkan
Dibuka pendaftaran setiap hari kecuali hari libur nasional
Pagi Pukul 08.00 - 12.00
Siang Pukul 14.00 - 16.00

Kurikulum YAPINK

Kurikulum yang digunakan di YAPINK merupakan gabungan kurikulum Diknas yang berorientasi KTSP dengan kurikulum YAPINK yang telah mendapat standarisasi dari Lembaga Pendidikan Al-Azhar University, Mesir, dan kurikulum YAPINK ini menggabungkan ekstrakurikuler sains dan modern.

Kitab-kitab kepenalaran yang diajarkan di YAPINK antara lain: Al-Qur'an wa Tafsir, Tafsir Jalalain, Ulum at-Tafsir, Hadits Jawahir al-Bukhari, Hadits Tajrid ash-Sharih, Tawhid Ummul Barahin, Tauhid al-Haqq al-Hamidiyah, Fiqh Fathul-Mu'in, Fiqh Fathul-Qarib, Ushul Fiqh Chayzad, Washul, Ushul Fiqh As-Sullam, Qawaid Fiqh Al-Jayyah wan-nashari, Ushul wa Qawaid Fiqh Al-mobani' al-dawaliyyah, Hawah Al-fiyah Ibnu Malik wa Ibnu Aqil, Nahwu Qawaid al-lughah al-Arabiyah, Hikmah Tasiri', Tarikh Tasiri', Siyash, Ahlak Mirhajul-Husain, Ahlak Ta'limu-Mata' al'im, Adab Ihtatun-Nasyi' in, Fariidh mastan ar-rahayah, dan lain-lain.

Pola Pendidikan

Untuk membentuk generasi Muslim yang memiliki iman yang kokoh, unggul, berakhlakul karimah, dan rela berjuang guna membea agama, bangsa, dan negara, serta demi mencapai ridha Allah SWT, maka Al-Qur'an dan Al-Hadith dijadikan sebagai sumber referensi utama dalam menata arah kehidupan, serta jithad dan perjuangan para ulama ahlussunnah wal-jamaah sebagai arah pengabdian, di samping hasil riset dan inovasi para ilmuwan modern dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi menuju perubahan yang lebih baik. Pola pendidikan di lingkungan YAPINK ini dibangun dengan mengombinasikan pendidikan Ukhrawi dan duniawi, pendalaman kitab klasik dan kontemporer, serta pendekatan konvensional dan modern.

Extra Kurikuler

- Seni Baca-Ai-Qur'an, Pengajian Kitab Turats dan Kontemporer
- Majelis Zikir dan Shalawat
- Teknik Pidato 3 Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris)
- Seni Kaligrafi Arab
- Seni Beladiri
- Kursus Jurnalistik
- Kursus Komputer (Lab Komputer)
- Kursus Bahasa Asing (Lab Bahasa)
- Asesmen Qasidah / Hadrah
- Maharwis / Drumband
- Kursus Tata Boga
- Olahraga (Sepakbola Futsal, Bola Basket, Bola Voli, Tenis Meja, Bulu Tangkis, dll).

Kitab-kitab Yang Digunakan

A. Tingkat Tsanawiyah	B. Tingkat Aliyah
1. Tafsir Jalalan	1. Tafsir Jalalan
2. Musnad Hamediyah	2. Ummul Barohi Lughosy
3. Fathul Qarib	3. Fatawa Mariri
4. Jawahiri Bekhari	4. Tarikh Sharih
5. Mabadi' Awaliyyah	5. Al-Ajabbul-Mawozzhair
6. As-Sullam	6. Ghoyathul-Wahid Fritenti tashul
7. Makna al-fiyah	7. Syarah Bu 'Aqil li al-fiyah
8. Ihtatun-Nasyi'in	8. Mirhajul-Muslim
9. Ibnu Manziy berahim	9. Ibnu Manziy berahim
10. Qawaid Lughah al-Arabiyah	10. Al-Balaghosul-Wahidiah
11. Mirhajul-Mughith	11. Tarikh Tasiri'
12. Ilmu Tasri'	12. Hikmah Tasri'
13. Al-Amshah al-Tasri'iyah	13. Kamus Arab-Indonesia
14. dll.	14. dll.

Staff Pengajar

Untuk menjamin kualitas siswa didik maka staf pengajar di lingkungan YAPINK berlatar belakang dari berbagai universitas dalam dan luar negeri di antaranya: INISA, UIN, UNPAD, UIN, Univ. Al-Azhar Kairo Mesir, UIN Madinah KSA, Univ. Khoutum Sudan, dan lainnya sesuai dengan spesialisasi bidangnya masing-masing.

Fasilitas Sekolah

- Ruang kelas yang luas dan nyaman
- Arama putra dan asrama putri
- Ruang pertemuan yang representatif
- Lab bahasa, OHP, led proyektor, dll
- Lab komputer dengan jaringan internet dan hotspot
- Lapangan futsal, basket, dan sarana olahraga lainnya
- Ruang aula pertemuan
- Masjid (siswa) dan mushola (siswi)
- Tempat parkir dan kantin
- Sarana bermain anak
- Pos kesehatan pesantren
- Koperasi dan kantin siswa

Lampiran 6 Gradasi Kitab didalam Sistem halaqah di Ponpes Annida Al-Islamy selama masa Orde Baru

Grade I (dasar), disebut juga “*I’ dadiyyah*”

- a) Fikih : *Safina al-Naja,*
- b) Tauhid : *Tijan al-Dari, Jawahir al-Kalamiyyah,*
- c) Hadits : *Arba’in al-Nawawi,*
- d) Tata bahasa Arab : *Sharaf Kailani, Al-Jurumiyyah, Matan Bina, Nuzum al-Maqshud,*
- e) Akhlak : *Akhlak lil-Banin (khusus santriwan), Akhlak lil-Banat (khusus santriwati), Ta’lim al-Muta’allim,*
- f) Tarikh Islam : *Nur al-Yaqin,*

Grade II (Menengah), disebut juga “*Wustho*”

- a) Tafsir : *Tafsir Jalalain*
- b) Fikih : *Kifayatul Akhyar, Minhaj al-Thalibin,*
- c) Tauhid : *Kifayatu; ‘Awam, Bidayah al-Hidayah,*
- d) Akhlak : *Fath al-Majid, ‘Uqud al-Lujain (untuk santriwati), Tanbih al-Ghafilin,*
- e) Hadits : *Riyadh al-Shalihin, Bulugh al-Muram,*
- f) Qawa’id : *Imrithy, Mutammimah.*

Grade III (Lanjutan), disebut juga “*Ulya*”

- a) Tafsir : *tafsir al-Maraghi,*
- b) Fikih : *Fath al-Qarib,*
- c) Akhlak : *Ihya’u Ulumuddin,*
- d) Hadits : *Bukhari wal Muslim,*
- e) Usul Fikih : *Bidayatul Mujtahid,*

Grade IV (Keahlian Khusus), disebut juga “*Takhashshus*”

- a) Fikih : *Al-Umm,*
- b) Tasawwuf : *Ihya’u Ulumuddin,*
- c) Usul Fikih : *ar-Risalah, al-Mustasyfa,*
- d) Qawa’id : *Alfiyyah ibnu Malik, Jam’ul-Jawami’,¹*

¹ Rizal, *op.cit.*, hlm. 100.

Lampiran 6.1 Gradasi Kitab didalam Sistem campuran (halaqah dan klassikal) di Ponpes Annida Al-Islamy setelah masa Orde Baru

NO	Gradasi Kelas	Nama Kitab
	Kelas 1 Tsanawiyah/SMP	
1		Matan Al Jurumiyah
2		Amtsilat Al Tashrif
3		Matan Bina wal Asasi
4		Safinatu Al Najah
5		Hidayah Al Mustafid
6		Al Muthola'ah
7		Al Arba'in Al Nawawi
	Kelas 2 Tsanawiyah	
1		Mukhtashor Jiddan
2		Al Kaylani
3		Al Muthola'ah
4		Al Mahfuzhot
5		Matan Al Jurumiyah
6		Hidayah Al Mustafid
7		Ghoyah Wa Taqrib / Fathu Al Qorib
8		Mukhtar Al Hadits
9		Irsyad Al Anam
10		Ayyuha Al Walad
11		Akhlaq Lil Banin
	Kelas 3 Tsanawiyah	
1		Al Kafrawi
2		Al Kawakib
3		Mishbah Al Zhulam
4		Bulugh Al Maram
5		Tafsir Al Jalalain
6		Fathu Al Qorib
7		Ta'lim Al Muta'alim
8		Al Kaylani
9		Irsyad Al Anam
10		Mukhtar Al Hadits
11		Al Mahfuzhot
12		Matan Al Jurumiyah
	Kelas 1 Aliyah/SMA	
1		Al Asmawi
2		Fathu Al Qorib
3		Taysir Al Wushul Fi 'Ilmi Al Ushul
4		Tafsir Al Jalalain
5		Mishbah Al Zhulam
6		Ta'liqot 'Ala Matni Al Baiquni
7		Al Idzkar
8		Irsyad Al Anam
9		Sunan Abi Daud
10		Nahwu Al Wadhi'

11		Alfiyah Ibn Malik
	Kelas 2 Aliyah	
1		Syarah Ibnu 'Aqil
2		Mishbah Al Zhulam
3		Al Iqna
4		Shohih Al Bukhori
5		Sunan Abi Daud
6		Al Waroqot
7		Al Idzkar
8		Ta'liqot 'Ala Matni Al Baiquni
9		Nuzhat Al Muttaqin
10		Al Sulam Al Niroin
11		Asna Al Matholib
12		Tafsir Al Munir
	Kelas 3 Aliyah	
1		Fathu Al Mu'in
2		Syarah Ibnu 'Aqil
3		Mishbah Al Zhulam
4		Al Iqna
5		Shohih Al Bukhori
6		Al Idzkar
7		Sunan Abi Daud
8		Nuzhat Al Muttaqin
9		Tafsir Al Munir
10		Asna Al Matholib
	Takhashsus	
1		Irsyad Al Fuhul
2		Al Um
3		Bahru Al Muhit
4		Hasyiah Al Shibban
5		Rudd Al Mukhtar
6		Ihya 'Ulumudin
7		Muntaha Al Irodad
8		Tafsir Ibn Katsir
9		Nuzhat Al Muttaqin
10		Tafsir Ayat Al Ahkam
11		Nashoihu Al 'Ibad
12		Syarah Ibn Aqil
13		I' anat Al Tholibin dan Alluma'

Lampiran 7 Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara untuk KH Aiz Muhadjirin, SH. MH. sebagai pengasuh Annida Al-Islamy, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Ponpes Annida Al-Islamy ?,
 Pesantren Annida Al Islamy berdiri pada tahun 1963. Awal berdirinya ketika Pesantren Bahagia yang merupakan pesantren tertua di Bekasi mengalami kevakuman bahkan akan ditutup. Kevakuman ini disebabkan meninggalnya salah satu tokoh utama / pendiri Pesantren Bahagia, yaitu KH. Abdurrahman Shodri, yang tidak lain adalah ayah mertua dari KH. Muhammad Muhadjirin. Saat itu KH. Muhammad Muhadjirin merupakan salah satu guru di Pesantren Bahagia. Melihat kondisi Pesantren Bahagia yang mengalami stagnan bahkan cenderung kurang baik, karena lokasi Pesantren Bahagia berdekatan dengan markas tentara, maka akhirnya asset Pesantren Bahagia dijual oleh pengurus (kecuali KH. Muhammad Muhadjirin) dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengurus lainnya.
 Setelah seluruh asset dijual dan dikuasai oleh pengurus lain, maka KH. Muhammad Muhadjirin dengan berbekal tekad dan kesetiaan dari sebagian murid-muridnya (ex Pesantren Bahagia), memindahkan kegiatan belajar mengajarnya di rumah mertuanya (KH. Abdurrahman Shodri) di Jl. Ir. H. Juanda 124 A Bekasi.
 Berdasarkan hal tersebut, maka berdirinya Pesantren Annida Al Islamy merupakan kelanjutan “marwah” dari Pesantren Bahagia dari segi kegiatan belajar mengajar dan penyebaran ilmu pengetahuan, namun bukanlah pesantren yang berdiri atas pelimpahan asset Pesantren Bahagia.
2. Apa tujuan dan arah pendidikan pesantren selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Pesantren Annida Al Islamy didirikan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mau belajar mengenal dan memahami Islam. Sesuai dengan nama “Annida” yang dapat diartikan “seruan / panggilan”. Adapun arah pendidikan di Pesantren Annida Al Islamy banyak mengadopsi “fan” / mata pelajaran di Mekkah dan Madinah saat KH. Muhammad Muhadjirin belajar. Kekayaan khazanah pemahaman Islam dari berbagai mazhab melahirkan sikap toleransi diantara berbagai macam faham keIslaman. Arah pendidikan itulah yang hendak dicapai oleh KH. Muhammad Muhadjirin melalui kurikulum yang dirancangnya.
3. Seperti apa struktur kepengurusan pesantren selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Struktur Kepengurusan terbagi menjadi 6 bagian :
 1. Pimpinan / Mudir : KH. Muhammad Muhadjirin
 2. Ketua Harian Pesantren Putra. Dibantu oleh bidang-bidang.
 3. Ketua Harian Pesantren Putri. Dibantu oleh bidang-bidang.
 4. Kepala Madrasah Tsanawiyah. Dibantu oleh para wakil.
 5. Kepala Madrasah Aliyah. Dibantu oleh para wakil.
 6. Ketua Ma’had ‘Aly. Dibantu oleh para wakil.
4. Apa dan bagaimana kurikulum dan sistem pengajaran di pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Kurikulum pendidikan yang dirancang oleh KH.Muhammad Muhadjirin banyak dipengaruhi oleh kurikulum Mekkah dan Madinah. Namun demikian tujuan dari kurikulum tersebut tidak diarahkan untuk “hanya” membenarkan salah satu pandangan atau mazhab saja, melainkan untuk memunculkan sikap toleransi terhadap pelbagai pandangan/mazhab tersebut.

5. Bagaiamanakah sistem jenjang pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

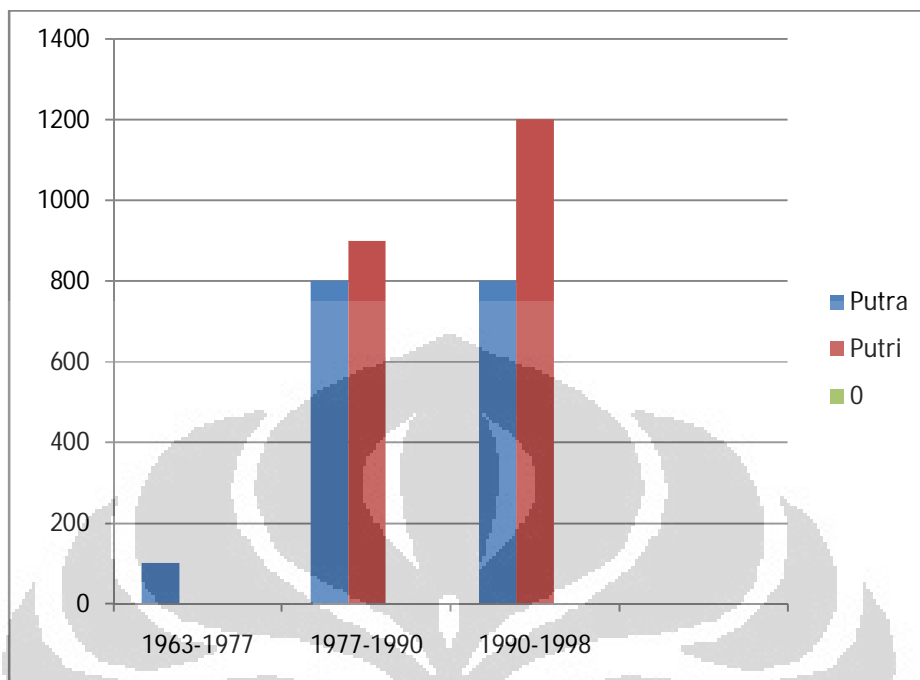
Jenjang pendidikan dimulai dari :

- TPQ
- Madrasah Tsanawiyah
- Madrasah Aliyah
- Ma'had Aly (Perguruan Tinggi)

6. Seperti apa kalender pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Kalender pendidikan yang dipergunakan adalah sesuai dengan kalender pendidikan madrasah yang menginduk ke Departemen Agama, sehingga waktu awal belajar, libur, dan akhir tahun pelajaran sejalan dengan kalender pendidikan nasional. Namun demikian, khusus untuk setiap tanggal merah non Islam, Pesantren Annida Al Islamy tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan.

7. Bagaimana perkembangan jumlah santri yang bermukim di Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin pada dekade 1970-an, 1980-an, dan 1990-1998 ?, adakah terjadi penurunan drastis jumlah santri ataukah sebaliknya ?, akan lebih baik disertai data jumlah penerimaan santri selama dekade tersebut di atas.



8. Bagaimanakah kehidupan santri di pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?, dan apa jadwal harian dan mingguan santri ?

Kehidupan santri berjalan normal seperti layaknya pesantren lain. Khidmat seorang santri kepada Kiai sangat kuat. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan santri yang begitu mandiri sehingga seluruh urusan rumah tangga kewanitaan ditangani langsung oleh para pengurus yang notabene santri.

Jadwal kegiatan harian, mingguan, bulanan santri dapat dilihat di www.almarhalah.ac.id/pesantren.

9. Pernahkah pesantren mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Orde Baru ?

Bantuan semasa orde pernah didapat Pesantren Annida Al Islamy, namun bukan dalam bentuk bantuan fisik (pembangunan), hanya bantuan berupa buku, kitab, laboratorium IPA dan bahasa.

10. Pernahkah Syekh Muhadjirin berpolitik selama masa Orde Baru ?

KH. Muhammad Muhadjirin selama hidupnya tidak pernah terjun ke partai politik atau menjadi tim sukses salah satu calon pemimpin.

11. Pada tahun 1980-an, apakah pesantren merasa terpinggirkan dan dipinggirkan oleh pemerintah Orde Baru, khususnya Pemerintah Kota Bekasi ?

Secara jujur dapat kami sampaikan bahwa Pesantren Annida Al Islamy tidak pernah merasa terpinggirkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa Pesantren Annida Al Islamy sejak mulai berdiri sampai saat ini tidak pernah bergantung dengan Pemerintah dalam berbagai bidang. Termasuk dalam penentuan ibadah pun, seperti penentuan awal ramadhan dan Syawal, Pesantren Annida Al Islamy sangat mandiri, sehingga tidak terganggu dengan “intervensi” Pemerintah dalam proses ibadah, dan belajar mengajar. Prinsip kemandirian inilah yang menjadikan Pesantren Annida Al Islamy sangat nyaman dengan atau tanpa perhatian Pemerintah.

12. Bagaimana sikap dan langkah pesantren dalam mengantisipasi sistem pendidikan modern pada zaman Orde Baru ?

Pesantren Annida Al Islamy berpandangan bahwa kelangsungan hidup dan belajar santri harus diutamakan. Oleh karenanya seluruh perubahan kurikulum sejak zaman orde lama samapai dengan orde baru senantiasa diikuti. Ijazah sebagai syarat formal bagi setiap alumni pun senantiasa mengikuti sistem pendidikan modern, walaupun diakui pada awalnya membutuhkan waktu untuk dapat sinkron dengan administrasi pendidikan modern.

13. Selama masa Orde Baru, apakah pesantren mendirikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, seperti; pertanian, peternakan, agri bisnis, koperasi, dan pengembangan ekonomi lainnya melalui badan pengembangan pesantren dan masyarakat ?

Tidak.

14. Pada pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah pesantren turut berperan aktif ?, dan atau apakah pesantren memasukkan teknologi yang sesuai dengan kurikulum pesantren, misalkan teknologi dalam bidang Astronomi ?

Teknologi sebagai salah satu perkembangan ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian serius. Hal ini terlihat sejak awal tahun 1990, Pesantren Annida telah memperkenalkan komputer kepada para santri. Terkait dengan masalah ilmu falak (astronomi), Pesantren Annida Al Islamy pun terbuka dan concern terhadap perkembangan ilmu tersebut. Pengadaan teropong bintang dilakukan pada pertengahan tahun 1994 dan dilengkapi dengan teori-teori modern tentang ilmu astronomi, seperti epimeris dan lainnya.

15. Apakah terjadi pembaharuan sistem pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Sistem pendidikan di Pesantren Annida Al Islamy senantiasa beradaptasi dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang dirancang oleh Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional (saat itu). Namun demikian khusus untuk kurikulum agama, maka dipengaruhi juga oleh telah selesainya suatu kajian terhadap kitab-kitab tertentu dan dilanjutkan dengan kajian terhadap kitab-kitab berikutnya.

16. Bagaimana Latar Belakang pesantren Bahagia ? benarkah KH Abdurrahman Shodri diperintahkan mendirikan pesantren bahagia? dan mengapa pesantren bahagia berhenti beroperasi?

Latar belakang berdirinya Pesantren Bahagia adalah saat kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh dunia Internasional pasca KMB 1949, hubungan baik terjalin antara KH.Abdurrahman Shodri dengan KH.Noer Ali. Hubungan ini tidak hanya sebatas perkawanan saja namun juga ide-ide dalam dunia politik maupun pendidikan. Dalam dunia politik, keduanya merupakan tokoh Masyumi di wilayah Bekasi dan di zaman perang kemerdekaan pun mereka berdua aktif dan merupakan tokoh Hizbullah. Kebersamaan ini berlangsung terus sampai dengan munculnya ide untuk mendirikan lembaga pendidikan agama (Pesantren) yang pada akhirnya diberi nama Pesantren Bahagia.

Pesantren Bahagia vakum setelah meninggalnya KH.Abdurrahman Shodri. Akibatnya muncul perbedaan pandangan antara KH.Muhammad Muhadjirin dengan tokoh lainnya yang pada akhirnya Pesantren Bahagia tutup.

17. Apa latar belakang keluarnya KH. Muhadjirin dari pesantren bahagia ?

Ketidaksesuaian dalam mengelola Pesantren bahagia pasca wafatnya KH.Abdurrahman Shodri. Keluarnya KH.Muhammad Muhadjirin dari Pesantren Bahagia (bahkan tutup) diikuti oleh sebagian besar santri-santri ex Pesantren bahagia, sehingga pada awal berdirinya Pesantren Annida Al Islamy, KH.Muhammad Muhadjirin telah memiliki murid atau santri.

18. Sejak Kapan Pesantren Annida Al-Islamy mengikuti Ujian Negeri ?

Pesantren Annida Al-Islamy mengikuti Ujian Negeri sejak tahun 1979, sewaktu itu para santri mengikutinya bukan di madrasah Annida Al-Islamy, tetapi bergabung dengan MTsN dan Man. Pengaruhnya bagi Annida

19. Adakah penyederhanaan pelajaran? jika ada sejak kapan atau sebaliknya ?

Kalau pengurangan pelajaran sejak awal yang terjadi justru adanya pengembangan pelajaran. Contohnya fiqih, terdapat fiqih kitab, kurikulum, dan faroid. Apabila ada beberapa pesantren yang menyederhanakan pelajaran, misalkan Nahwu, Sharf, I'rob, Muthola'ah, balaghoh, mantiq, qiroah lalu disatukan menjadi Bahasa Arab saja. Oh engga, jika di Annida pelajaran tersebut masih berdiri sendiri sampai dengan sekarang. Sehingga yang ada adalah pengembangan pelajaran, pengembangan ini mulai jelasnya sejak mulainya saat Annida sudah melaksanakan Ujian Negara, sehingga kurikulum nasional menjadi keharusan untuk dilaksanakan.

Lampiran 8

Transkripsi wawancara dengan bapak kiteng (sekitar 55 tahun), sebagai saksi sejarah pesantren Annida pada 1985 hingga sekarang.

1. Pernahkah pesantren Annida mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Orde Baru ?
Kalau tahun 1980-an hingga 1994 tidak ada, tapi pernah pada tahun 1995 pesantren mendapatkan bantuan berupa ayam kampung yang jumlahnya 10 ekor untuk dijadikan awal dari program pembangunan ekonomi, tapi tidak berjalan sesuai rencana karena pada akhirnya ayam itu di potong dan dimakan bersama santri, lalu ada bantuan untuk pembangunan perpustakaan, tetapi belum bisa dibangun.
2. Pernahkah KH Muhadjirin berpolitik di pesantren dengan ikut partai politik?
Gak ada sama sekali, Pak kiai tidak pernah ikut berpolitik.
3. Pada tahun 1980-an, apakah pesantren merasa dipinggirkan oleh pemerintah Orde Baru?
Tidak, malah pesantren disayang oleh pemerintah, cuman pak kiai menolak bantuan sumbangan yang ada embel-embel lain lah. Karena biasanya itu jatuhnya partai.
4. Bagaimana sikap pesantren dalam mengantisipasi sistem pendidikan yang dianut pemerintah?
Karena pak kiai disini bener-bener mau mengajarkan agama Islam, jadi Islam saja yang dipentingkan, yang lainnya seperti pelajaran Bahasa Inggris bukan nolak hanya saja masih dipertimbangkan oleh pak kiai.
5. Apakah madrasah di pesantren tidak bersedia mengikuti dan menyesuaikan kurikulumnya dengan pola kurikulum pemerintah tetapi membuat sendiri sesuai dengan idealisme pesantren yang bersangkutan?
Pada zaman dulu, pak kiai bukan berarti tidak bersedia mengikuti akan tetapi masih banyak pertimbangan, karena pelajaran-pelajaran kitab masih banyak yang diajarkan untuk anak didik.
6. Apakah ada batas usia untuk mondok di pesantren?
Pada zaman dulu (zaman KH Muhadjirin Amsar Addary) gak ada perbatasan sampe begitu kawin kalo masih mondok itu gak boleh. Batasnya tuh kawin.
7. Apakah pesantren mensosialisasikan propaganda pembangunan pemerintah Orde Baru? Dengan program sosial ekonomi? Atau mendirikan lembaga swadaya masyarakat?
Tidak ada, karena murni dari pak kiai semuanya yang saya tahu.
8. Apakah pesantren memiliki program usaha pertanian?
Gak ada. Intinya di sini untuk ngaji
9. Pada pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah pesantren turut berperan aktif ?, dan atau apakah pesantren memasukkan teknologi yang sesuai dengan kurikulum pesantren?
Teknologi modern semacam elektronik tidak ada dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup juga tidak aktif, yang ada teknologi untuk melihat bulan semacam teropong bintang, karena di sini ada mata ajar Falak (astronomi).
10. Apakah pesantren pernah membangun masyarakat sekitar ?
Itu jelas udah pasti ada, itu emang dah tujuan, seperti membangun akhlak masyarakat.

Lampiran 9

Wawancara dengan H. Abdul Rahman (alumni dan murid KH Muhadjirin)

1. Bagaimana belajar di pesantren Annida dengan Syeikh Muhadjirin Amsar Addary?
Belajar di pesantren annida, lebih banyak belajar pada kitab-kitab kuning saja, sedangkan untuk belajar pelajaran umum sudah ada di madrasah, hanya saja pelajaran agama lebih seimbang dengan umumnya. Lalu ada pelajaran yang tidak ada di sekolah lain yaitu pelajaran falak untuk melihat bulan, semacam metode penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. beliau adalah ulama yang pertama kali mengemukakan pendapat bahwa bulan (baca:hilal) dalam ilmu falak dapat dilihat dengan ukuran 2 derajat dengan langsung menggunakan mata kepala dan bantuan alat tradisional. Dalam hal ini tidak sembarangan orang dapat melihat hilal pada derajat tertentu, semua itu memerlukan tahapan-tahapan dalam waktu yang tidak sebentar, ilmu ini pun diajarkan di Annida Al-Islamy dan merupakan mata pelajaran wajib pesantren.
2. Apakah cara belajar di madrasah dengan di pondok sama atau berbeda ?
Madrasah dan pondok menggunakan manajemen desentralistis, jadinya masing-masing punya otonomi agar tidak tercampur sistem belajarnya.
3. Bagaimana latar belakang berdirinya Ponpes Annida Al-Islamy ?,
Pesantren Annida Al Islamy berdiri pada tahun 1963. Awal berdirinya ketika Pesantren Bahagia yang merupakan pesantren tertua di Bekasi mengalami kevakuman bahkan akan ditutup. Kevakuman ini disebabkan meninggalnya salah satu tokoh utama / pendiri Pesantren Bahagia, yaitu KH.Abdurrahman Shodri, yang tidak lain adalah ayah mertua dari KH.Muhammad Muhadjirin. Saat itu KH.Muhammad Muhadjirin merupakan salah satu guru di Pesantren Bahagia. Melihat kondisi Pesantren Bahagia yang mengalami stagnan bahkan cenderung kurang baik, karena lokasi Pesantren Bahagia berdekatan dengan markas tentara, maka akhirnya asset Pesantren Bahagia dijual oleh pengurus (kecuali KH.Muhammad Muhadjirin) dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengurus lainnya.
Setelah seluruh asset dijual dan dikuasai oleh pengurus lain, maka KH.Muhammad Muhadjirin dengan berbekal tekad dan kesetiaan dari sebagian murid-muridnya (ex Pesantren Bahagia), memindahkan kegiatan belajar mengajarnya di rumah mertuanya (KH.Abdurrahman Shodri) di Jl.Ir.H.Juanda 124 A Bekasi.
Berdasarkan hal tersebut, maka berdirinya Pesantren Annida Al Islamy merupakan kelanjutan “marwah” dari Pesantren Bahagia dari segi kegiatan belajar mengajar dan penyebaran ilmu pengetahuan, namun bukanlah pesantren yang berdiri atas pelimpahan asset Pesantren Bahagia.
4. Apa tujuan dan arah pendidikan pesantren selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
Pesantren Annida Al Islamy didirikan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mau belajar mengenal dan memahami Islam. Sesuai dengan nama “Annida” yang dapat diartikan “seruan / panggilan”. Adapun arah pendidikan di Pesantren Annida Al Islamy banyak mengadopsi “fan” / mata pelajaran di Mekkah dan Madinah saat KH.Muhammad

Muhadjirin belajar. Kekayaan khazanah pemahaman Islam dari berbagai mazhab melahirkan sikap toleransi diantara berbagai macam faham keIslaman. Arah pendidikan itulah yang hendak dicapai oleh KH.Muhammad Muhadjirin melalui kurikulum yang dirancangnya.

5. Apa dan bagaimana kurikulum dan sistem pengajaran di pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Kurikulum pendidikan yang dirancang oleh KH.Muhammad Muhadjirin banyak dipengaruhi oleh kurikulum Mekkah dan Madinah. Namun demikian tujuan dari kurikulum tersebut tidak diarahkan untuk “hanya” membenarkan salah satu pandangan atau mazhab saja, melainkan untuk memunculkan sikap toleransi terhadap pelbagai pandangan/mazhab tersebut.

6. Bagaimanakah sistem jenjang pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Ya jenjangnya dari sekitar tahun 1990-an yang saya tau.

- TPQ
 - Madrasah Tsanawiyah
 - Madrasah Aliyah
 - Ma'had Aly (Perguruan Tinggi)
7. Seperti apa kalender pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
Kalendernya kalau tidak salah menginduk ke Departemen Agama, tetapi untuk hari libur hanya pada hari libur nasional yang mengenai dua hari raya Islam dan hari libur Islam.
8. Apa pengertian maqulat ?
Maqulat secara bahasa artinya pengertian atau yang dikatakan. Dalam mantiq dipakai dengan arti mahmul. Contoh dalam *ta'rif Mahiyah* : *Mahiyah* adalah apa yang dikatakan (*ma yuqolu*), atas jawaban *ma huwa*, yang dimaksud *ma yuqolu* adalah *ma yuhmalu*.

Lampiran 10

Haris (De Nash) sebagai alumni dan pengurus guru YAPINK

1. Apa yang membuat anda memilih bersekolah di YAPINK ?

Karena landasan pendidikan YAPINK berlandaskan aqidah Ahlulsanah Wal Jama'ah.

2. Apa artinya YAPINK berpedoman kepada Qonun Nahdlatul Ulama dan Hasil Mukhtamar NU ?

Landasan Aswaja memang ditanamkan oleh sang pendiri yaitu Almarhum K.H. Dawam Anwar. Soal Qonun dan hasil Mukhtamar tidak ada kaitan, hanya saja YAPINK kebetulan berjubah NU karena NU berlandaskan pada aqidah Aswaja juga.

3. Karena latar belakang K.H. Dawam yang PMII ya ?

Karena Aswaja adalah wasiat Rasul, dan almarhum adalah ulama yang Insya Allah memahami Islam yang baik dan benar. Terkait aktifitas IPNU, IPPNU, GP Anshor, PMII, PBNU, PPP dan PKB, itu semua merupakan "kendaraan" dakwah *Li'ilaikalimatillah* yang sama-sama berlabel Aswaja. Saya tidak bermaksud berlebihan dengan apa yang saya sampaikan, namun semua berdasar pada data dan fakta yang saya temukan dan telah dipahami oleh setiap orang yang mengenal almarhum almaghfurlah.

Lampiran 11

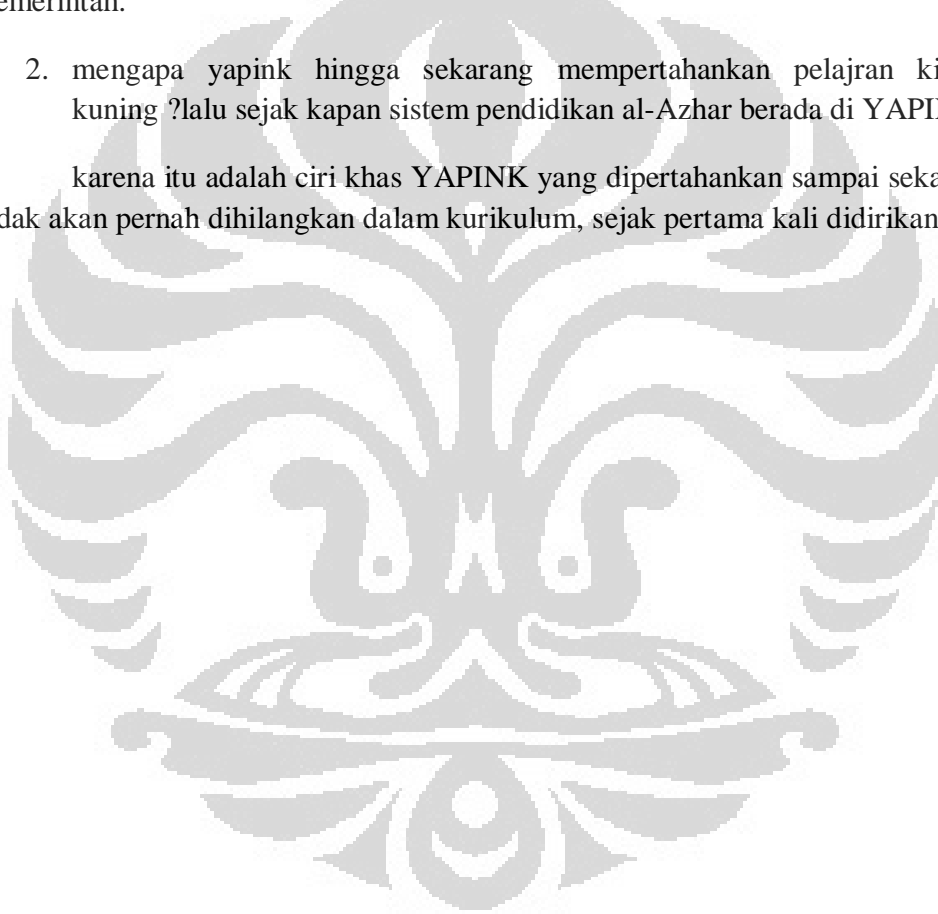
Ella sebagai alumni YAPINK.

1. Apa yang membuat anda memilih bersekolah di YAPINK ?

saya pilih sekolah di YAPINK mulai ibtidaiyah sampai perguruan tinggi INISA, karena memang keinginan saya sekolah di bidang agama n tuntutan dri keluarga juga, kenapa pilih YAPINK karna kurikulumnya yang sampai sekarang masih mempertahankan pelajaran kitab2 kuning tanpa lepas dari kurikulum pemerintah.

2. mengapa yapink hingga sekarang mempertahankan pelajaran kitab-kitab kuning ? lalu sejak kapan sistem pendidikan al-Azhar berada di YAPINK ?

karena itu adalah ciri khas YAPINK yang dipertahankan sampai sekarang dan tidak akan pernah dihilangkan dalam kurikulum, sejak pertama kali didirikan.



Lampiran 12

Wawancara dengan KH Sahid (sekitar 75 tahun)

1. apa tujuan KH Dawam Anwar menjadi pengasuh YAPINK ?

Dalam memelihara dan mengembangkan ajaran dan cita-cita Nahdlatul Ulama (NU) serta di samping ada isu-isu akan didirikannya tempat ibadah non-Muslim di kawasan Tambun yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dibutuhkan kader-kader yang akan mengusungnya. Karena itu pada 20 Februari 1969, sesepuh dan tokoh NU seperti H. Abdillah Mas'ud (mertua Alm. KH. Drs. Moh. Dawam Anwar), dan dihadiri oleh Alm. H. Ahmad Sadeli, Alm. H. Marzuki Alam, Alm. H. Abd. 'Ain, Ust. Bukhori, BA, dan beberapa tokoh lainnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dinamai Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf.

2. Berapakah jumlah santri dari awal berdirinya YAPINK hingga tahun 1998 ?

Pada awalnya, jumlah santrinya tidak terlalu banyak, dimana pada tahun 1969 sampai 1972 total hanya ada 40 santri dan pada tahun 1972 sampai 1975 total hanya ada 20 santri. Peningkatan baru ada pada tahun 1975 sampai 1978, dimana rata-rata per tahun ada 30 santri. Lalu pada tahun 1980-an sampai 1990 meningkat menjadi 100 santri per tahun, dan setelah tahun 1990 sampai 1998 meningkat menjadi ratusan santri per tahunnya.

3. Kapan YAPINK ijasahnya diakui oleh negara ?

Sejak ijasahnya diakui oleh negara ya sejak dari dulu, pada generasi pertama YAPINK sekitar tahun 1972 itu mengikuti ujian negeri di Cirebon, lalu pada generasi kedua YAPINK, ujian negeri di pesantren sendiri dan waktu itu belum ada pesantren di Bekasi yang mengadakan ujian negeri.

4. Seperti apa pengajarannya YAPINK pada masa Orde Baru?

Pengajaran di YAPINK mengikuti pengajaran di pesantren Tebuireng yang dulu pada tahun 1950-an hingga awal berdirinya perguruan Islam el-nur el-Kasysyaf karena KH Dawam Anwar alumni disana. Menggunakan cara sorogan dan bandongan.

Lampiran 13

Sahrul Fauzi, santri kelas 2 Aliyah di Attaqwa dan pengurus santri bagian Kesenian.

1. Apa yang membuat anda memilih bersekolah di YAPINK ?

saya pilih mondok karena memang cita-cita saya pengen jadi kiai terus tuntutan dari keluarga juga, kenapa pilih attaqwa karna gak jauh dari rumah saya, masih di Bekasi,.

2. Bagaimana proses pembelajaran di pesantren Attaqwa ?

Proses Pembelajaran disini dimulai abis Sholat Subuh ber'jama'ah, bertempat dimasjid, para santri duduk masing-masing kelasnya dengan membentuk lingkaran (*halaqah*) untuk mengikuti pengajian pagi. Pengajian pagi biasanya dipimpin oleh K.H. Nurul Anwar. Yang duduk ditengah para santri untuk memimpin pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an bersama (*tadarus*), setelah itu ngaji Al-Qur'an selesai pak kiai baca, kemudian para santri mengikuti bersama-sama, setelah itu santri yang bertugas menerjemahkan dan menafsirkan kandungan ayat yang telah dibaca tadi, tampil kedepan secara bergantian untuk menerjemahkan dan menafsirkan ayat yang telah dibaca tersebut. Nah abis itu barulah pak kiai ceramah tentang isi kandungan ayat yang telah dibaca tadi. ngajinya sampai satu jam dari ba'da Shubuh sampai dengan pukul 06.00 WIB. Pengajian pagi ini dilaksanakan setiap pagi sampai dengan hari Jum'at pagi. Setelah itu para santrti melakukan Shalat Duha berjama'ah yang mereka lakukan pada pukul 07.00 WIB.

Sedangkan belajar di Madrasah setiap hari kecuali hari libur (Minggu) yang dimulai dari pagi hari dari pukul 07.30 s/d 12.00 WIB. lalu pada siang hari dari pukul 13.30 s/d 15.30 WIB. Setelah sebelumnya para santri terlebih dahulu melakukan Sholat Zuhur berjama'ah di masjid jami' At-Taqwa serta istirahat sejenak untuk makan siang didapur umum. terus dilanjutkan pada malam hari dari pukul 18.30 s/d 22.00 WIB. Besok paginya para santri kembali melakukan aktivitas yang sama. Kegiatan tersebut dilakukan santri secara terus-menerus selama proses belajar berlangsung kecuali hari libur (Minggu), dimana pada setiap hari libur (miggsu). Ketika hari libur para santri di sini banyak yang beristirahat di kamar, ada yang tidur, selain itu ada juga santri yang bersantai sambil menonton televisi atau mendengarkan musik, serta ada juga santri yang mempergunakannya dengan berolah raga, mencuci pakaian, serta ada pula santri yang mempergunakakannya untuk pulang ke rumah mereka.

Lampiran 14

Wawancara dengan Drs. H. A. Rosyid Thaha, M.Mpd. (69 tahun, pengurus YAPINK juga pembuat kurikulum Perguruan Islam el-Nur el-Kasysyaf, Dekan Fakultas Adab INISA, salah satu saksi sejarah YAPINK)

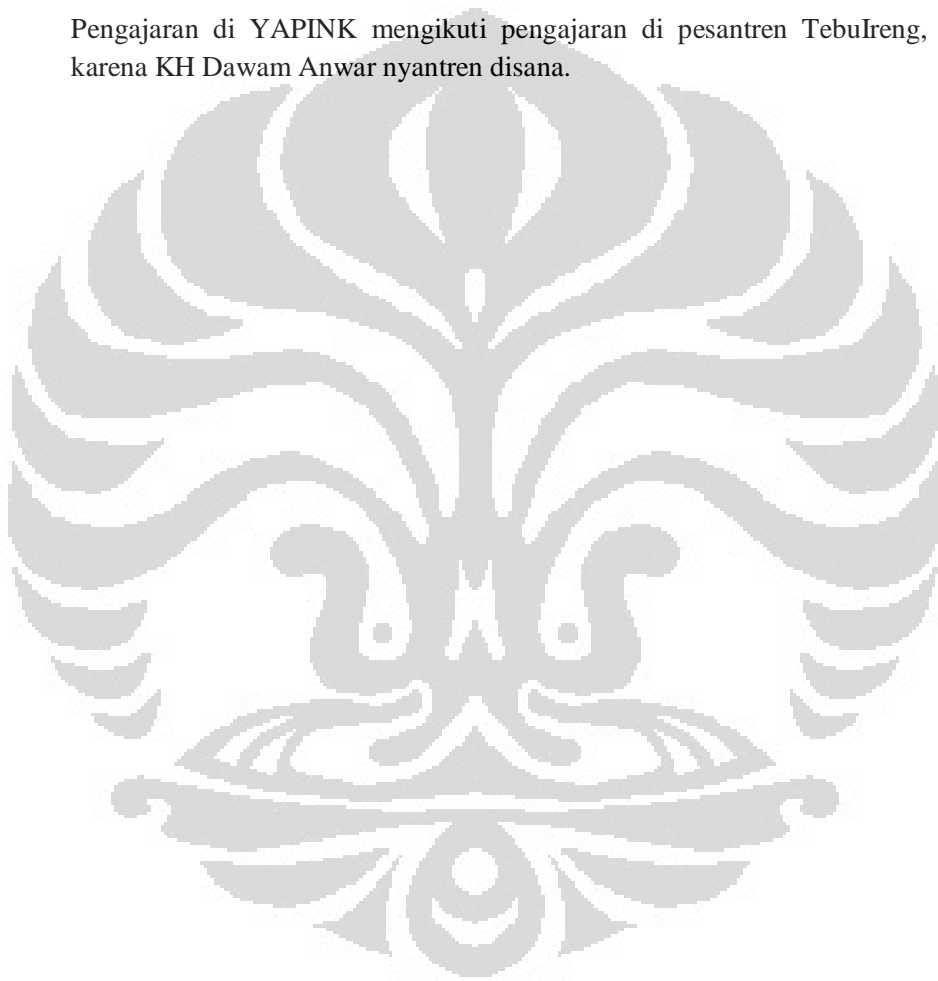
1. Kapan YAPINK ijasahnya diakui oleh?
Seingat saya generasi pertama YAPINK sekitar tahun 1972 itu mengikuti ujian negeri di Cirebon, lalu pada generasi kedua YAPINK mengadakan ujian negeri di pesantren sendiri dan waktu itu belum ada pesantren di Bekasi yang mengadakan ujian negeri.
2. Kapan ijazah YAPINK diakui oleh negara?
Ijazah YAPINK saat diakui oleh negara terjadi di generasi kedua santri YAPINK, generasi kedua itu kalau seingat saya sekitar tahun 1975-an.
3. Berapa kira-kira jumlah rata-rata santri di era 70-an, 80-an, dan 90-an?
Perkembangan santri pada tahun 70-an masih sekitar puluhan santri, sebab santri generasi pertama itu jumlahnya 40 orang dari kelas 1 Tsanawiyah sampai kelas 3 Tsanawiyah jumlahnya segitu tidak ada penambahan, dan yang lulus hanya 24 orang saja. Ketika mendirikan madrasah Aliyah muridnya hanya empat dan yang lulus hanya dua orang, yang mulai banyak itu di era 80-an ketika YAPINK mendirikan UNISA dengan empat fakultas ;Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Dakwah, namun perkembangannya hanya Fakultas Tarbiyah dan Adab yang ada hingga saat ini.
4. Kapan sekolah umum YAPINK didirikan ?
Sekolah umum itu hanya menjadi sampingan saja untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, SMP YAPINK didirikan sekitar pertengahan tahun 80-an, saya lupa kapan tepatnya.
5. Adakah pergeseran tujuan pesantren pada masa Orde Baru ? jika ada alasan dan dampaknya apa? Dan apakah hal ini menjadi trend di Bekasi?
Pergeseran hanya dihal teknis saja untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Sedangkan tujuan pesantren tetap sama dan takkan berubah hingga saat ini, salah satu tujuannya adalah mencetak ahli agama Islam yang berfaham *Ahlussunnah wal jama'ah*. Namanya juga pesantren, tidak bisa lepas dari memperjuangkan syariat Islam. Ketika adanya Asas Tunggal Pancasila, pesantren mengikuti ormas NU yang menerima Pancasila.
6. Apakah ada penyederhanaan/perubahan kurikulum pada masa Orde Baru? Jika ada apakah pembagiannya 70% agama jadi 30% agama? Kapan dan apa dampaknya?
Perubahan kurikulum YAPINK tidak banyak berubah, kurikulum madrasah nya mengikuti ketentuan dari Departemen Agama, tetapi jika kurikulum non-formal YAPINK tidak ada perubahan, dampaknya ada yaitu permintaan dari pemerintah untuk menjadikan madrasah YAPINK sebagai Madrasah Negeri, lalu guru-guru disini diminta menjadi PNS, tetapi KH Dawam Anwar tidak mau dan menolak permintaan itu.

7. Apakah ada perubahan dalam sistem gradasi ? dari sistem kitab ke sistem kelas? Apa dampak dan reaksinya?

Perubahannya ada yaitu, sistem gradasi kitab yang mengikuti sistem kelas, artinya kitab diajarkan dikelas dengan pembagian per bab, misalkan kelas 1 tsanawiyah mempelajari kitab *Jurumiyah* di Bab satu hingga sampai bab tiga, lalu nanti dilanjutkan ke bab selanjutnya. Hingga selesai dan naik ke tingkat kitab yang lebih tinggi lagi, begitu terus hingga kitab tingkat tinggi yang diajarkan di INISA.

8. Seperti apa pengajarannya YAPINK pada masa Orde Baru?

Pengajaran di YAPINK mengikuti pengajaran di pesantren Tebuireng, Jombang, karena KH Dawam Anwar nyantren disana.



Lampiran 15

Wawancara dengan Khaerul Umam Noer (sekitar 27 tahun, eks santri Attaqwa dari Raudlatul Athfal hingga Madrasah Aliya Attaqwa dan sekretaris yayasan Perguruan Attaqwa 49 serta cucu KH Noer Alie yang mengurus arsip, dokumen, dan perpustakaan Pesantren Attaqwa), pada hari selasa, 19 Juni 2012.

1. Di pesantren mana Ustadzah Sholehah Noer dan KH Amin Noer dulu dikirm KH Noer Alie ?

Ustadzah dan Kiai itu dulu nyantren di pesantren Muallimat bagi ustadzah dan Muallimin bagi kiai Amin Noer.

2. Sejak kapan PP Attaqwa mengikuti Ujian Negeri ?

Kalo UN dah lama, kalo ga salah dari 1990, tapi masih numpang di sekolah lain, setahu saya sih, angkatan 1998 sudah ujian di Attaqwa, ga ke sekolah lain.

3. Adakah pro dan kontra gak bang, attaqwa ngadain UN ?

Untuk masa lalu barangkali iya, tapi rasanya bukan karena pergeseran ya, tp masalah apakah ijazah negeri memang dibutuhkan atau gak, para alumni angkatan awal memang tidak perlu ijazah negeri, tapi untuk masa sekarang sih ga ada masalah, dulu memang Attaqwa dikenal dengan ijazah pondok, tapi sejak 1999 dua ijazah jadi hal yang biasa.

4. Kapan masuknya pelajaran umum di Attaqwa ?

Pada tahun 1980-an masa kepemimpinan KH. Noer Alie, pesantren ini mulai merintis sistem pengajarannya yang hanya berfokus pada materi kitab-kitab kuning berkembang dengan masuknya materi pelajaran non-kitab kuning, contohnya materi pelajaran bahasa Inggris dan ekonomi. Ah iya seingat saya tahun 1980-an sudah ada guru bahasa Inggris dan Ayah saya dulu mengajar ekonomi akuntansi (dulu tata buku hitung dagang) sampai tahun 1996, logikanya seharusnya materi itu sudah diajarkan sejak lama, juga sudah ada guru Arab Melayu karena ada beberapa kitab yang diterjemahkan ke Arab pegon dan Bahasa Indonesia, jadi artinya materi itu sudah ada, materi umum seperti PMP/P4 rasanya sudah ada sejak 1990-an, sebab waktu Mts (tahun 1997-1999) saya pernah belajar.

5. Apa ada kejadian pengurang kitab atau penyederhanaan mata pelajaran ?

Dalam daftar mata pelajaran tersebut, sebetulnya terdapat beberapa mata pelajaran yang termasuk dalam satu kategori. Misalnya *Qawafy* dan *Faraidh*, termasuk dalam kategori pelajaran *Faraidh*. Akan tetapi, kenyataannya masing-masing merupakan memiliki materi ajar yang berbeda, ada materi khusus madrasah dan ada juga materi pondok, sehingga terjadi dua kali ujian

dalam satu mata pelajaran *Faraidh*, satu pelajaran tetapi dua materi yang digabung, misalkan ketika menggunakan materi dari kitab, maka materi dari buku ajar ditutup. Lalu misalnya *Nahwu*, *Balaghoh*, *Manthiq*, termasuk dalam kategori pelajaran Bahasa Arab, bahkan terdapat juga pelajaran Bahasa Arab. Kemudian disederhanakan menjadi dua kategori pelajaran, yaitu *Nahwu* dan Bahasa Arab.

6. Bagaimana dengan kalender pendidikan di Attaqwa ?

Perubahan ini mendapat respon yang alot dari PP Attaqwa, ini dikarenakan baru pada tahun 1997-1998, PP Attaqwa melaksanakan perubahan dengan cara menambah durasi belajar dari setahun menjadi satu setengah tahun, hal ini mendapat reaksi kekesalan dari para santri yang disebabkan harusnya telah selesai tutup kitab hingga dibuka kembali untuk diulang kembali.



Lampiran 16

Daftar pertanyaan wawancara untuk Mahfuzh Syafii. sebagai lurah pondok Annida Al-Islamy, sebagai berikut :

9. Bagaimana latar belakang berdirinya Ponpes Annida Al-Islamy ?,
 Pesantren Annida Al Islamy lahir pada tahun 1963. Karena Pesantren Bahagia yang merupakan pesantren tertua di Bekasi gulung tikar. Kenyataan ini karena meninggalnya KH.Abdurrahman Shodri, ayah mertua dari KH.Muhammad Muhadjirin. Saat itu KH.Muhammad Muhadjirin merupakan salah satu guru di Pesantren Bahagia. Kurang lebih seperti sudah diceritakan disitus pondok.
 Berdirinya Pesantren Annida Al Islamy merupakan pengganti dari Pesantren Bahagia dari segi kegiatan belajar mengajar dan penyebaran ilmu pengetahuan, namun bukanlah pesantren yang berdiri atas pelimpahan asset Pesantren Bahagia.
10. Apa tujuan dan arah pendidikan pesantren selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Ane kurang begitu tahu pasti, Pesantren didirikan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mau belajar mengenal dan memahami Islam. Sesuai dengan nama “Annida” yang dapat diartikan “seruan / panggilan”. Adapun arah pendidikan di Pesantren Annida Al Islamy banyak mengadopsi “fan” / mata pelajaran di Mekkah dan Madinah saat KH.Muhammad Muhadjirin belajar. Kekayaan khazanah pemahaman Islam dari berbagai mazhab melahirkan sikap toleransi diantara berbagai macam faham keIslaman. Arah pendidikan itulah yang hendak dicapai oleh KH.Muhammad Muhadjirin melalui kurikulum yang dirancangnya.
11. Seperti apa struktur kepengurusan pesantren selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Untuk pertanyaan ini, kepengurusan berpusat di pimpinan pondok untuk masalah kebijakan-kebijakan pesantren, lalu untuk kebijakan-kebijakan berkaitan santri itu ada di lurah pondok.
12. Apa dan bagaimana kurikulum dan sistem pengajaran di pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Kurikulum pendidikan yang dirancang oleh KH.Muhammad Muhadjirin banyak dipengaruhi oleh kurikulum Mekkah dan Madinah. bertujuan tidak diarahkan untuk “hanya” membenarkan salah satu pandangan atau mazhab saja, tapi untuk meemukan toleransi atas pelbagai mazhab lainnya.
13. Bagaiamanakah sistem jenjang pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?
 Jenjang pendidikan dimulai dari :
 - TPQ
 - Madrasah Tsanawiyah
 - Madrasah Aliyah
 - Ma’had Aly (Perguruan Tinggi)
6. Seperti apa kalender pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Kalender pendidikan yang dipergunakan adalah sama kayak kalender pendidikan madrasah di Departemen Agama, sehingga waktu awal belajar, libur, dan akhir tahun pelajaran sejalan dengan kalender pendidikan nasional. Tetapi, khusus untuk setiap tanggal merah non Islam, Pesantren Annida Al Islamy tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan.

7. Bagaimana perkembangan jumlah santri yang bermukim di Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin pada dekade 1970-an, 1980-an, dan 1990-1998 ?, adakah terjadi penurunan drastis jumlah santri ataukah sebaliknya ?, akan lebih baik disertai data jumlah penerimaan santri selama dekade tersebut di atas.

Pastinya sih terjadi perkembangan yang naik-turun dan cenderung tetap itu kalo yang mukim di pondok, nah kalo yang dimadrasah sih cenderung banyak dan bertambah. Ya itu saya tidak tau.

8. Bagaimanakah kehidupan santri di pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?, dan apa jadwal harian dan mingguan santri ?

Kehidupan santri gak jauh beda sama pesantren lain. Santri disini diajarkan disiplin dan mandiri, walau gitu sih Khidmat seorang santri kepada Kiai sangat kuat. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan santri yang begitu mandiri sehingga seluruh urusan rumah tangga kesantrian ditangani langsung oleh para pengurus yang notabene nya santri.

9. Pernahkah pesantren mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Orde Baru ?

Bantuan itu sih saya tidak tau, kan saya belum ada disini.

10. Pernahkah Syekh Muhadjirin berpolitik selama masa Orde Baru ?

Kalo dari cerita-cerita dari para senior sih, KH.Muhammad Muhadjirin selama hidupnya tidak pernah terjun ke partai politik atau menjadi tim sukses salah satu calon pemimpin. Pokoknya anti dah ma yang berbau politik.

11. Pada tahun 1980-an, apakah pesantren merasa terpinggirkan dan dipinggirkan oleh pemerintah Orde Baru, khususnya Pemerintah Kota Bekasi ?

Saya tidak tahu jawabannya.

12. Bagaimana sikap dan langkah pesantren dalam mengantisipasi sistem pendidikan modern pada zaman Orde Baru ?

Ya balik lagi dari cerita yang saya dapat dari para lurah pondok sebelum saya. Pesantren Annida Al Islamy berpandangan bahwa kelangsungan hidup dan belajar santri harus diutamakan. Seluruh perubahan kurikulum sejak zaman orde lama sampai dengan orde baru senantiasa diikuti. Ijazah sebagai syarat formal bagi setiap alumni pun senantiasa

mengikuti sistem pendidikan modern, walaupun diakui pada awalnya membutuhkan waktu untuk dapat sinkron dengan administrasi pendidikan modern.

13. Selama masa Orde Baru, apakah pesantren mendirikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, seperti; pertanian, peternakan, agri bisnis, koperasi, dan pengembangan ekonomi lainnya melalui badan pengembangan pesantren dan masyarakat ?

Tidak.

14. Pada pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah pesantren turut berperan aktif ?, dan atau apakah pesantren memasukkan teknologi yang sesuai dengan kurikulum pesantren, misalkan teknologi dalam bidang Astronomi ?

Teknologi ya, kalo pada masa itu saya tidak tahu banget, tapi teknologi melihat hilal atau astronomi sih udah maju.

15. Apakah terjadi pembaharuan sistem pendidikan pesantren Annida selama dipimpin Syekh Muhadjirin ?

Menurut saya sih pastinya ada pembaharuan, tapi itu terbatas sekali.

Saya sangat berterima Kasih atas kerjasama dan bantuannya.

Lampiran 17 Dokumentasi Yayasan P-3 sekitar tahun 1975.





البيانات الخاصة بالدراسة والبحوث


البيانات الخاصة بالدراسة والبحوث (المركبة)

عدد الحسابات	عدد النسخ			الاسماء	البيانات
	العدد	النسخ	النسخ		
1	1	-	75	أبو يوسف	74
1	1	-	75	أبو يوسف	75
1	1	-	75	أبو يوسف	76
1	1	-	75	أبو يوسف	77
1	1	-	75	أبو يوسف	78
1	1	-	75	أبو يوسف	79
1	1	-	75	أبو يوسف	80
1	1	-	75	أبو يوسف	81
1	1	-	75	أبو يوسف	82
1	1	-	75	أبو يوسف	83
1	1	-	75	أبو يوسف	84
1	1	-	75	أبو يوسف	85
1	1	-	75	أبو يوسف	86
1	1	-	75	أبو يوسف	87
1	1	-	75	أبو يوسف	88
1	1	-	75	أبو يوسف	89
1	1	-	75	أبو يوسف	90
1	1	-	75	أبو يوسف	91
1	1	-	75	أبو يوسف	92
1	1	-	75	أبو يوسف	93
1	1	-	75	أبو يوسف	94
1	1	-	75	أبو يوسف	95
1	1	-	75	أبو يوسف	96
1	1	-	75	أبو يوسف	97
1	1	-	75	أبو يوسف	98
1	1	-	75	أبو يوسف	99
1	1	-	75	أبو يوسف	100

البيانات الخاصة بالدراسة والبحوث

البيانات الخاصة بالدراسة والبحوث (المركبة)

عدد الحسابات	عدد النسخ			الاسماء	البيانات
	العدد	النسخ	النسخ		
1	1	-	75	أبو يوسف	74
1	1	-	75	أبو يوسف	75
1	1	-	75	أبو يوسف	76
1	1	-	75	أبو يوسف	77
1	1	-	75	أبو يوسف	78
1	1	-	75	أبو يوسف	79
1	1	-	75	أبو يوسف	80
1	1	-	75	أبو يوسف	81
1	1	-	75	أبو يوسف	82
1	1	-	75	أبو يوسف	83
1	1	-	75	أبو يوسف	84
1	1	-	75	أبو يوسف	85
1	1	-	75	أبو يوسف	86
1	1	-	75	أبو يوسف	87
1	1	-	75	أبو يوسف	88
1	1	-	75	أبو يوسف	89
1	1	-	75	أبو يوسف	90
1	1	-	75	أبو يوسف	91
1	1	-	75	أبو يوسف	92
1	1	-	75	أبو يوسف	93
1	1	-	75	أبو يوسف	94
1	1	-	75	أبو يوسف	95
1	1	-	75	أبو يوسف	96
1	1	-	75	أبو يوسف	97
1	1	-	75	أبو يوسف	98
1	1	-	75	أبو يوسف	99
1	1	-	75	أبو يوسف	100



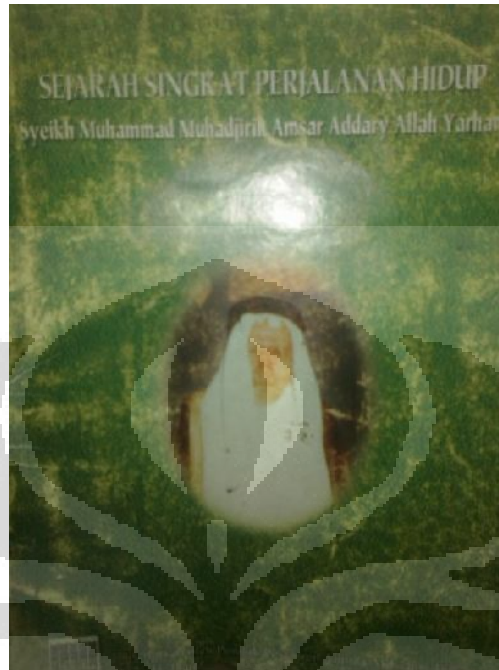
المواد الدراسية

رقم	المواد الدراسية	الاسابيع		
		الأولى	الثانية	الثالثة
1	التفسير	1	1	1
2	سائر التفسير	1	1	1
3	الفتاوى	1	1	1
4	مبادئ الحديث	1	1	1
5	توسيع الحديث	1	1	1
6	التفصيل	1	1	1
7	الفقه	1	1	1
8	أمون الفقه	1	1	1
9	ساسة الفقه	1	1	1
10	التاريخ الإسلامي	1	1	1
11	التاريخ	1	1	1
12	الفقه	1	1	1
13	الفقه	1	1	1
14	الفقه	1	1	1
15	الفقه	1	1	1
16	الفقه	1	1	1
17	الفقه	1	1	1
مجموع الحصص من الأسبوع		17	17	17

المواد الدراسية

رقم	المواد الدراسية	الاسابيع		
		الأولى	الثانية	الثالثة
1	التفسير	1	1	1
2	سائر التفسير	1	1	1
3	الفتاوى	1	1	1
4	مبادئ الحديث	1	1	1
5	توسيع الحديث	1	1	1
6	التفصيل	1	1	1
7	الفقه	1	1	1
8	أمون الفقه	1	1	1
9	ساسة الفقه	1	1	1
10	التاريخ الإسلامي	1	1	1
11	التاريخ	1	1	1
12	الفقه	1	1	1
13	الفقه	1	1	1
14	الفقه	1	1	1
15	الفقه	1	1	1
16	الفقه	1	1	1
17	الفقه	1	1	1
مجموع الحصص من الأسبوع		17	17	17

Lampiran 18 Buku Sejarah Singkat Annida Al-Islamy



JADWAL NAMA-KITAB KARANGAN
SYEKH MUHAMMAD MUHAJIRIN AMSAR ADDARY

Urut	Asma' kitab	bab	Urut
1	في الطائفة الأولى	الثقة	1
2	في الطائفة الثانية	الثقة	2
3	في الطائفة الثالثة	الثقة	3
4	مختارات	الثقة	4
5	الدرر المستوية الأولى	الثقة	5
6	الدرر المستوية الثانية	الثقة	6
7	مختارات البلاغة	البلاغة	7
8	مختارات البلاغة	البلاغة	8
9	تمهيد التعليل على حق الأئمة	التوحيد	9
10	شرح التعليلات على سنن الأئمة	التوحيد	10
11	تيسر الوصول في شرح الأصول	أصول الفقه	11
12	ابحاح الورد	أصول الفقه	12
13	استخراج الفروع علم الأصول	أصول الفقه	13
14	خلاصات	أصول الفقه	14
15	طرسات الشريعة	أصول الفقه	15

21

Nama-nama kitab karangan Syekh Muhadjirin Amsar Addary

16	معرفة الطرق الاجتهاد	اصول الفقه	المرحلة
17	تخريج الفروع على الاصول	اصول الفقه	المرحلة
18	القول الحديث في مصطلح الحديث	اصول الحديث	الثانوية
19	تعليقات على متن البيهقي	اصول الحديث	الثانوية
20	الاستذكار	اصول الحديث	العالية
21	المدارك في المنطق	المنطق	العالية
22	النهج المطلوب الى منطق الرغوب	المنطق	العالية
23	القول المفاتيح في علم الفرائد	الفرائض	العالية
24	معرفة السلعي	التاريخ	العالية
25	التخصيص تاريخ دولتين امية	التاريخ	العالية
26	تاريخ الادب العربي	التاريخ	العالية
27	تاريخ محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم	التاريخ	العالية
28	قواعد الخمس النبوية	قواعد الفقه	العالية
29	التبوير في اصول التفسير	اصول التفسير	العالية
30	تطبيق الآيات بالحديث	اصول التفسير	المرحلة
31	السقاية المرئية في البحث والمناظرة	انساب البحث	العالية
32	الفرع السمع في الوضع	الوضع	العالية
33	مطبايح الظلام	فقه الحديث	العالية
34	التعرف في التصوف	التصوف	المرحلة

Buku-buku karangan Syeikh Muhadjirin

Lampiran 19 foto-foto dokumentasi

Foto-foto KH Noer Alie dan Pesantren Attaqwa



Foto-foto KH Muhadjirin dan Pesantren Annida Al-Islamy



Foto-foto KH Dawam Anwar dan YAPINK

